RISALAH

RAPAT PARIPURNA DPRD
KABUPATEN REMBANG

TANGGAL : 2, 3 DAN 19 DESEMBER 2013

TENTANG

RAPERDA APBD KABUPATEN REMBANG
TAHUN ANGGARAN 2014

SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN REMBANG
Jl. P. Diponegoro No. 88 Telp. (0295) 691194
Rembang 59212

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

Jl. P. Diponegoro No.88 Telp. (0295) 691194 Kode Pos 59212
REMBANG

RISALAH

RAPAT PARIPURNA (I) DPRD KABUPATEN REMBANG DALAM RANGKA PEMBAHASAN RAPERDA APBD KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2014

Hari : SENIN
Tanggal : 2 Desember 2013
Waktu : 09.00 WIB.
Tempat : Gedung DPRD Kabupaten Rembang

I. **JENIS RAPAT** : Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Rembang

II. **SIFAT RAPAT** : Terbuka

III. **ACARA RAPAT** :

1. Pembukaan;
2. Penjelasan Bupati Rembang tentang Raperda APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2014;
3. Persetujuan Prolegda Tahun 2014;
4. Penutup.

IV. **PIMPINAN RAPAT**

1. Nama : **Ir. H. SUNARTO**
2. Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Rembang

V. **SEKRETARIS RAPAT**

1. Nama : Drs. **ACHMAD MUALIF**
2. Jabatan : Sekretaris DPRD Kabupaten Rembang

VI. JUMLAH ANGGOTA

1. Fraksi Demokrat	: 8 orang
2. Fraksi Golongan Karya	: 8 orang
3. Fraksi Persatuan Pembangunan	: 7 orang
4. Fraski Kebangkitan Bangsa	: 7 orang
5. Fraksi PDI Perjuangan	: 5 orang
6. Fraksi Amanat Nasional	: 5 orang
7. Fraksi Bintang Keadilan	: 5 orang
Jumlah	: 45 orang

VII. ANGGOTA YANG HADIR

1. Fraksi Demokrat	: 8 orang
2. Fraksi Golongan Karya	: 8 orang
3. Fraksi Persatuan Pembangunan	: 6 orang
4. Fraski Kebangkitan Bangsa	: 4 orang
5. Fraksi PDI Perjuangan	: 3 orang
6. Fraksi Amanat Nasional	: 4 orang
7. Fraksi Bintang Keadilan	: 4 orang
Jumlah	: 37 orang

VIII. ANGGOTA YANG TIDAK HADIR

1. Fraksi Demokrat	: - orang
2. Fraksi Golongan Karya	: - orang
3. Fraksi Persatuan Pembangunan	: 1 orang
4. Fraski Kebangkitan Bangsa	: 3 orang
5. Fraksi PDI Perjuangan	: 2 orang
6. Fraksi Amanat Nasional	: 1 orang
7. Fraksi Bintang Keadilan	: 1 orang
Jumlah	: 8 orang

IX. JALANNYA RAPAT

PIMPINAN RAPAT : Ir. H. SUNARTO

LAGU INDONESIA RAYA

Asalamu'alaikumWr. Wb.

Yang terhormat	Bupati dan Wakil Bupati Rembang
Yang saya hormati	Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Rembang.
Yang saya hormati	Ketua Pengadilan Negeri Rembang.
Yang saya hormati	Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Rembang
Yang saya hormati	Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Rembang.
Yang saya hormati	Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang
Yang saya hormati	Sekretaris DPRD, Staf Ahli Bupati, Asisten Sekda, Kepala Badan, Dinas, Kantor, Bagian, Instansi dan Camat se Kabupaten Rembang
Yang saya hormati	Pimpinan Partai Politik, LSM, para wartawan dan semua undangan lainnya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.

Mengawali Rapat Paripurna hari ini, sebagai insan Pancasila yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah SWT, marilah kita selalu memanjatkan puji syukur kehadiratNya, atas segala kenikmatan, kesehatan dan kesempatan yang diberikan kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat melaksanakan dan mengikuti Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Rembang dalam rangka Pembahasan Raperda tentang APBD Kabupaten Rembang Tahun 2014 dalam keadaan sehat wal afiat tanpa aral suatu apa.

Rapat Dewan dan hadirin yang terhormat,

Proses pembahasan Raperda APBD Tahun Anggaran 2014 sangat erat kaitannya dengan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA-PPAS) Tahun 2014, yang mengacu pada

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 , Undang-Undang Nomor 33Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011. Hal ini tercermin dalam rencana pendapatan, rencana belanja dan rencana pembiayaan, baik menyangkut kegiatan belanja langsung maupun belanja tidak langsung yang tertuang dalam Rencana Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2014.

Rapat Dewan dan hadirin yang terhormat,

Sesuai dengan hasil Rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Rembang bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang tanggal 29 November 2013, bahwa Rapat Paripurna hari ini merupakan Rapat Paripurna pertama (I) dari 3 (tiga) Rapat Paripurna dalam rangka Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2014.

Berdasarkan ketentuan Pasal 80 ayat (1) huruf b Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang berdasarkan disebutkan bahwa ***"Rapat Paripurna DPRD memenuhi kuorum apabila dihadiri***

sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota DPRD untuk menetapkan Peraturan Daerah".

Dan menurut catatan yang saya terima dari Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang bahwa dari jumlah anggota DPRD sebanyak 45 orang, yang hadir secara fisik dan menandatangani daftar hadir sebanyak 38 orang. Dengan demikian, maka Rapat Paripurna hari ini telah memenuhi kuorum.

Selanjutnya dengan mengucap "***Bismillahirrohmanirrohim***"tepat pukul 11.00 WIB Rapat Paripurna DPRD saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

(*Ketuk Palu 3 Kali*)

Rapat Dewan dan hadirin yang terhormat,

Perlu kami sampaikan sebelumnya bahwa pada Rapat Paripurna hari ini sebagaimana hasil yang ditetapkan dalam Rapat Banmus dan TAPD Kabupaten Rembang, terdapat dua agenda pokok yakni Penjelasan Bupati Rembang tentang Raperda APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2014 dan Persetujuan Program Legislasi Daerah (Prolegda) Tahun 2014. Sehingga susunan acara pada hari ini adalah sebagai berikut:

1. Pembukaan;
2. Penjelasan Bupati Rembang tentang Raperda APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2014;
3. Persetujuan Prolegda Tahun 2014;
4. Penutup.

Selanjutnya kita masuki acara yang kedua, yaitu***"Penjelasan Bupati tentang Raperda APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2014".***

Kepada Saudara Bupati , dipersilahkan.

=== PENJELASAN BUPATI TENTANG RAPERDA APBD KABUPATEN REMBANGT.A 2014 ===

(Diwakili oleh Sdr. Wakil Bupati H. Abdul Hafidz Teks terlampir)

Terima kasih saya sampaikan kepada Sdr. Wakil Bupati yang telah menyampaikan Penjelasan Bupati tentang Raperda APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2014.

Rapat Dewan dan hadirin yang terhormat,

Kita lanjutkan dengan acara yang ketiga yaitu " ***Persetujuan Prolegda Kabupaten Rembang Tahun 2014".***

Sebagaimana tertuang di dalam Bab III, Bagian Ketiga, Pasal 12 dan Pasal 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2011tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah dijelaskan bahwa ***Penyusunan dan penetapan prolegda dilakukan setiap tahun sebelum penetapan Rancangan Perda tentang APBD provinsi dan APBD kabupaten/kota serta Penyusunan Prolegda antara pemerintah daerah dan DPRD dikoordinasikan oleh DPRD melalui Balegda dan hasilnya disepakati menjadi prolegda dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD.***

Atas dasar tersebut, Balegda DPRD telah melakukan koordinasi dengan Tim Prolegda Pemerintah Kabupaten Rembang pada tanggal 27 November 2013 dalam rapat Balegda membahas Prolegda Tahun 2014. Dari pelaksanaan rapat telah dihasilkan Rancangan Keputusan DPRD Kabupaten Rembang tentang Prolegda Kabupaten Rembang Tahun 2014, sebagaimana fotocopy yang ada ditangan Saudara-saudara anggota DPRD Kabupaten Rembang semua. Namun untuk keabsahannya perlu

saya mintakan persetujuan dari saudara-saudara anggota DPRD yang hadir dalam Rapat Paripurna ini.

" Apakah Rancangan Prolegda Kabupaten Rembang Tahun 2014 dapat disetujui dan disahkan menjadi Prolegda Tahun 2014 ? "

(Semua Anggota Setuju)

(*Ketuk Palu 1 Kali*)

Terima kasih. Dengan demikian Rancangan Prolegda Kabupaten Rembang Tahun 2014 hasil pembahasan antara Balegda DPRD Kabupaten Rembang dengan Tim Prolegda Pemerintah Kabupaten Rembang dapat disetujui untuk disahkan menjadi Prolegda Tahun 2014, dan akan ditetapkan dengan Keputusan DPRD Kabupaten Rembang.

Rapat Dewan dan hadirin yang terhormat,

Demikian acara Rapat Paripurna Pertama (I) dalam rangka Pembahasan Raperda APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2014 hari ini telah sampai pada penghujung acara, selanjutnya akan ditindak lanjuti dengan Rapat Fraksi pada hari ini juga untuk menyusun Pemandangan Umum Fraksi sebagai bahan Pelaksanaan Rapat Paripurna Kedua (II) tanggal 3 Desember 2013 besok pagi dengan agenda pokok Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi terhadap Raperda APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2014 dan Jawaban Bupati atas Pemandangan Umum Fraksi .

Sebelum saya akhiri rapat ini, sangat penting saya sampaikan bahwa mengingat acara besuk pagi tanggal 3 Desember 2013 padat yaitu

6 agenda, oleh karena itu Saudara Anggota DPRD diharap dapat hadir lebih tepat waktu.

Akhirnya terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan selama saya memimpin rapat pada hari ini.Dengan mengucap "***Alhamdulillaahi robbil 'alamiin***" tepat pukul 11.30 WIB Rapat Paripurna DPRD hari ini saya nyatakan ditutup.

(Ketuk Palu 3 Kali)

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

KETUA	SEKRETARIS
Ir. H. SUNARTO	**Drs. ACHMAD MUALIF**
	Pembina Utama Muda
	NIP. 19620804 198803 1 011

LAMPIRAN :RISALAH RAPAT PARIPURNA (I) DPRD KABUPATEN REMBANG DALAM RANGKA PEMBAHASAN APBD KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2014

LAMPIRAN I	:	Daftar Hadir Pimpinan dan Anggota DPRD, Forum koordinasi Pimpinan Daerah , SKPD dan Camat Se Kabupaten Rembang;
LAMPIRAN II	:	Teks Penjelasan Bupati tentang Pengantar Nota Keuangan Raperda tentang APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2014;
LAMPIRAN III	:	Keputusan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 11 Tahun 2013 tentang Program Legislasi daerah Kabupaten Rembang Tahun 2014.

DAFTAR HADIR
RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN REMBANG (I)
MEMBAHAS RAPERDA APBD KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN2014

HARI/TANGGAL : SENIN, 2 DESEMBER 2013
PUKUL : 09.00 WIB

NO	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN	KET
1	2	3	4	5
	FRAKSI DEMOKRAT			
1	Ir. H. SUNARTO	Ketua	1	
2	H. ISLAHUDDIN	Anggota	2	
3	H. HARNO, SE	Anggota	3	
4	GUNASIH, SE	Anggota	4	
5	IMRO'ATUS SOLICHAH, SE	Anggota	5	
6	Hj. HIKMAH PURNAMAWATI	Anggota	6	
7	EDI KARTONO, S.Pd	Anggota	7	
8	MUGIYARTO, ST	Anggota	8	
	FRAKSI PARTAI GOLKAR			
9	CATUR WINANTO, SH	Wakil Ketua	9	
10	H. ISMARI	Anggota	10	
11	SUCI RAHAYU, SH	Anggota	11	
12	JOKO SOESILO	Anggota	12	
13	GATOT PAERAN, SH MSi	Anggota	13	
14	KHAIRUL MUTAKIM	Anggota	14	
15	CHAIRUL ANWAR, S.Sos	Anggota	15	
16	SRI REJEKI, SH	Anggota	16	
	FRAKSI PERSATUAN PEMBANGUNAN			
17	H. MAJID KAMIL MZ	Wakil Ketua	17	
18	H. SA'DULLAH	Anggota	18	
19	H.M. MURSYID, ST	Anggota	19	
20	H. HAKAM, SH	Anggota	20	
21	SULISTYO WETI ARIANI	Anggota	21	
22	KODRIYAH, S.Pd	Anggota	22	
23	H. YUDIANTO, SH	Anggota	23	
	FRAKSI KEBANGKITAN BANGSA			
24	SUWANTO	Wakil Ketua	24	
25	MUHAMMAD ASNAWI, S.Pdi	Anggota	25	
26	H. SUTARYO SHOLEH	Anggota	26	
27	PUJI SANTOSO, SP, MH	Anggota	27	
28	H.M. NOOR HASAN, SH	Anggota	28	
29	H. SHOLEH, BA	Anggota	29	
30	H.M. SHODIQIN YASIR	Anggota	30	DL

NO	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN	KET
1	2	3	4	5
	FRAKSI PDI PERJUANGAN			
31	JASMANI	Anggota	31	
32	SUPRIHADI	Anggota	32	
33	SUMARSIH	Anggota	33	
34	RIDWAN, SH, MH	Anggota	34	
35	A. MASKUR RUKHANI	Anggota	35	
	FRAKSI AMANAT NASIONAL			
36	JIHAD ASIA PUSTAKAWAN, SE	Anggota	36	
37	H. MOH. NURHASAN, SH	Anggota	37	
38	MOH. IMAM ZARKASI	Anggota	38	
39	SUKARMAIN	Anggota	39	
40	SAHNINGSIH, SE	Anggota	40	
	FRAKSI BINTANG KEADILAN			
41	dr. ROCHMAD ISNAINI	Anggota	41	
42	ACHMAD ZAMHURI	Anggota	42	
43	MUNTHOHID, SH	Anggota	43	
44	H. JOKO SUPRIHADI, SH	Anggota	44	DL
45	DHIAN RAHWENI DEWI	Anggota	45	

Keterangan :

1 I : Ijin
2 S : Sakit
3 C : Cuti
4 DL : Dinas Luar

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG
KETUA

Ir. H. SUNARTO

PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
SEKRETARIAT DPRD

DAFTAR HADIR
RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN REMBANG (I)
MEMBAHAS RAPERDA APBD KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2014

HARI/TANGGAL : SENIN, 2 DESEMBER 2013
PUKUL : 09.00 WIB

NO	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	H. MOCH SALIM	Bupati Rembang	1. .....
2.	H. ABDUL HAFIDZ	Wakil Bupati Rembang	2. .....
3.	HAMZAH FATONI, SH MKn	Sekretaris Daerah	3. .....
4.	.....	Kejaksaan Negeri Rembang	4. .....
5.	.....	Pengadilan Negeri Rembang	5. .....
6.	NUR SUTIYASNO	Dandim 0720 Rembang Wadandim	6. .....
7.	SRI IRIYANTI, SH	Kepolisian Resort Rembang	7. .....
8.	.....	Pengadilan Agama Kab. Rembang	8. .....

SEKRETARIS DPRD KAB. REMBANG

Drs. ACHMAD MUALIF
NIP. 19620804 198803 1 011

DAFTAR HADIR

RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN REMBANG (I)

MEMBAHAS RAPERDA APBD KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2014

HARI/TANGGAL : SENIN, 2 DESEMBER 2013

PUKUL : 09.00 WIB

NO	JABATAN	NAMA	TANDA TANGAN
1	CAMAT REMBANG	H. Ayus Sulim	1
2	CAMAT KALIORI	Bambang Cetiyono	2
3	CAMAT SUMBER	HERIJONO	3
4	CAMAT SULANG	TEGUH. G	4
5	CAMAT BULU	SUTWANTORO	5
6	CAMAT PAMOTAN	M. Wiyanto	6
7	CAMAT GUNEM	TEGUH. G	7
8	CAMAT SALE	SUYADI	8
9	CAMAT LASEM	KUKUH	9
10	CAMAT PANCUR		10
11	CAMAT SEDAN		11
12	CAMAT SLUKE		12
13	CAMAT KRAGAN	MASHADI	13
14	CAMAT SARANG	Eddy Kuswanto	14

SEKRETARIS DPRD KAB. REMBANG

Drs. ACHMAD MUALIF

NIP. 19620804 198803 1 011

DAFTAR HADIR
RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN REMBANG (I)
MEMBAHAS RAPERDA APBD KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2014

HARI/TANGGAL : SENIN, 2 DESEMBER 2013
PUKUL : 09.00 WIB

NO	BADAN/BAG/DINAS/KANTOR	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
1	STAF AHLI BUPATI	Wartono		1
2	STAF AHLI BUPATI			2
3	STAF AHLI BUPATI	Nur Effendi		3
4	STAF AHLI BUPATI			4
5	ASISTEN I SEKDA			5
6	ASISTEN II SEKDA	[illegible]	[illegible]	6
7	ASISTEN III SEKDA			7
8	BAG. TATA PEMERINTAHAN			8
9	BAG. HUKUM			9
10	BAG. HUMAS	JOHAN NW		10
11	BAG. ADM. PEMBANGUNAN	Rizal Mustaqim		11
12	BAG. ADM. PEREKONOMIAN			12
13	BAG. KESEJAHTERAAN RAKYAT	ABDULLAH		13
14	BAG. ADM. KEUANGAN	Tri Hartjonlo		14
15	BAG. ORGNS. & KEPEGAWAIAN	End Sukarwati	ORPEG	15
16	BAG. UMUM	[illegible]		16
17	DPPKAD	Mustain	DPPKAD	17
18	INSPEKTORAT	FAHRUDIN		18
19	BAPPEDA	Drupodo		19
20	BPMPKB	Dwi Wahyuni H.	Ka Bpmpkb	20
21	B K D	Suparmen	KA.	21
22	BKP & P4K	Wuryono	Sekr.	22
23	B P B D	Anjar	Sekretaris	23
24	DINAS PEKERJAAN UMUM	Fruqotolrot	Sekretaris	24
25	DINAS KESEHATAN	Titiek W.	Kabid	25
26	DINAS PENDIDIKAN			26
27	DINPERINDAGKOP & UMKM	Mustafa	Kadi	27
28	DINTANHUT	Suratman		28
29	DINLUTKAN	BUDIYONO	Sekretaris	29
30	DINHUBKOMINFO	SUYONO	Ka Dinas	30
31	DINAS DUKCAPIL	M. Daemuri	Ka Dis	31
32	DINSOSNAKERTRANS	PRAPTO. R	KABID	32
33	DINBUDPARPORA	SURYAWAN	Sek.	33

NO	BADAN/BAG/DINAS/KANTOR	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
34	DINAS ENERGI & SDM	AGUS SUPRIYANTO	KA	34
35	BADAN LINGKUNGAN HIDUP	[illegible]	Ka BLH	35
36	KANTOR KESBANGPOLINMAS	Didik S	Ka SH	36
37	KANTOR PERPUST & ARSIP	Edi W	Ka Pendisi	37
38	KANTOR PPT	Sri Sugiyanti	Ka RPPT	38
39	RSUD dr. R. SUTRASNO	Y. EKO. S	KABAG TU	39
40	SATPOL PP			40
41	TIM PKK KAB. REMBANG			41
42	P D A M	Hernawan	Ka. Adm Keu	42
43	PERCETAKAN DAERAH	Koesbandini	Kw.	43
44	PD. BANK PASAR			44
45	BPD JATENG CAB. REMBANG			45
46	BRI CAB. REMBANG			46
47	BKK LASEM			47
48	R B S J	Nurul An		48
49	B P N KAB. REMBANG			49
50	KANTOR KEMENTRIAN AGAMA	M. MAHMUDI	Ka. Rembang	50
51	DIPENDA PROPINSI			51
52	BPS KAB. REMBANG	MUNCAR		52
53	RUMAH TAHANAN			53
54	PERHUTANI KPH MANTINGAN			54
55	PERHUTANI KPH KEBONHARJO			55
56	KANTOR PERHUTANI SPH IV			56
57	KPU KAB. REMBANG			57
58	SEKRETARIS KPU KAB. REMBANG			58
59	KANTOR POS DAN GIRO			59
60	TELKOM REMBANG			60
61	PLN CAB. REMBANG			61
62	PANWASLU KAB. REMBANG			62
63		Agus W	SAFPG	63
64	A. MUSLIGLI M	MR		64
65	Supriyanto	Pendin 0720/pm.		65
66				66
67				67
68				68
69				69
70				70

NO	BADAN/BAG/DINAS/KANTOR	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
71	KODIM 0720	SUDIYONO	BAMUDI	71
72	polres Rbg	Nawani		72
73	Polres Rbg	Marjuhi	Bomi -	73
74	Mujinara Kerka	Mulyanto	waritaw	74
75				75
76				76
77				77
78				78
79				79
80				80
81				81
82				82
83				83
84				84
85				85
86				86
87				87
88				88
89				89
90				90
91				91
92				92
93				93
94				94
95				95
96				96
97				97
98				98
99				99
100				100
101				101
102				102

SEKRETARIS DPRD KAB. REMBANG

Drs. ACHMAD MUALIF
NIP. 19620804 198803 1 011

PENGANTAR
NOTA KEUANGAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN REMBANG

TAHUN ANGGARAN 2014

BUPATI REMBANG

PENGANTAR NOTA KEUANGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2014

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Salam sejahtera untuk kita semua

Yang saya hormati, Sdr. Pimpinan DPRD, Ketua Komisi, Ketua Fraksi dan segenap anggota DPRD;

Yang saya hormati, Rekan-rekan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Rembang;

Yang saya hormati, Sdr. Wakil Bupati Rembang;

Yang saya hormati, Sdr. Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang;

Yang saya hormati, Sdr. Staff Ahli Bupati, Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Badan, Kepala Dinas, Kepala Kantor, Kepala Bagian dan Camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang;

Yang saya hormati, Sdr. Pimpinan Organisasi Profesi, LSM dan hadirin yang berbahagia.

Mengawali sambutan ini, perkenankanlah saya mengajak hadirin untuk selalu memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, karena atas limpahan rahmat dan hidayah Nya lah kita dapat hadir dalam rangka penyampaian Pengantar Nota Keuangan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah *Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2014.*

Hadirin Sidang Dewan yang Saya hormati,

Rasa syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT dan apresiasi kami khususnya kerjasama yang baik dan optimal antara Eksekutif dengan Legislatif yang telah terjalin selama ini, sehingga *berbagai agenda dan tahapan pembangunan dapat kita laksanakan* dengan sebaik-baiknya.

Nota Keuangan RAPBD Tahun Anggaran 2014 merupakan bagian tak terpisahkan dari proses penyusunan APBD Kabupaten Rembang, sekaligus juga memberikan gambaran tentang substansi *rencana pembangunan dan rencana anggaran yang disusun dan* menjadi komponen RAPBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2014.

Pembangunan yang kita laksanakan telah membawa kemajuan bagi masyarakat di Kabupaten Rembang, ini adalah berkat upaya, jerih payah dan kerja keras dari kita semua pemangku kepentingan di Kabupaten Rembang. Keberhasilan yang di capai, hendaknya kita pelihara bersama dan dimanfaatkan secara optimal *untuk lebih memacu pembangunan daerah. Terhadap kekurangan* yang ada, kita jadikan bahan evaluasi kembali terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang ada, agar di tahun mendatang dapat terencana dan terlaksana lebih baik, yang lebih riil dirasakan oleh masyarakat.

Hadirin Sidang Dewan yang Saya hormati,

Sebagai instrumen kebijakan daerah RAPBD merupakan posisi sentral dalam rangka pengembangan kemampuan dan efektivitas pemerintahan, yaitu dalam mewujudkan pencapaian visi dan misi serta untuk mengatasi permasalahan yang ada, sehingga proses penyusunan anggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran difokuskan sebagai upaya guna mendukung program dan kegiatan yang menjadi prioritas daerah.

Kebijakan pembangunan dalam tahun 2014, telah dijabarkan secara rinci dalam RKPD tahun 2014, yang menjadi dasar dalam penyusunan RAPBD tahun 2014 ini, guna mencapai sasaran –sasaran RPJMD tahun 2010-1015 tahap ketiga tahun pertama yaitu terwujudnya masyarakat Rembang yang maju, mandiri dan sejahtera. Dalam menyusun RAPBD selalu dihadapkan pada permasalahan seberapa besar kemampuan Pendapatan Daerah yang akan dimanfaatkan dan digunakan untuk Belanja Daerah. Pilihan prioritas program dan kegiatan dalam RAPBD TA. 2014 perlu dibahas bersama, selanjutnya menjadi produk kebijakan yang akan diwujudkan dalam bentuk rencana kegiatan yang bersifat indikatif.

Hadirin sidang Dewan yang saya hormati,

Penyusunan RAPBD Tahun 2014 yang diawali dengan perencanaan penganggaran dalam bentuk nota kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD). Kajian mendalam dari SKPD untuk melakukan langkah-langkah penajaman terhadap Rencana Kerja Anggaran yang benar-benar sesuai dengan prioritas yang bertujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menciptakan kesempatan kerja dan mengurangi kemiskinan. Prinsip penganggaran dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi

pada pencapaian input yang direncanakan. Semangat membangun infrastruktur bagi peningkatan sendi-sendi perekonomian dan program sosial di bidang pendidikan dan kesehatan sangat menentukan bagi perbaikan kesejahteraan rakyat dan dalam rangka akselerasi pertumbuhan daerah melalui peningkatan produktifitas, akses modal UMKM, Pertumbuhan investasi dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

Prioritas pembangunan Pemerintah Kabupaten Rembang pada tahun 2014 di arahkan untuk :

1) Meningkatkan kualitas pelayanan dasar di bidang pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial yang didukung optimalisasi pengarusutamaan gender dan hak anak.
2) Mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui koordinasi dan efektifitas kebijakan sektor riil, pemilihan potensi komoditas unggulan sebagai basis pengembangan wilayah dalam upaya peningkatan daya saing daerah serta pemberdayaan ekonomi masyarakat khususnya dari UMKM dalam rangka penguatan peran koperasi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
3) Meningkatkan pemerataan distribusi pendapatan melalui percepatan pertumbuhan ekonomi di pedesaan dan menciptakan keseimbangan pembangunan di setiap wilayah, serta pengembangan sentra - sentra produksi andalan pada sektor-sektor potensial, percepatan pembangunan pertanian, pemberdayaan ekonomi rakyat dan memperluas cakupan program pembangunan yang berbasis masyarakat, pengembangan produk unggulan yang meliputi : agribisnis, industry manufaktur, dan pariwsata.
4) Meningkatkan investasi daerah yang mampu memperluas kesempatan kerja dan berusaha yang mampu meningkatkan pendapatan daerah.

5) Mendorong peningkatan kemampuan ekonomi daerah untuk menciptakan lapangan kerja melalui peningkatan ketrampilan tenaga kerja, penumbuhan wirausaha, peningkatan akses masyarakat miskin terhadap pelayanan dasar dan optimalisasi pemanfaatan program – program penanggulangan kemiskinan, juga upaya peningkatan ketahanan pangan melalui pemberdayaan lumbung desa.
6) Percepatan pembangunan sarana dan prasarana untuk mendukung percepatan pembangunan ekonomi maupun peningkatan kualitas kehidupan masyarakat dibidang kesehatan, pendidikan, sosial ekonomi masyarakat, pekerjaan umum, perhubungan dan irigasi.

Selanjutnya, dalam rangka pencapaian visi misi serta arah kebijakan pada tahun 2014, Pemerintah Kabupaten Rembang menetapkan prioritas pembangunan daerah sebagai berikut :

1) Meningkatkan daya tarik investasi di Kabupaten Rembang.
2) Meningkatkan penyaluran modal bagi pelaku UMKM.
3) Meningkatkan Iklim yang kondusif bagi pengembangan UMKM.
4) Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan usaha pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan dalam rangka pengembangan wilayah pesisir.
5) Mengoptimalkan intensifikasi, efisiensi dan pemanfaatan potensi sumber-sumber pendapatan asli daerah.
6) Mengoptimalkan penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas, perbaikan sarana dan prasarana, penyediaan sarana penunjang pembelajaran, penyediaan beasiswa dan kerjasama dengan pengguna pada semua jenjang pendidikan baik formal maupun non formal.
7) Meningkatkan jumlah dan kualitas tenaga kesehatan dan lembaga penyelenggara pelayanan kesehatan.

8) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia di segala bidang yang kompenten, profesonal, mandiri dan bermanfaat dengan didasari keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan yang Maha esa.
9) Meningkatkan kwalitas infrastruktur dasar, pembangunan infrastruktur pedesaan dan wilayah cepat tumbuh.
10) Mengembangkan tata kelola wilayah pesisir yang mampu menjadi pemicu pergerakan ekonomi daerah.
11) Mengembangkan tatakelola pemerintah yang baik, responsif terhadap perkembangan dan perubahan dinamika kebijakan dan proaktif dalam mengantisipasi perkembangan global, ditopang dengan teknolog komunikasi dan informasi yang memadai.

Hadirin Sidang Dewan yang Saya hormati,

Dalam RAPBD TA 2014 pendapatan Daerah direncanakan mencapai Rp.1.121.607.885.969. Jumlah ini naik 1,22 persen dari target pandapatan daerah pada APBD tahun 2013 sebesar Rp.1.108.077.978.224. Sementara itu, anggaran belanja daerah direncanakan mencapai Rp.1.200.569.624.150, naik 7,0 persen dari pagu belanja daerah pada APBD tahun 2013 yang sebesar Rp.1.121.777.868.224.

Dari anggaran pendapatan daerah Rp.1.121.607.885.969, Pendapatan Asli Daerah (PAD) direncanakan sebesar Rp.134.850.273.200,00 naik 1,06 persen dari target APBD tahun 2013 sebesar Rp.127.132.548.700,00. Dana Perimbangan yang berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp.700.774.721.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp. 1,09 persen dibandingkan besaran DAU pada APBD Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp.640.273.360.000,00

Sedangkan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp.61.608.000.000,00 mengalami kenaikan sebesar 1,0 persen

dibandingkan DAK pada APBD Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp. 56.771.470.000,00

Sementara itu untuk Pendapatan Daerah yang bersumber dari Bantuan Keuangan dari Pemerintah Propinsi beserta belanja kegiatannya belum dicantumkan, karena sampai saat ini belum ada penetapan dari Pemerintah Propinsi.

Dari sisi belanja, dalam RAPBD tahun 2014 ini pemerintah daerah berupaya untuk terus meningkatkan kualitas belanja daerah secara menyeluruh untuk itu pemerintah daerah menggariskan langkah-langkah sebagai berikut :

Pertama, berusaha memenuhi amanat untuk mengalokasikan anggaran pelaksanaan urusan baik urusan wajib maupun urusan pilihan utamanya pendidikan dan urusan kesehatan maupun belanja bantuan keuangan desa sesuai ketentuan.

Kedua, mempertajam alokasi belanja untuk mendukung pembangunan infrastruktur, penciptaan lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan

Ketiga, melakukan penghematan terhadap kegiatan-kegiatan yang kurang produktif, seperti biaya perjalanan dinas, kegiatan rapat kerja, workshop, seminar dan kegiatan lain yang sejenis.

Berdasarkan arah kebijakan dan sasaran strategis tersebut, maka total belanja daerah dalam RAPBD TA 2014 sebesar Rp.1.200.569.624.150, yang dialokasikan antara lain :

I. Bidang Pendidikan

1. Program Pendidikan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun Rp.57.944.583.000
2. Program pendidikan menengah Rp.5.383.000.000
3. Program pendidikan Non Formal Rp.1.699.650.000

II. Bidang Kesehatan

1. Obat dan Perbekalan Kesehatan Rp.3.851.320.000
2. Upaya Kesehatan Masyarakat Rp.8.271.339.000
3. Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan sarana dan prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya Rp.8.726.565.000

III. Bidang Pekerjaan Umum

1. Peningkatan sarana dan prasarana jalan dan jembatan Rp.44.290.001.100
2. Pengelolaan RTH Rp.4.670.000.000
3. Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya Rp.5.971.804.700
4. Peningkatan pembangunan infrastruktur perdesaan Rp.58.266.480.000

IV. Bidang Perencanaan Pembangunan

- Perencanaan Pembangunan Daerah Rp.1.490.000.000

V. Bidang Perhubungan

- Peningkatan ketertiban keamanan dan keselamatan pelayaran Rp.1.058.600.000

VI. Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil

- Penataan administrasi kependudukan Rp.1.191.100.000

VII. Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

1. Program Kependudukan dan KB Rp.1.095.700.000
2. Pengadaan Sarana dan Prasarana pendukung KB Rp.1.435.189.400

VIII. Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

- Peningkatan Assistensi Perdagangan Dalam Negeri Rp.2.829.078.900

IX. Bidang Pemerintahan Umum

- Peningkatan kualitas pelayanan informasi dan kehumasan Rp.1.358.500.000
- Peningkatan Sarana Prasarana Pemerintah dan Pelayanan Umum Rp.1.500.000.000
- Peningkatan jaminan kesejahteraan sosial kemasyarakatan Rp.1.690.500.000
- Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan keagamaan Rp.4.229.500.000

X. Bidang Pertanian

1. Peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian Rp.7.584.500.000
2. Pengembangan jaringan irigasi petanian /perkebunan Rp.3.197.267.000
3. Peningkatan kualitas bahan baku Rp.2.070.950.000

XI. Bidang Kelautan dan Perikanan

1. Pembangunan TPI Rp.7.493.104.100
2. Pengelolaan TPI Rp.2.800.000.000
3. Pembangunan jalan pangkalan pendaratan ikan Rp.3.635.500.000
4. Pembangunan pertokoan di pangkalan pendaratan ikan Rp.2.105.470.000

3. **Pembiayaan Daerah**

Pada pengeluaran pembiayaan RAPBD TA 2014 penyertaan modal sebesar Rp.3.355.000.000 terdiri dari :

- PT. Bank Jateng sebesar Rp.2.000.000.000
- PD BPR BKK Lasem sebesar Rp.1.000.000.000
- PD BPR BKK Kaliori sebesar Rp.355.000.000

Secara rinci, berikut kami sampaikan ringkasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2014

Uraian	Jumlah
PENDAPATAN DAERAH	**1.121.607.885.969**
Pendapatan Asli Daerah	**134.850.273.200**
Pendapatan Pajak Daerah	29.982.000.000
Hasil Retribusi Daerah	25.986.787.000
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.683.275.000
Lain - lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	75.198.211.200
Dana Perimbangan	**791.922.055.000**
Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	29.539.334.000
Dana Alokasi Umum	700.774.721.000
Dana Alokasi Khusus	61.608.000.000
Lain - lain Pendapatan Daerah yang Sah	**194.835.557.769**
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	44.334.655.769
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	150.500.902.000
BELANJA	**1.200.569.624.150**
Belanja Tidak Langsung	**732.868.771.550**
Belanja Pegawai	665.133.180.550
Belanja Bunga	37.000.000
Belanja Hibah	24.893.391.000
Belanja Bantuan Sosial	*5.823.000.000*
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	35.982.200.000
Belanja Tidak Terduga	1.000.000.000
Belanja Langsung	**467.700.852.600**
Belanja Pegawai	*77.257.607.600*
Belanja Barang dan Jasa	220.940.624.260
Belanja Modal	169.502.620.740
SURPLUS / (DEFISIT)	**(78.961.738.181)**
PEMBIAYAAN DAERAH	
Penerimaan Pembiayaan Daerah	**82.371.738.181**
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA)	82.371.738.181
Pengeluaran Pembiayaan Daerah	**3.410.000.000**
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	3.355.000.000
Pembayaran Pokok Utang	55.000.000
PEMBIAYAAN NETTO	**78.961.738.181**
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	**-**

Hadirin Sidang Dewan yang Saya Hormati,

Demikian telah kami sampaikan Pengantar Nota Keuangan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2014, dan telah kami sampaikan pula Buku *Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan* Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2014, mengingat Rancangan APBD merupakan kerangka kebijakan publik yang harus kita pertanggungjawabkan, maka Saya berharap agar segera dibahas secara mendalam, obyektif dan berdasar peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2014 ini dapat ditetapkan sesuai tahapan penganggaran dan dapat *dipertanggungjawabkan dan segera dapat ditetapkan menjadi* Peraturan Daerah.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Rembang, 2 Desember 2013

BUPATI REMBANG

H. MOCH. SALIM, M. Hum

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG
Jl. Diponegoro No. 88 Telp (0295) 691194 Kode Pos 59282
REMBANG

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

NOMOR 11 TAHUN 2013

TENTANG

PROGRAM LEGISLASI DAERAH KABUPATEN REMBANG
TAHUN 2014

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 12 ayat (1),(2),(3) dan Pasal 13 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah menyebutkan bahwa Program Legislasi Daerah disusun dalam jangka waktu 1(satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan Rancangan Peraturan Daerah yang dilaksanakan sebelum penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang yang ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Rembang

b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, diperlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang yang dituangkan dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

5. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan ;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang ;

8. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2010 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2010 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Menyetujui Penetapan Program Legislasi Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2014, sebagaimana terlampir.

KEDUA : Program Legislasi Daerah sebagaimana diktum PERTAMA Keputusan ini menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2014.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di : Rembang
Pada tanggal : 2 Desember 2013

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG
Ketua,

Ir. H. SUNARTO

Lampiran : Keputusan DPRD Kab. Rembang
Nomor : 11 Thn 2013
Tanggal : 2 Desember 2013

1. Raperda tentang Perubahan Kedua atas Perda Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (ULP Barang / Jasa Pemerintah Daerah kabupaten Rembang ;

2. Raperda tentang Badan Narkotika Nasional Kabupaten Rembang ;

3. Raperda tentang Perubahan atas Perda nomor 4 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan ;

4. Raperda tentang Perlindungan Anak ;

5. Raperda tentang Perubahan atas Perda Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkriditan Rakyat , Bank Pasar Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang ;

6. Raperda tentang Perubahan Perda Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pengelolaan TPI di Kabupaten Rembang ;

7. Raperda tentang Perubahan atas Perda Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Perijinan Tertentu.

8. Raperda tentang Pengelolaan Cadar Budaya

9. Raperda tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik

10. Raperda tentang Penataan dan Pembinaaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern di Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di : Rembang
Pada tanggal : 2 Desember 2013

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG
Ketua,

Ir. H. SUNARTO

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

Jl. P. Diponegoro No.88 Telp. (0295) 691194 Kode Pos 59212
REMBANG

RISALAH

RAPAT PARIPURNA (II) DPRD KABUPATEN REMBANG DALAM RANGKA PEMBAHASAN RAPERDA APBD KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2014

Hari : SELASA
Tanggal : 3 Desember 2013
Waktu : 09.30 WIB.
Tempat : Gedung DPRD Kabupaten Rembang

I. **JENIS RAPAT** : Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Rembang

II. **SIFAT RAPAT** : Terbuka

III. **ACARA RAPAT** :

1. Pembukaan.
2. Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi terhadap Raperda APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2014.
3. Skors.
4. Jawaban Bupati atas Pemandangan Umum Fraksi terhadap Raperda APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2014.
5. Penutup.

IV. **PIMPINAN RAPAT**

1. Nama : **Ir. H. SUNARTO**
2. Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Rembang

V. **SEKRETARIS RAPAT**

1. Nama : Drs. **ACHMAD MUALIF**
2. Jabatan : Sekretaris DPRD Kabupaten Rembang

VI. **JUMLAH ANGGOTA**

1. Fraksi Demokrat	: 8 orang
2. Fraksi Golongan Karya	: 8 orang
3. Fraksi Persatuan Pembangunan	: 7 orang
4. Fraski Kebangkitan Bangsa	: 7 orang
5. Fraksi PDI Perjuangan	: 5 orang
6. Fraksi Amanat Nasional	: 5 orang
7. Fraksi Bintang Keadilan	: 5 orang
Jumlah	: 45 orang

VII. **ANGGOTA YANG HADIR**

1. Fraksi Demokrat	: 8 orang
2. Fraksi Golongan Karya	: 8 orang
3. Fraksi Persatuan Pembangunan	: 5 orang
4. Fraski Kebangkitan Bangsa	: 4 orang
5. Fraksi PDI Perjuangan	: 5 orang
6. Fraksi Amanat Nasional	: 5 orang
7. Fraksi Bintang Keadilan	: 4 orang
Jumlah	: 39 orang

VIII. **ANGGOTA YANG TIDAK HADIR**

1. Fraksi Demokrat	: - orang
2. Fraksi Golongan Karya	: - orang
3. Fraksi Persatuan Pembangunan	: 2 orang
4. Fraski Kebangkitan Bangsa	: 3 orang
5. Fraksi PDI Perjuangan	: - orang
6. Fraksi Amanat Nasional	: - orang
7. Fraksi Bintang Keadilan	: 1 orang
Jumlah	: 6 orang

IX. **JALANNYA RAPAT**
PIMPINAN RAPAT : Ir. H. SUNARTO

LAGU INDONESIA RAYA.

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Yang terhormat	Bupati dan Wakil Bupati Rembang
Yang saya hormati	Anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Rembang.
Yang saya hormati	Ketua Pengadilan Negeri Rembang.
Yang saya hormati	Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Rembang
Yang saya hormati	Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Rembang.
Yang saya hormati	Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang
Yang saya hormati	Sekretaris DPRD, Staf Ahli Bupati, Asisten Sekda, Kepala Badan, Dinas, Kantor, Bagian, Instansi dan Camat se Kabupaten Rembang
Yang saya hormati	Pimpinan Partai Politik, LSM, para wartawan dan semua undangan lainnya.

Sebelum kita melangkah pada pokok acara rapat hari ini, marilah kita terlebih dahulu senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, atas segala rahmat dan anugerah-Nya yang dilimpahkan kepada kita sekalian, sehingga Alhamdulillah sampai detik ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan dan kesempatan untuk dapat menghadiri Rapat Paripurna Kedua (II) DPRD Kabupaten Rembang membahas Raperda APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2014 dengan agenda pokok Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi terhadap Raperda APBD Tahun Anggaran 2014 dan Jawaban Bupati atas Pemandangan Umum Fraksi .

Rapat Dewan yang terhormat.

Sesuai hasil Rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Rembang tanggal 29 November 2014, Rapat Paripurna hari ini adalah merupakan

Rapat Paripurna Kedua (II) dalam membahas Raperda APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2014.

Sebagaimana Rapat Paripurna pertama (I) kemarin, sesuai dengan Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Pasal 80 ayat (1) huruf b bahwa Rapat Paripurna DPRD untuk membahas Rancangan Peraturan Daerah dinyatakan sah apabila dihadiri secara fisik oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota DPRD. Untuk itu sesuai dengan catatan yang saya terima dari Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang bahwa dari jumlah anggota DPRD sebanyak 45 orang, yang hadir secara fisik dan menandatangani daftar hadir sebanyak 39 orang, dengan demikian maka Rapat Paripurna hari ini saya nyatakan telah memenuhi kuorum.

Selanjutnya dengan mengucap **"Bismillahirrohmanirrohim"** tepat pukul 11.15 WIB Rapat Paripurna DPRD saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

(***Ketuk Palu 3 Kali***)

Peserta Rapat dan hadirin yang saya hormati.

Agenda pokok dalam paripurna pertama tanggal 2 Desember 2013 kemarin adalah Penjelasan Bupati tentang Raperda APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2014, untuk selanjutnya yang menjadi agenda pokok Rapat Paripurna Kedua (II) hari ini adalah Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Atas Raperda APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2014 dan dilanjutkan dengan Jawaban Bupati atas Pemandangan Umum Fraksi terhadap Raperda Perubahan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2014.

Dan untuk lebih lengkapnya akan saya sampaikan susunan acara pada rapat paripurna hari ini adalah sebagai berikut:

1. Pembukaan.
2. Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi terhadap Raperda APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2014.
3. Skors.
4. Jawaban Bupati atas Pemandangan Umum Fraksi terhadap Raperda APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2014.
5. Penutup.

Selanjutnya marilah kita masuki acara yang kedua, yaitu Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi terhadap Raperda APBD Tahun Anggaran 2014.

Kepada Saudara-saudara anggota Fraksi DPRD yang akan menyampaikan Pemandangan Umum Fraksinya, saya persilahkan untuk menunjukkan jari terlebih dahulu :

1. Fraksi Demokrat : MUGIYARTO, ST
2. Fraksi Partai Golkar : SRI REJEKI, SH.
3. Fraksi PPP : H. HAKAM
4. Fraksi PKB : PUJI SANTOSO, S.P, MH
5. Fraksi PDI Perjuangan : RIDWAN, SH, MH
6. Fraksi Amanat Nasional : SAHNINGSIH, SE
7. Fraksi Bintang Keadilan : MUNTHOHID, SH

Selanjutnya dimulai dari Juru Bicara Fraksi Partai Demokrat sampai dengan Fraksi Bintang Keadilan, secara berurutan saya persilahkan untuk menyampaikan Pemandangan Umum Fraksinya :

PEMANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI

(Teks terlampir)

Terima kasih saya sampaikan kepada Saudara-saudara yang telah mewakili Fraksinya dalam menyampaikan Pemandangan Umum terhadap Raperda APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2014.

Rapat Dewan dan Hadirin yang berbahagia.

Sebelum acara dilanjutkan dengan acara yang ketiga yaitu jawaban atas Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi terhadap Raperda APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2014, terlebih dahulu kita berikan waktu kepada Saudara Bupati untuk mempersiapkannya. Untuk itu Rapat Paripurna saya skors selama 60 menit.

(***Ketuk Palu 1 Kali***)

Peserta Rapat dan hadirin yang berbahagia.

Sehubungan waktu yang telah diberikan kepada Saudara Bupati dalam menyusun Jawaban Bupati atas Pemandangan Umum Fraksi terhadap Raperda APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2014 telah selesai maka skors saya cabut dan tepat pukul 13.45 WIB Rapat Paripurna saya buka kembali.

(***Ketuk Palu 3 Kali***)

Rapat Dewan dan Hadirin yang berbahagia.

Kita masuki acara yang keempat, yaitu penyampaian jawaban Bupati atas Pemandangan Umum Fraksi terhadap Raperda APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2014. Kepada Saudara Bupati saya persilahkan.

===JAWABAN BUPATI ATAS PEMANDANGAN UMUM FRAKSI TERHADAP RAPERDA APBD KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2014 ===

(diwakili Sdr. Wakil Bupati H. Abdul Hafidz Teks Terlampir)

Terima kasih kepada Saudara Bupati yang telah menyampaikan jawaban atas Pemandangan Umum Fraksi terhadap Raperda APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2014.

Peserta Rapat dan hadirin yang saya hormati.

Acara rapat paripurna hari ini telah kita lalui dengan seksama dan selesai sesuai dengan acara yang diagendakan. Selanjutnya setelah selesai rapat Paripurna ini akan dilanjutkan dengan Rapat Badan Anggaran bersama TAPD dalam rangka Penjelasan lanjutan atas Raperda APBD Kabupaten Rembang T.A. 2014 dan berlanjut dengan Rapat Badan Anggaran bersama Pimpinan Komisi untuk membahas Strategi dan Distribusi Pembahasan Raperda APBD Kabupaten Rembang T.A. 2014, akhirnya terima kasih saya sampaikan atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan selama saya memimpin rapat paripurna pada hari ini dan dengan mengucap **"Alhamdulillahirobbil 'alamin"** tepat pukul 14.20 WIB Rapat Paripurna DPRD hari ini saya nyatakan ditutup.

(***Ketuk Palu 3 Kali***)

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

KETUA	SEKRETARIS
Ir. H. SUNARTO	**Drs. ACHMAD MUALIF**
	Pembina Utama Muda
	NIP. 19620804 198803 1 011

LAMPIRAN : RISALAH RAPAT PARIPURNA (II) DPRD KABUPATEN REMBANG DALAM RANGKA PEMBAHASAN APBD KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2014

LAMPIRAN I	:	Daftar Hadir Pimpinan dan Anggota DPRD, Forum koordinasi Pimpinan Daerah , SKPD dan Camat Se Kabupaten Rembang;
LAMPIRAN II	:	Teks Pemandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Kab. Rembang terhadap Raperda tentang APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2014;
LAMPIRAN III	:	Teks Jawaban Bupati atas Pemandangan Umum Fraksi terhadap Raperda tentang APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2014;

DAFTAR HADIR
RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN REMBANG (II)
MEMBAHAS RAPERDA APBD KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN2014

HARI/TANGGAL : SELASA, 3 DESEMBER 2013
PUKUL : 09.00 WIB

NO	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN	KET
1	2	3	4	5
	FRAKSI DEMOKRAT			
1	Ir. H. SUNARTO	Ketua	1	
2	H. ISLAHUDDIN	Anggota	2	
3	H. HARNO, SE	Anggota	3	
4	GUNASIH, SE	Anggota	4	
5	IMRO'ATUS SOLICHAH, SE	Anggota	5	
6	Hj. HIKMAH PURNAMAWATI	Anggota	6	
7	EDI KARTONO, S.Pd	Anggota	7	
8	MUGIYARTO, ST	Anggota	8	
	FRAKSI PARTAI GOLKAR			
9	CATUR WINANTO, SH	Wakil Ketua	9	
10	H. ISMARI	Anggota	10	
11	SUCI RAHAYU, SH	Anggota	11	
12	JOKO SOESILO	Anggota	12	
13	GATOT PAERAN, SH MSi	Anggota	13	
14	KHAIRUL MUTAKIM	Anggota	14	
15	CHAIRUL ANWAR, S.Sos	Anggota	15	
16	SRI REJEKI, SH	Anggota	16	
	FRAKSI PERSATUAN PEMBANGUNAN			
17	H. MAJID KAMIL MZ	Wakil Ketua	17	
18	H. SA'DULLAH	Anggota	18	
19	H.M. MURSYID, ST	Anggota	19	
20	H. HAKAM, SH	Anggota	20	
21	SULISTYO WETI ARIANI	Anggota	21	
22	KODRIYAH, S.Pd	Anggota	22	
23	H. YUDIANTO, SH	Anggota	23	
	FRAKSI KEBANGKITAN BANGSA			
24	SUWANTO	Wakil Ketua	24	
25	MUHAMMAD ASNAWI, S.Pdi	Anggota	25	
26	H. SUTARYO SHOLEH	Anggota	26	
27	PUJI SANTOSO, SP, MH	Anggota	27	
28	H.M. NOOR HASAN, SH	Anggota	28	
29	H. SHOLEH, BA	Anggota	29	
30	H.M. SHODIQIN YASIR	Anggota	30	

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	KET
1	2	3	4	5
	FRAKSI PDI PERJUANGAN			
31	JASMANI	Anggota	31	
32	SUPRIHADI	Anggota	32	
33	SUMARSIH	Anggota	33	
34	RIDWAN, SH, MH	Anggota	34	
35	A. MASKUR RUKHANI	Anggota	35	
	FRAKSI AMANAT NASIONAL			
36	JIHAD ASIA PUSTAKAWAN, SE	Anggota	36	
37	H. MOH. NURHASAN, SH	Anggota	37	
38	MOH. IMAM ZARKASI	Anggota	38	
39	SUKARMAIN	Anggota	39	
40	SAHNINGSIH, SE	Anggota	40	
	FRAKSI BINTANG KEADILAN			
41	dr. ROCHMAD ISNAINI	Anggota		
42	ACHMAD ZAMHURI	Anggota	42	
43	MUNTHOHID, SH	Anggota	43	
44	H. JOKO SUPRIHADI, SH	Anggota	44	
45	DHIAN RAHWENI DEWI	Anggota	45	

Keterangan :

1 I : Ijin
2 S : Sakit
3 C : Cuti
4 DL : Dinas Luar

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG
KETUA

Ir. H. SUNARTO

PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
SEKRETARIAT DPRD

DAFTAR HADIR
RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN REMBANG (II)
MEMBAHAS RAPERDA APBD KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2014

HARI/TANGGAL : SELASA, 3 DESEMBER 2013
PUKUL : 09.00 WIB

NO	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	H. MOCH SALIM	Bupati Rembang	1. .....
2.	H. ABDUL HAFIDZ	Wakil Bupati Rembang	2. .....
3.	HAMZAH FATONI, SH MKn	Sekretaris Daerah	3. .....
4.	.....	Kejaksaan Negeri Rembang	4. .....
5.	.....	Pengadilan Negeri Rembang	5. .....
6.	NUR SUTIYASNO	Dandim 0720 Rembang	6. .....
7.	KAHARUDIN, SH	Kepolisian Resort Rembang	7. .....
8.	.....	Pengadilan Agama Kab. Rembang	8. .....

SEKRETARIS DPRD KAB. REMBANG

Drs. ACHMAD MUALIF
NIP. 19620804 198803 1 011

DAFTAR HADIR

RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN REMBANG (II)

MEMBAHAS RAPERDA APBD KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2014

HARI/TANGGAL : SELASA, 3 DESEMBER 2013

PUKUL : 09.00 WIB

NO	JABATAN	N A M A	TANDA TANGAN
1	CAMAT REMBANG	H. Agus Salim	1
2	CAMAT KALIORI	MUSTHOLIT	2
3	CAMAT SUMBER		3
4	CAMAT SULANG		4
5	CAMAT BULU	SUSWANTORO	5
6	CAMAT PAMOTAN	M. Agus	6
7	CAMAT GUNEM		7
8	CAMAT SALE		8
9	CAMAT LASEM	Kukuh P	9
10	CAMAT PANCUR	Nasikin Eff/Kd	10
11	CAMAT SEDAN		11
12	CAMAT SLUKE	Subagyo	12
13	CAMAT KRAGAN		13
14	CAMAT SARANG	Eddy Kurwanto	14

SEKRETARIS DPRD KAB. REMBANG

Drs. ACHMAD MUALIF

NIP. 19620804 198803 1 011

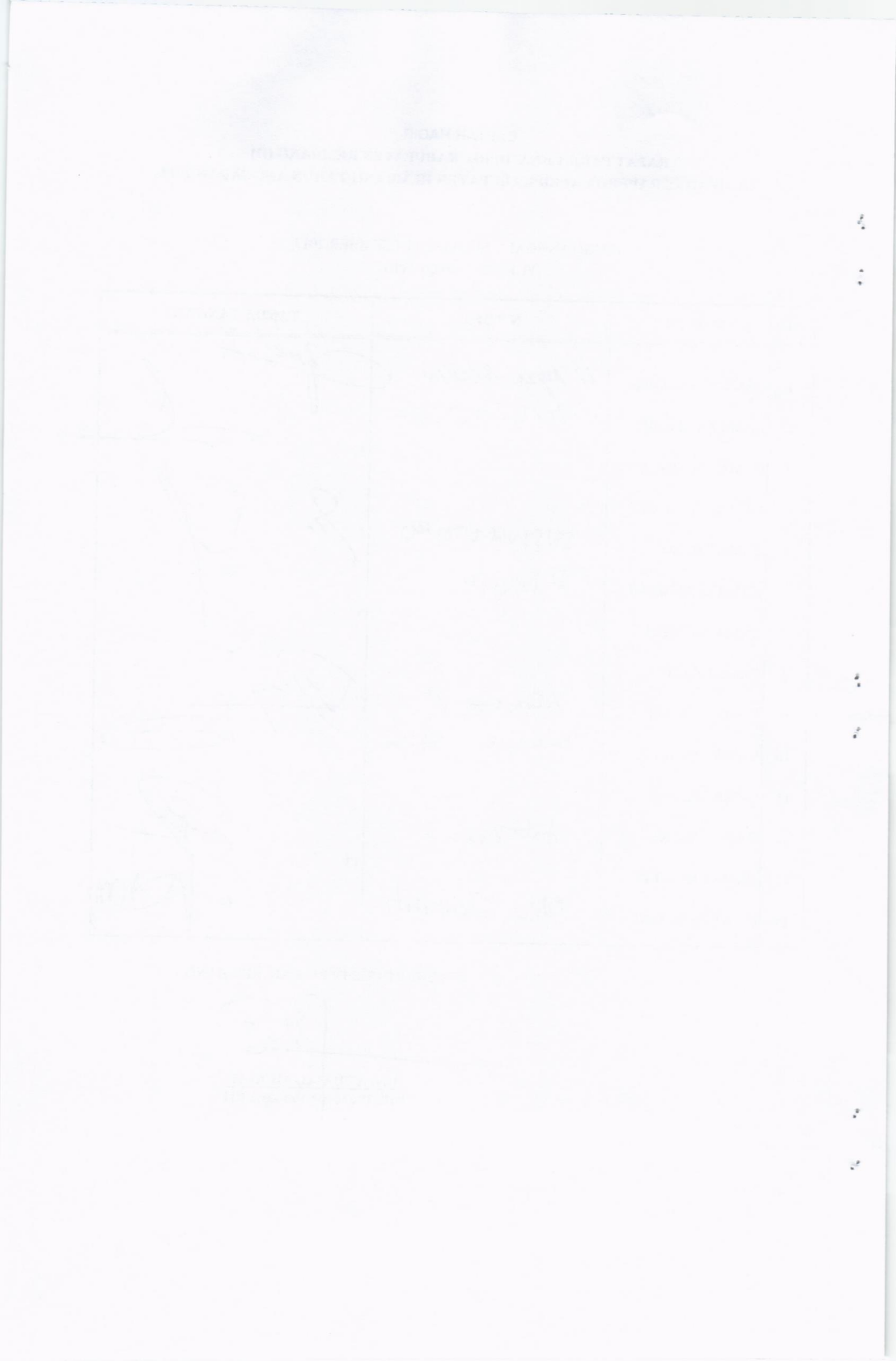

DAFTAR HADIR
RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN REMBANG (II)
MEMBAHAS RAPERDA APBD KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2014

HARI/TANGGAL : SELASA, 3 DESEMBER 2013
PUKUL : 09.00 WIB

NO	BADAN/BAG/DINAS/KANTOR	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
1	STAF AHLI BUPATI			1
2	STAF AHLI BUPATI			2
3	STAF AHLI BUPATI			3
4	STAF AHLI BUPATI			4
5	ASISTEN I SEKDA			5
6	ASISTEN II SEKDA			6
7	ASISTEN III SEKDA			7
8	BAG. TATA PEMERINTAHAN	[illegible]	Kabag	8
9	BAG. HUKUM			9
10	BAG. HUMAS	[illegible]	Humas.	10
11	BAG. ADM. PEMBANGUNAN	[illegible]	[illegible]	11
12	BAG. ADM. PEREKONOMIAN	[illegible]	—	12
13	BAG. KESEJAHTERAAN RAKYAT	[illegible]		13
14	BAG. ADM. KEUANGAN	[illegible]	[illegible]	14
15	BAG. ORGNS. & KEPEGAWAIAN	[illegible]	[illegible]	15
16	BAG. UMUM	[illegible]		16
17	DPPKAD			17
18	INSPEKTORAT	[illegible]	INSPEKTUR	18
19	BAPPEDA	[illegible]	Sekretaris	19
20	BPMPKB	[illegible]	Kabid	20
21	B K D	[illegible]		21
22	BKP & P4K	[illegible]	[illegible]	22
23	B P B D	[illegible]	[illegible]	23
24	DINAS PEKERJAAN UMUM	[illegible]		24
25	DINAS KESEHATAN	[illegible]	Kabid	25
26	DINAS PENDIDIKAN			26
27	DINPERINDAGKOP & UMKM	[illegible]	[illegible]	27
28	DINTANHUT	[illegible]	[illegible]	28
29	DINLUTKAN	[illegible]	[illegible]	29
30	DINHUBKOMINFO	[illegible]	[illegible]	30
31	DINAS DUKCAPIL	[illegible]	[illegible]	31
32	DINSOSNAKERTRANS			32
33	DINBUDPARPORA	[illegible]	[illegible]	33

NO	BADAN/BAG/DINAS/KANTOR	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
34	DINAS ENERGI & SDM	AGUS SUPRIYANTO	KA	34
35	BADAN LINGKUNGAN HIDUP	Purwadi S	ka BLH	35
36	KANTOR KESBANGPOLINMAS	KARTONO	KA.	36
37	KANTOR PERPUST & ARSIP			37
38	KANTOR PPT	Sri Sugiyanti		38
39	RSUD dr. R. SUTRASNO	Agus Sedjokerdo		39
40	SATPOL PP			40
41	TIM PKK KAB. REMBANG	Ny. Slamet Subandi	Bend.	41
42	P D A M	EUSWAKHID H	DIR	42
43	PERCETAKAN DAERAH			43
44	PD. BANK PASAR			44
45	BPD JATENG CAB. REMBANG			45
46	BRI CAB. REMBANG			46
47	BKK LASEM			47
48	R B S J			48
49	B P N KAB. REMBANG			49
50	KANTOR KEMENTRIAN AGAMA	MUSTHOFA		50
51	DIPENDA PROPINSI			51
52	BPS KAB. REMBANG			52
53	RUMAH TAHANAN			53
54	PERHUTANI KPH MANTINGAN			54
55	PERHUTANI KPH KEBONHARJO			55
56	KANTOR PERHUTANI SPH IV			56
57	KPU KAB. REMBANG			57
58	SEKRETARIS KPU KAB. REMBANG	[illegible]	Sekretaris	58
59	KANTOR POS DAN GIRO			59
60	TELKOM REMBANG			60
61	PLN CAB. REMBANG			61
62	PANWASLU KAB. REMBANG			62
63				63
64				64
65				65
66				66
67				67
68				68
69				69
70				70

NO	BADAN/BAG/DINAS/KANTOR	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
71	Radio Citra Bahari FM	MASUDI	Reporter	71
72	Giri Saputro	RSV	Kabid.	72
73	Karsmi	Percetakan Rbg		73
74	GUS NO	A Wardant	SA FPO	74
75		LSM Semut Abang Jawa		75
76	A. MUNLICH M	MR		76
77	SANYOTO	JATENG POS		77
78				78
79				79
80				80
81				81
82				82
83				83
84				84
85				85
86				86
87	-			87
88	-			88
89	/			89
90				90
91				91
92				92
93				93
94				94
95				95
96				96
97				97
98				98
99				99
100				100
101				101
102				102

SEKRETARIS DPRD KAB. REMBANG

Drs. ACHMAD MUALIF
NIP. 19620304 198803 1 011

PEMANDANGAN UMUM FRAKSI DEMOKRAT

TERHADAP

RAPERDA APBD KABUPATEN REMBANG

TAHUN ANGGARAN 2014

DIBACAKAN : MUGIYARTO, ST.

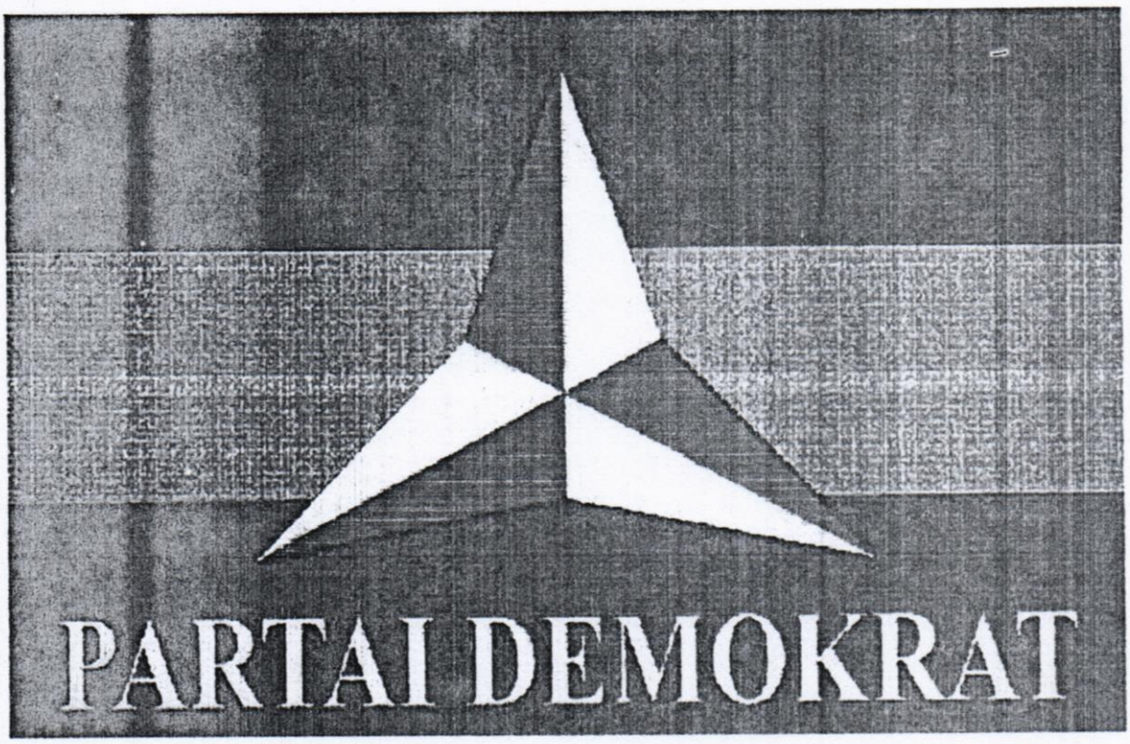

FRAKSI DEMOKRAT
DPRD KABUPATEN REMBANG
TAHUN 2013

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH II
KABUPATEN REMBANG
FRAKSI DEMOKRAT
Jl. Diponegoro No. 88 Rembang;
telp. (0295) 691194; 693290; 693291

PEMANDANGAN UMUM FRAKSI TERHADAP RAPERDA APBD KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2014

SELASA, 3 DESEMBER 2013
DIBACAKAN : MUGIYARTO, ST.

Assalamu'alaikum wr.wb
Salam Sejahtera Bagi Kita Semua

Yang kami hormati :

1. Saudara Bupati dan wakil bupati Rembang
2. Saudara pimpinan dan segenap anggota DPRD Kabupaten Rembang.
3. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Rembang.
4. Saudara Sekretaris Daerah, Staf Ahli, Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Badan, Kepala Dinas, Kepala Kantor, Kepala Bagian Setda dan Camat dilingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang.
5. Saudara Sekretaris DPRD Kabupaten Rembang bersama staf.
6. Saudara Pimpinan Organisasi kemasyarakatan, LSM, rekan wartawan dan seenap hadirin yang berbahagia.

Mengawali penyampaian pemandangan umum kami terhadap Raperda APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2014 ini, marilah kita selalu memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, berkat limpahan Rahmat, Hidayah serta Inayah –Nya, kita masih diberi Kesehatan, kenikmatan Lahir dan Batin sehingga kita dapat mengikuti Paripurna pada pagi hari ini.

Dalam kesempatan yang baik ini pula kami tidak lupa mengucapkan Selamat Ulang Tahun Korp Pegawai Sipil Yang jatuh pada tanggal 29 Nopember 2013 semoga menjadi Abdi Negara Yang lebih baik dalam meningkatkan Kinerja dimasa yang akan datang.

Amin amin Ya Robbal Alamin.

Bupati, Wakil Bupati Peserta Rapat Paripurna yang terhormat.

Dalam kesempatan yang berbahagia ini kami menyampaikan bahwa tahun 2014 ini adalah tahun politik yang banyak agenda agenda politik oleh sebab itu pemerintah kabupaten rembang harus selalu cermat dan berhati hati dalam mengambil kebijakan kebijakan yang menyangkut kepentingan masyarakat.

Untuk menyikapai penyampaian RAPBD tahun 2014 ini kami mengapresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Rembang yang telah bekerja keras bekerja, membangun dan mengejar ketertinggalan, sehingga menjadikan Rembang sejajar bahkan bisa lebih maju dari daerah lain.

Dilihat dari penyampaian RAPBD tahun 2014 kami melihat ada kenaikan PAD sebesar 1.06%, di tahun 2013 sebesar Rp. 127.132.548.700 di tahun 2014 menjadi Rp. 134.850.273.200

Kami berharap dengan kenaiakan ini tidak memberatkan masyarakat kabupaten rembang tetapi berkat kerja keras pemerintah kabupaten rembang dalam mengoptimalkan sumber sumber pendapatan dan kami berharap agar kenaikan PAD ini bisa dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat dengan wujud perbaikan sarana infrastruktur, peningkatan pelayanan kesejahteraan serta peningkatan mutu pendidikan dasar dan menengah.

Bupati wakil bupati dan sidang dewan yang kami hormati,

Dalam kesempatan ini pula kami menyayangkan mengapa penyampaian RAPBD tahun 2014 ini terlambat dibandingkan dengan tahun 2013 lalu yang ditetapkan pada ahkir bulan november. Padahal pada kenyataanya anggaran 2013 ditetapkan awal saja masih banyak kegiatan yang akan diselesaikan pada ahkir tahun ini. Kami berharap pada tahun berikutnya bisa ditetapkan lebih awal lagi.

Dalam kesempatan ini pula ada beberapa hal yang perlukami sampaikan dan sarankan sebagai masukan demi perbaikan dimasa yang akan datang:

1. Mengenai pelayanan kesehatan masyarakat, untuk mengantusupasi datangnya penyakit saat turun musim hujan agar dinas terkait mengantisipasinya
2. Masih adanya perasaan perbedaan pelayanan di rumah sakit di RSUD Dr .R Soetrasno antara pasien jamkesmas/ jamkesda dengan pasien yang tanpa jamkesmas/jamkesda.
3. Agar ada upaya untuk mengoptimalkan potensi pandapatan dengan menerapkan aturan aturan yang mempersempit adanya kebocoran pendapatan.
4. Mohon satpol PP untuk menertipkan para PKL diatas trotoar jalan daerah lasem, karena pada saat jam sekolah masih berjualan sehingga para pelajar menggunakan jalan raya yang sangat mengganggu pengguna jalan yang lain
5. Mohon untuk kegiatan yang sifatnya penting dan memerlukan anggaran besar agar di anggarkan secara total jangan sepotong poptong misalnya pembangunan/peningkatan jalan dalam satu ruas
6. Mohon penambahan peralatan strom wales di DPU

Demikianlah Pemandangan umum Fraksi Demokrat kami sampaikan, akhirnya kepada Saudara Bupati, Wakil Bupati Saudara Ketua dan Wakil Ketua dan segenap tamu undangan kami ucapkan terima kasih telah mengikuti dengan seksama penyampaian ini .

Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kekuatan, petunjuk, bimbingan dan perlindungan kepada kita semua dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab membangun masyarakat , bangsa dan negara.
Terima kasih, sebelumnya kami mohon maaf .

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Rembang, 3 Desember 2013

FRAKSI DEMOKRAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

KETUA	SEKRETARIS
H. ISLAHUDDIN	**H. MOCH GUNASIH, SE.**

PEMANDANGAN UMUM

FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA

DPRD KABUPATEN REMBANG

Terhadap

Rancangan Peraturan Daerah

tentang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten Rembang Tahun 2014

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA

Sekretariat: DPRD Rembang, Jl. Diponegoro No.88, Rembang 59212

PEMANDANGAN UMUM

FRAKSI PARTAI GOLKAR DPRD KABUPATEN REMBANG

terhadap

Rancangan Peraturan Daerah

tentang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten Rembang - Tahun Anggaran 2014

Disampaikan dalam Rapat Paripurna

DPRD Kabupaten Rembang

Selasa, 3 Desember 2013

Juru Bicara : SUCI RAHAYU, SH

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

- Yang kami hormati Sdr. Wakil Bupati Rembang
- Yang kami hormati Sdr. Pimpinan dan Segenap anggota DPRD Kabupaten Rembang
- Yang kami hormati Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Rembang
- Yang kami hormati Sdr. Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang
- Yang kami hormati Staf Ahli, Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Badan, Kepala Dinas, Kepala Kantor, Kepala Bagian Setda dan Camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang.
- Yang kami hormati Sdr. Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan, LSM, rekan wartawan dan segenap hadirin yang berbahagia.

Mengawali penyampaian Pemandangan Umum kali ini, perkenankanlah kami, Fraksi Partai GOLKAR mengajak kita semua untuk mengucapkan puji syukur ke hadirat Allah SWT seraya memanjatkan doa agar senantiasa diberikan kesehatan, keselamatan, rahmah dan berkah kepada kita semua.

Dalam kesempatan yang indah ini, Fraksi Parai GOLKAR DPRD Kabupaten Rembang ingin menyampaikan 3 ucapan selamat sekaligus kepada para pemangku pelayanan masyarakat yakni:

- Selamat kepada para Kepala Desa yang terpilih dalam PILKADES beberapa waktu yang lalu, semoga bisa membawa amanah rakyat dan membangun desa menuju kesejahteraan masyarakat.
- Selamat Ulang Tahun yang ke-42 kepada Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) pada tanggal 29 Nopember yang lalu, teriring harapan semoga semangat daya juang dan pengabdian yang selama ini dicurahkan untuk kepentingan masyarakat hendaknya terus dijaga dan ditingkatkan serta bisa menjadi teladan bagi masyarakat.
- Selamat ulang tahun kepada jajaran Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) pada tanggal 25 Nopember yang lalu. Kami memberikan apresiasi atas perjuangan Bapak dan Ibu Guru dalam mencerdaskan bangsa dengan mendidik dan membina generasi penerus bangsa di bangku pendidikan baik formal maupun non formal. Guru adalah sosok mulia yang patut "digugu dan ditiru".

Saudara Bupati dan para hadirin sekalian.

Setelah mencermati Pengantar Nota Keuangan RAPERDA Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2014 yang disampaikan oleh Saudara Wakil Bupati kepada DPRD Kabupaten Rembang pada tanggal 2 Desember 2013 kemarin, perkenankanlah kini kami menyampaikan Pemandangan Umum, sbb.

1. Menurut kami, SILPA RAPBD Th 2014 terlalu tinggi. Mohon penjelasan kenapa hal ini tetap terjadi setiap tahun bahkan semakin meningkat.

2. Berkaitan dengan upaya peningkatan PAD, kami mohon agar Ijin Gangguan (Ijin HO) dioptimalkan terutama pada perusahaan berskala besar seperti PLTU Sluke, Pelabuhan Sluke dsb.

3. Bidang Pekerjaan Umum:
   - Pembangunan jalan tambang antara Sedan - Kragan dan Sedan - Pandangan harap betul-betul dikerjakan dengan baik, karena jalan tambang adalah infrastruktur untuk mendapatkan PAD.
   - Jalan antar kecamatan, contohnya jalan antara pertigaan Jeruk/Kec Kaliori - Ngebrak/Kec Sumber perlu ditingkatkan /dilebarkan

4. Bidang Pemerintahan Umum:
   - Untuk menghindari kekosongan jabatan dan menjaga stabilitas pemerintahan desa, kami mengharap agar kepala desa terpilih segera dilantik.
   - Mohon penjelasan atas rencana anggaran sebesar Rp. 1.590.500.000,- untuk Peningkatan Jaminan Kesejahteraan Sosial Kemasyarakat.
   - Tahun 2014 adalah "tahun politik" dimana diselenggarakan Pemilu Anggota DPR/DPRD Prop/DPRD Kab/DPD dan Pemilu Presiden/wakil Presiden. Karena itu kami mengharap seluruh

lapisan masyarakat, pemerintah, penyelenggara pemilihan umum yakni KPU dan Panitia Pengawas Pemilu maupun partai politik bersama-sama menciptakan situasi dan kondisi kegiatan agar pesta demokrasi di Kabupaten Rembang berjalan aman dan lancar.

5. Bidang kelautan dan perikanan:
   - Anggaran Pengelolaan TPI sebesar Rp. 2,8 M agar dipergunakan sebaik-baiknya untuk melayani nelayan. Setiap nelayan yang menjual/melelangkan ikan hasil tangkapannnya di TPI segera mendapat uang secara tunai. Sebagai perbandingan saat ini kapal-kapal nelayan Rembang banyak yang menyandarkan kapal dan menjual ikan hasil tangkapannya di TPI Bulu Jawa Timur, karena kondisi pelabuhannya lebih enak nyaman dan mendapat uang secara tunai.
   - Sejalan dengan hal tadi, pembangunan TPI di wilayah timur juga perlu mendapat perhatian seperti halnya pembangunan TPI Tasikagung Rembang.

6. Bidang Pertanian:
   Mohon penjelasan atas rencana anggaran yang cukup besar yakni Rp. 7.584.500.000,- untuk Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian.

7. Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah:
   Mohon penjelasan rencana anggaran sebesar Rp. 2.829.078.900,- untuk Peningkatan Asistensi Perdagangan Dalam Negeri itu bentuk kegiatannya apa saja.

8. **Bidang Pendidikan**
   Tunjangan Sertifikasi Guru Tahun Anggaran 2012 selama 2 bulan belum dibayarkan. Mohon penjelasan.

:an dibahas dalam Rapat Komisi dengan SKPD terkait.

Pimpinan sidang dan hadirin yang berbahagia,

Menutup pemandangan umum ini kami ingin mengutip ungkapan Jawa: "Nêgårå kang kasuwúr kasinungan kanugrahaníng Pangêran, iku maujud ing tatanan prâjå lan tatanan batin kang murakabi rahayuníng bångsâ, punggawané sengkúd, wadyå balané kuwat lan kawulané suyúd" artinya negara yang tersohor dan dilindungi Tuhan Yang Maha Esa, itu terwujud dalam tata pemerintahan yang tertib, masyarakatnya sejahtera, aparaturnya bekerja keras, tentaranya kuat dan rakyatnya setia.

Akhirnya, bila ada kata yang kurang berkenan pada penyampaian Pemandangan Umum Fraksi Partai GOLKAR kali ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Tuhan YME senantiasa memberikan rahmah dan berkah kepada kita semua dalam menjalankan tugas dan pengabdian membangun Kabupaten Rembang.

Rahayu ingkang samya pinanggih.

Wassalamu alaikum Wr. Wb.

DPRD KABUPATEN REMBANG

FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA

Ketua,	Sekretaris,
H. ISMARI.	JOKO SUSILO.

FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA DPRD KABUPATEN REMBANG

PANDANGAN UMUM

FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBAGUNAN DPRD KABUPATEN REMBANG

TERHADAP

PENGANTAR NOTA KEUANGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2014

PPP

DI SAMPAIKAN DALAM RAPAT PARIPURNA
DPRD KABUPATEN REMBANG
HARI : SELASA
TANGGAL : 3 DESEMBER 2013

Dibacakan oleh : .....

FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBAGUNAN
DPRD KABUPATEN REMBANG
Jl. P.Diponegoro no.88 Rembang Telp. (0295) 693292

PANDANGAN UMUM
FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBAGUNAN
DPRD KABUPATEN REMBANG

TERHADAP

PENGANTAR NOTA KEUANGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2014

DI SAMPAIKAN DALAM RAPAT PARIPURNA
DPRD KABUPATEN REMBANG
HARI : SELASA
TANGGAL : 3 DESEMBER 2013

Dibacakan oleh : .....

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Yang kami hormati saudara Bupati dan Wakil Bupati Rembang

Yang kami hormati :

- Saudara Pimpinan dan anggota DPRD kabupaten Rembang;
- Saudara Muspida kabupaten Rembang;
- Saudara ketua Pengadilan Negeri dan Kejaksaan Negeri Rembang;
- Saudara ketua Pengadilan Agama kabupaten Rembang;
- Saudara Sekda, Asisten Sekda, Kepala Bagian, Kepala Dinas, Kepala Kantor, dan Camat se- kabupaten Rembang;
- Saudara Sekretaris DPRD Kabupaten Rembang;
- Saudara-saudara dari kalangan media serta semua yang hadir pada sidang paripurna hari ini yang berbahagia.

Alhamdulillah, Puji syukur senantiasa kita haturkan ke hadlirat Allah SWT, Tuhan yang telah menjadikan kita termasuk golongan hamba-Nya yang senantiasa mendapat rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, sehingga kita bersama dapat bertemu untuk mengikuti Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Rembang dalam penyampaian Pandangan Umum Fraksi terhadap Pengantar Nota Keuangan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Rembang tahun anggaran 2014. Besar harapan kami bahwa pertemuan kali ini mampu menjadi sarana untuk mewujudkan kepedulian kita atas upaya-upaya pembangunan demi kesejahteraan masyarakat kabupaten Rembang.

Mengawali Pandangan Umum Fraksi ini, ijinkan kami mengapresiasi Pemkab Rembang atas terlaksananya Pemilihan Kepala Desa (PILKADES) yang telah dilaksanakan pada tanggal 12 sampai dengan tanggal 14 Nopember 2013 Dalam keadaan kondosif lancar dan aman, meskipun masih ada beberapa desa yang belum dilaksanakan atapun yang sudah dilaksanakan akan tetapi gagal, namun secara umum FP3 menilai bahwa pelaksanaan pilkades tersebut bejalan dengan lancar. Adapun bagi desa-desa yang belum dilaksanakan dan Desa yang sudah dilaksanakan namun gagal, maka FP3 meminta kepada Pemkab Rembang agar bertindak dengan arif dan bijaksana sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Saudara Bupati, wakil Bupati sidang dewan yang terhormat,

Terkait dengan Pengantar Nota Keuangan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Rembang tahun anggaran 2014 yang telah disampaikan oleh wakil bupati dalam rapat paripurna I (satu) pada hari senin tanggal 2 Desember 2013 kemarin. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pembangunan di suatu daerah merupakan tanggung jawab bersama dari dan oleh masyarakat di suatu daerah tersebut sesuai dengan bidangnya masing-masing. RAPBD kabupaten Rembang TA. 2014 ini merupakan arah kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan terutama di bidang anggaran, maka **transparansi** adalah kata kunci dari usaha penciptaan pemerintahan yang bersih. RKA harus jelas, besarnya anggaran, sasaran, maksud dan tujuan dan sebagainya.

2. Bahwa dalam Rancangan Anggaran Belanja Daerah (RAPBD) TA 2014 Pendapatan Daerah sebesar Rp:1.121.607.885.969 sedangkan belanja Daerah sebesar Rp : 1.200.569.624.150 sehingga mengalami SURPLUS/(DEFISIT) sebesar Rp: (78.961.738.600) Penerimaan Pembiayan Daerah sebesar Rp : 82.371.738.181 yang merupakan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA) dalam hal ini terkait adanya Penerimaan Pembiayaan Daerah sebesar Rp : 82.371.738.181 yang merupakan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA) digunakan untuk menutupi Defisit sebesar Rp : (78.961.738.600) sebagaimana telah dituangkan dalam rincian PAPBD TA 2014, Maka FP3 mohon penjelasannya. Terkait SiLPA T.A 2013 sebagaimana tercantum dalam permendagri Nomor 27 Tahun 2013 Tentang PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAERAH T.A 2014. Elenia huruf a. Penerimaan Pembiayaan yang berbunyi Nomor 1. Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) harus didasarkan pada perhitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2013 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2014 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan. Selanjutnya SiLPA dimaksud harus diuraikan pada Obyek dan rincian obyek sumber SiLPA Tahun Anggaran 2013.

A. Bidang Pendidikan.

1. Bahwa Program Sekolah Gratis yang bermutu yang menjadi salah satu empat pilar pokok pembangunan di kabupaten Rembang, FP3 sangat memberikan apresiasi positif terhadap program tersebut termasuk penyediaan beasiswa bagi siswa SMA/MA/SMK negeri maupun swasta dari keluarga miskin.

   Akan tetapi hal ini belum berjalan dengan optimal karna FP3 masih melihat adanya keresahan dari masyarakat yang terkesan atas terjadinya pungutan biaya bagi siswa yang kurang mampu. Maka FP3 berharap dengan dianggarkanya 20% dari anggaran belanja dibidang pendidikan. Agar benar-benar dilaksankan murni untuk para siswa.

B. Bidang Kesehatan.

1. Sebagai salah satu dari empat pilar program pemerintah kabupaten Rembang, Program Jaminan Kesehatan Rembang Sehat (JKRS), FP3 berharap didalam mekanisme administrasi dan pelayanannya agar dipermudah. Kami berharap tidak ada kata "di ngel-ngel" dalam proses pelayanan JKRS. Selain itu didalam pelayanan penyediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan yang di anggarkan dalam RAPBD TA 2014 sebesar Rp. 3.851.320.000 FP3 berharap benar-benar dapat memenuhi kebutuhan penyediaan Obat-obatan. sehingga dapat melayani para pasean dengan Optimal.

C. Bidang Pekerjaan Umum.

1. FP3 berharap Pemkab Rembang lebih mengedepankan Pembangunan Infrastruktur jalan, karna dengan pembangunan jalan terutama jalan-jalan Desa akan mempermudah akses perekonomian Rakyat, dan tentunya harus tetap menjaga Kwalitas pembangunannya.

D. Bidang Parawisata.

1. Di Kabupaten Rembang ini banyak tempat wisata yang potensial dijadikan tempat-tempat wisata, Maka FP3 berharap Pemkab Rembang Agar lebih Optimal didalam mengelola keparawisataan dengan melakukan promosi parawisata terutama produk-produk local seperti Batik Lasem dengan diemplamentasiakan semua SKPD dalam 1 (satu) minggu memakai batik 2 kali atau minimal 1 kali dalam satu minngu, agar dapat mengundang para wisatawan baik dari dalam maupun luar Daerah bahkan dari Manca Negara.

Saudara Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD serta hadirin yang berbahagia....

Sebelum kami mengahiri Pemandangan Umum ini, Kami FP3 izinkan untuk menyampaikan bahwa Kabupatern Rembang ini jangan hanya terkesan sebagai penghasil tambang saja Akan tetapi dapat mengirim barang setengah jadi sehingga dapat menyerap tenaga kerja dan dapat mengurangi angka pengangguran.

Saudara Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD serta hadirin yang berbahagia....

Demikian Pandangan Umum Fraksi Partai Persatuan Pembangunan yang kami sampaikan, segala kesalahan dan kekhilafan kami mohon maaf, teriring doa semoga rahmat, taufiq dan hidayah-Nya senantiasa mengiringi langkah kita dalam melaksanakan aktifitas sehari-hari. Amien, Amien, Amien yaa Robbal 'alamien...!

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.

Rembang, 3 Desember 2013

Fraksi PPP,

Ketua,	Sekretaris,
SA'DULLAH	**QODRIYQH. Spd**

PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

Membela Yang Benar

Pemandangan Umum

FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

TERHADAP

RAPERDA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2014

disampaikan oleh puji santoso

Pada Sidang Paripurna DPRD kabupaten Rembang, Selasa, 3 Desember 2013

Assalamu 'alaikum wr wb.

Yang kami Hormati, Bupati dan Wakil Bupati Rembang beserta jajarannya di lingkungan Pemkab Rembang

Yang Kami Hormati, segenap jajaran Forum Pimpinan Daerah Kabupaten

Yang kami Hormati, Pimpinan Sidang, Ketua dan Para Wakil Ketua DPRD Kabupaten Rembang, beserta segenap anggota DPRD kabupaten Rembang.

Yang kami Hormati, Saudara Sekretaris Daerah dan Sekretaris DPRD kabupaten Rembang beserta jajarannya.

Yang kami Hormati, kawan-kawan pers, kawan-kawan partai politik dan hadirin yang berbahagia.

Mengawali pemandangan umum ini kami ingin mengingatkan kepada semua pihak, khususnya pemangku kebijakan dan *stakeholders* di kabupaten Rembang untuk memahami dan mencermati kebiasaan yang terjadi pada RAPBD yang dibahas pada masa akhir jabatan legislatif. Agar APBD 2014 yang akan dibahas dapat tetap memenuhi ketentuan regulasinya.

Penyusunan RAPBD untuk ditetapkan menjadi APBD telah diatur sebagaimana dalam Permendagri Nomor 27 tahun 2013 tentang Penyusunan APBD tahun anggaran 2014, terutama untuk sinkronisasi kebijakan Pemkab dengan Kebijakan Pemerintah. Hal ini untuk mengeliminasi kesenjangan program karena tidak adanya GBHN.

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2014 menetapkan bahwa tema Pembangunan Nasional adalah "Memantapkan Perekonomian Nasional untuk Peningkatan Kesejahteraan Rakyat yang Berkeadilan", dengan sasaran utama yang harus dicapai pada akhir tahun 2014 antara lain yaitu:

1. Pencapaian target pertumbuhan ekonomi sebesar 6,8 sampai dengan 7,2 persen;

2. Penurunan angka pengangguran menjadi 5,0 sampai dengan 6,0 persen;

3. Penurunan angka kemiskinan menjadi 8,0 sampai dengan 10,0 persen; dan

4. Laju Inflasi 4,5 persen dan bertambah atau berkurang 1,0 persen.

Memperhatikan sasaran utama tersebut, ditetapkan 11 (sebelas) Prioritas Nasional dan 3 (tiga) Prioritas Lainnya yang harus disinergikan dengan prioritas pembangunan daerah, yaitu:

1. Reformasi birokrasi dan tata kelola;
2. Pendidikan;
3. Kesehatan;
4. Penanggulangan kemiskinan;
5. Ketahanan pangan;
6. Infrastruktur;
7. Iklim investasi dan iklim usaha;
8. Energi;
9. Lingkungan hidup dan pengelolaan bencana;
10. Daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan pasca konflik;
11. Kebudayaan, ekonomi kreatif, dan inovasi teknologi; dan
12. 3 (tiga) prioritas lainnya yaitu (1) bidang politik, hukum, dan keamanan; (2) bidang perekonomian; dan (3) bidang kesejahteraan rakyat.

Pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota harus mendukung tercapainya sasaran utama dan prioritas pembangunan nasional tersebut sesuai dengan potensi dan kondisi masing-masing daerah, mengingat keberhasilan pencapaian sasaran utama dan prioritas pembangunan nasional dimaksud sangat tergantung pada sinkronisasi kebijakan antara pemerintah provinsi dengan pemerintah dan antara pemerintah kabupaten/kota dengan pemerintah dan pemerintah provinsi yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Untuk itu, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam menyusun RKPD Tahun 2014 mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi RKPD Tahun 2014.

Sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dan pemerintah antara lain diwujudkan dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati bersama antara pemerintah daerah dan DPRD sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2014. KUA dan PPAS pemerintah provinsi Tahun 2014 berpedoman pada RKPD provinsi Tahun 2014 yang telah disinkronisasikan dengan RKP Tahun 2014, sedangkan KUA dan PPAS pemerintah kabupaten/kota berpedoman pada RKPD kabupaten/kota Tahun 2014 yang telah disinkronisasikan dengan RKP Tahun 2014 dan RKPD provinsi Tahun 2014.

Penyusunan RAPBD tahun 2014 juga memperhatikan prinsip sebagai berikut:

1. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan urusan dan kewenangannya,

2. Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
3. Transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APBD;
4. Partisipatif, dengan melibatkan masyarakat;
5. Memperhatikan asas keadilan dan kepatutan; dan
6. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya.

Dari ketentuan ini kita menjadikannya sebagai dasar penyusunan APBD 2014 yang berpihak kepada **kebutuhan** masyarakat, bukan **keinginan** para elit atau para pejabatnya. Seringkali kita tak mampu membedakan antara makna KEBUTUHAN dan KEINGINAN.

Pimpinan Sidang dan Hadirin yang Kami Mulyakan

Perkenankan kami, Fraksi Kebangkitan Bangsa menyampaikan beberapa hal sebagai aspirasi masyarakat yang telah disampaikan kepada kami, antara lain;

1. Agar Pemkab Rembang segera mengisi jabatan-jabatan pada SKPD yang kosong atau mungkin akan kosong agar tidak mengurangi hidmat birokrasi dalam memberikan layanan kepada masyarakat.
2. Mengingat musim hujan yang telah datang, agar ada langkah langkah antisipatif terhadap kemungkinan munculnya bencana alam dengan memberikan alokasi penganggaran yang cukup untuk kegiatan ini, mengingat kita tidak pernah menganggarkan dana cadangan.
3. Himbauan kepada kepolisian dalam menggelar operasi kepada para pelajar dilakukan secara persuasif bekerjasama dengan sekolah untuk mendata siswa yang belum memiliki SIM kemudian memberikan kebijakan khusus kepada mereka yang telah memenuhi syarat mendapatkan SIM. Atau operasi kejutan di sekolah melalui data motor yang diparkir di sekolah atau sekitarnya. Cara cara seperti ini lebih elegan untuk memberikan pendidikan taat berlalulintas kepada siswa. Dan kepada pihak sekolah mohon agar lebih aktif untuk memberi pembelajaran kepada siswanya yang belum memiliki SIM.
4. Kelanjutan dari program ini adalah penegakan disiplin pelajar yang mbolos sekolah secara kontinyu yang dilakukan oleh Satpol PP, terutama pada lokasi lokasi yang biasa menjadi tempat mangkal para pelajar.

Selain hal hal di atas, kami juga menyayangkan robohnya bangunan di kawasan PPI Tasikagung. Kami tidak ingin menyalahkan siapa siapa, tetapi ini harus menjadi koreksi kita bersama atas perencanaan dan pengawasan program.

Kami juga merasa patut untuk mempertanyakan kebenaran informasi tentang serapan APBD tahun 2013 untuk belanja langsung yang pada tutup buku bulan oktober baru terserap sebesar 41%? Jika hal ini benar tentu pemkab harus bekerja lebih keras agar tidak terjadi pelaksanaan kegiatan yang asal asalan.

Sidang Dewan Yang Kami Hormati

Di bidang perencanaan pembangunan, kami berharap pemkab mampu menyusun perencanaan secara teliti agar tidak muncul lahirnya bangunan-bangunan yang tidak

memenuhi persyaratan, alias gampang rusak. Beberapa bangunan yang cepat rusak banyak terjadi pada bangunan talud yang menyebabkan air tidak mengalir, kualitas bangunan yang asal asalan, kualitas bahan baku yang tidak sesuai standard. Juga bangunan jalan yang mudah rusak ataupun pembangunan saluran yang tak berfungsi.

Termasuk hal ini adalah jalan jalan hotmix mulus yang disosialisasikan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi karena saat ini telah mengalami kerusakan berat. Entah berapa kali terjadi kecelakaan akibat jalan yang berlubang lubang dan rusak ini.

Memprioritaskan pembangunan jalan seperti antar kecamatan yang sudah tidak laik lagi adalah sesuatu yang fardlu ain.

Berikut kami sedikit catatan atas RAPBD tahun 2014 :

1. Pada PAD yang bersumber dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar 3,6 miliar hemat kami masih mungkin untuk ditingkatkan.
2. Kami berasumsi bahwa Silpa tahun 2013 bisa jadi akan lebih besar dari angka 82 miliar mengingat pelaksanaan kegiatan yang menumpuk pada akhir tahun
3. Sebagaimana di atas kami mengajak kepada segenap pemangku kebijakan yang akan menetapkan RAPBD ini agar memprioritaskan anggaran perbaikan jalan antar kecamatan ketimbang belanja pengurugan yang manfaatnya hanya untuk segelintir orang dibanding dengan kepentingan masyarakat banyak.
4. Mendorong tumbuhnya UMKM yang kreatif yang dibuktikan dengan penggaran yang memadai pada SKPD yang konsen di bidang UMKM
5. Memberikan anggaran yang memadai untuk penguatan ketahanan pangan
6. Mengindari tambahan belanja pegawai untuk rekruitmen tenaga honorer.

Pimpinan Sidang dan Hadirin Yang Kami Mulyakan

Sebagai penutup pemandangan umum ini, kami mengimbau kepada Saudara Bupati jajarannya untuk melakukan mutasi ataupun promosi jabatan secara tertib. Jangan ada kesan munculnya nepotisme karena anaknya pejabat atau yang lainnya

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Rembang, 3 Desember 2013
Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa

Muhammad Asrawi, SHI	Puji Santoso, SI
Ketua	Sekretaris

FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

PEMANDANGAN UMUM
FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

TERHADAP
RAPERDA APBD TAHUN ANGGARAN 2014

Dibacakan Oleh : **RIDWAN, SH. MH.**

Assalamu'alaikum warohmatullahi wabarokatuh

Salam sejahtera bagi kita semua
MERDEKA.....!!!

Yang terhormat, Bupati dan Wakil Bupati Rembang
Yang terhormat, Pimpinan Beserta Segenap Anggota DPRD Rembang
Yang terhormat, Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang
Yang terhormat, Muspida Kabupaten Rembang
Yang terhormat, Ketua Pengadil;an Negeri Rembang
Yang terhormat, Ketua Pengadilan Agama Rembang
Yang terhormat, Staf Ahli, Asisten Bupati, Kabag dilingkungan Setda Kab. Rembang
Yang terhormat, Kepala Dinas, Badan, Kantor dan Camat se-Kabupaten Rembang
Para Tamu Undangan yang Berbahagia

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Illahi Robbi yang telah memberikan kesempatan, kemudahan dan kenikmatan hidup. Allah Yang Maha Kuasa yang telah menganugerahkan berbagai berkah sehingga dipagi ini kami mampu menghadirkan Pemandangan Umum Fraksi PDI Perjuangan terkait Raperda APBD Tahun 2014 dengan sebaik-baiknya sebagai wujud pemenuhan atas amanat konstitusional dengan tiada suatu aral melintang apapun.

Setelah dilakukan diskusi-diskusi dan pembahasan terkait Pengantar Saudara Bupati tentang Raperda Tahun 2014, maka perkenankanlah di forum yang terhormat ini kami menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Segala kegiatan di Bidang Infrastruktur yang belum dilaksanakan ditahun Anggaran berjalan ini harus dilaksanakan di Tahun 2014, mengingat dana-dana yang sudah teranggarkan betul-betul dibutuhkan untuk pembangunan dan pemeliharaan Infrastruktur yang memang secara riel banyak mengalami kerusakan yang perlu perhatian secara khusus.

2. Pemerintah Daerah kabupaten Rembang berkewajiban untuk lebih serius melakukan pengawasan yang lebih cermat dan penanganan yang lebih tegas atas penerimaan retribusi di bidang pertambangan untuk peningkatan Pendapatan Asli daerah sebagai akibat dari diexploitasinya kekayaan alam di wilayah Kabupaten Rembang.

3. a. Pelayanan terhadap rakyat di Bidang Kesehatan wajib dilakukan secara sungguh-sungguh. Dengan status Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD dr. Sutrasno hendaknya RSUD sudah sepi dari kata kelangkaan obat, harus penuh dengan keramahan dalam pelayanan dan tertib dalam hal Insentif bagi Karyawan dan bukan malah gaduh terkait Insentif dimaksud.

   b. Pelayanan dan ketersediaan Sarana dan Prasarana untuk kenyamanan pasien di seluruh wilayah Kabupaten Rembang hendaknya dikelola dengan cermat dan penuh tanggung jawab.
   Fraksi PDI Perjuangan akan mengawal tersedianya anggaran untuk pengadaan selimut, Sprei, bantal,MCK yang layak di semua Puskesmas-puskesmas di wilayah Kabupaten Rembang.

4. Pemerintah Daerah hendaknya lebih jeli dalam mengantisipasi segala kemungkinan dalam pelaksanaan Pilkades. Munculnya kasus antara lain : Desa Babak Tulung, Dadap mulyo, Kajar, Sumbersari, Karas, Soditan, Sumur tawang dan Tlogotunggal hendaknya menjadi pelajaran berharga yang berbiaya tinggi sehingga kedepan perlu diantisipasi dalam Peraturan-peraturan yang mengatur tentang itu.

Hadirin Sidang Paripurna yang Kami Mulyakan
Demikian Pemandangan Umum Fraksi PDI Perjuangan ini dibuat, semoga ada guna dan manfaatnya, ada kurang lebihnya mohon maaf.

Billahi Taufiq wal Hidayah
Wassalamu alaikum wr. Wb.
M E R D E K A.!!!

Rembang, 2 Desember 2013

FRAKSI
PDI PERJUANGAN
DPRD KABUPATEN REMBANG

KETUA,	SEKRETARIS,
JASMANI	**SUMARSIH**

PEMANDANGAN UMUM FRAKSI

TERHADAP

RAPERDA APBD TAHUN 2014

3 DESEMBER 2013

FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL

FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL DPRD KABUPATEN REMBANG

PEMANDANGAN UMUM FRAKSI

TERHADAP

RAPERDA APBD TAHUN 2014

Dibacakan Oleh : SAHNINGSIH, SE

Yang Terhormat,

Saudaraku Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Rembang

Saudaraku Bupati dan Wakil Bupati Rembang.

Saudaraku Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Rembang

Saudaraku Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang.

Saudaraku Staf Ahli Bupati, Asisten Sekda, Kepala Badan, Kepala Dinas, Kepala Kantor, Kepala Bagian dan Camat Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang.

Saudaraku Pimpinan Organisasi Profesi, LSM dan hadirin yang berbahagia.

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan Rahmat serta Karunianya, sehingga pada hari ini kita dapat menyampaikan Pemandangan Umum Fraksi Kabupaten Rembang dalam keadaan sehat.

Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada *uswatun hasanah*, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabat yang setia mengikuti sunnahnya. Semoga kita termasuk di dalamnya. *Aamin*.

Saudaraku Pimpinan dan hadirin yang berbahagia,

Membaca pengantar nota keuangan rancangan peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2014 :

1. Memasuki Tahun Anggaran 2014, kita perkuat harapan kita untuk mendapat penilaian "Wajar Tanpa Pengecualian" dan menurut hemat kami, perlu menggandengan pihak ketiga dalam penilaian aset yang dimilki pemerintah kabupaten Rembang
2. Tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Rembang

   Mengacu kepada UU nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, maka terjadi perubahan paradigma pengelolaan sampah, dar kumpul-angkut-buang menjad 3 R (*reduce, reuse, recycle*). Sebagai tindak lanjut dari peraturan diatas, setidaknya terdapat beberapa kewajiban pemerintah daerah, yaitu :

   a. Menyusun peraturan daerah tentang pengelolaan sampah.
   b. Mulai tahun 2013 pemerintah kabupaten/kota harus mengubah sistem *open dumping* pada tempat pemrosesan akhir (TPA) menjadi berwawasan lingkungan.
   c. Melakukan sosialisasi dan pengawasan terhadap pengelola kawasan permukiman, kawasan industri, kawasan komersial, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya, untuk segera memilah, mengumpulkan, dan mengolah sampah di masing-masing kawasan.

   Untuk mengoptimalkan kegiatan tersebut diatas, kami melihat belum tersedianya anggaran yang cukup untuk pengelolaan sampah pada Bidang Pekerjaan Umum. Mohon dapat dijelaskan.

3. Dari hasil pengawasan yang kami lakukan, beberapa jalan utama, antar kecamatan atau poros desa belum mendapatkan penerangan yang cukup. Hal tersebut memicu kerawan kecelakaan dan kejahatan. Untuk itu kami mengharapkan dialokasikan dana yang cukup untuk kegiatan tersebut.

Saudaraku Pimpinan sidang dan hadirin yang kami muliakan,

Memasuki Tahun Anggaran 2014

Demikianlah pemandangan umum dari Fraksi Partai Amanat Nasional untuk dapat dibahas lebih mendalam pada forum Badan Angaran ataupun Komisi.

Billahi taufiq wal hidayah.

Wassalaamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Rembang, 3 Desember 2013

FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL DPRD KAB. REMBANG

Ketua	Sekretaris
JIHAD ASIA PUSTAKAWAN, SE.	MOH. IMAM ZARKASI

PEMANDANGAN UMUM
FRAKSI BINTANG KEADILAN DPRD KABUPATEN REMBANG

TERHADAP

RAPERDA APBD KABUPATEN REMBANG
TAHUN ANGGARAN 2014

REMBANG, 03 DESEMBER 2013

PEMANDANGAN UMUM
FRAKSI BINTANG KEADILAN DPRD KABUPATEN REMBANG

TERHADAP

RAPERDA APBD KABUPATEN REMBANG
TAHUN ANGGARAN 2014

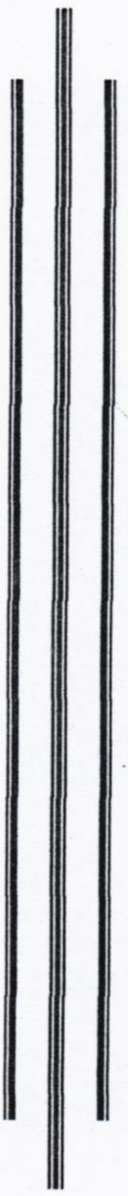

REMBANG, 3 DESEMBER 2013

FRAKSI BINTANG KEADILAN
DPRD KABUPATEN REMBANG
Jl.P.Diponegoro No.88 Rembang (0295) 691194
Kode Pos 59251

PEMANDANGAN UMUM
FRAKSI BINTANG KEADILAN DPRD KABUPATEN REMBANG
TERHADAP
RAPERDA APBD KABUPATEN REMBANG
TAHUN ANGGARAN 2014

Selasa , 3 Desember 2013

Dibacakan oleh : ACHMAD ZAMHURI

بسم الله الرحمن الرحيم

ASSALAMU'ALAIKUM WR.WB

Yang kami hormati, Pimpinan DPRD , Komisi , Fraksi dan Anggota DPRD ;

Yang kami hormati , Sdr. Bupati dan Wakil Bupati Rembang ;

Yang kami hormati , Forum Koordinasi Pimpinan Daerah ;

Yang kami hormati , Sdr. Sekretaris Daerah Dan seluruh jajarannya ;

Yang kami hormati, Sdr. Pimpinan Organisasi Profesi , LSM dan Hadirin yang berbahagia serta semua Masyarakat Rembang yang kami cintai;

Mengawali sambutan ini perkenankanlah kami mengajak hadrin sekalian untuk selalu memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, karena atas limpahan rahmat dan hidayahNYA kita dapat menghadiri Rapat Paripurna DPRD dalam rangka penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap RAPBD Tahun Anggaran 2014.

Dalam kesempatan ini kami mengucapkan selamat kepada jajaran Tata pemerintahan, Satpol PP, Kepolisian dan semua elemen, terutama kepada seluruh masyarakat yang telah melaksanakan PILKADES dengan damai, adapun riak-riak kecil dalam sebuah demokrasi adalah hal yang tidak bisa dihindari.Kepada Para Kepala Desa terpilih kami berharap dapat segera melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya untuk melayani semua warga desa setempat tanpa terkecuali. dan marilah kita jadikan momen ini sebagai sarana membangun budaya Politik yang lebih santun dan bertanggung-jawab untuk menyongsong PEMILU yang tahap demi tahap kita laksanakan bersama. Terhadap permasalahan yang masih ada marilah kita jadikan jalur komunikasi ataupun jalur hukum yang ditempuh untuk menyelesaikannya dan bukan dengan jalan yang anarkis.,

Hadirin Sidang Paripurna Yang Kami Hormati ,

Mencermati Pemaparan Pengantar Nota Keuangan RAPBD Kabupaten Rembang tahun 2013 yang telah disampaikan oleh saudara Bupati , FBK menyampaikan Pandangan Umum Sebagai berikut :

I. FBK mencatat dalam empat tahun pembahasan RAPBD, tahun ini (saat ini) adalah yang paling buruk dari sisi waktu . Dimana terkesan Tim Anggaran Pemerintah Daerah kurang serius dan kurang bersemangat untuk segera menyelesaikan penyusunan RAPBDnya sehingga hal ini berimplikasi langsung terhadap sangat sempitnya

alokasi waktu untuk pembahasan, padahal PERMENDAGRI 59 tahun 2009 mengamanahkan APBD harus sudah selesai disepakati tanggal 31 Desember. Dalam rangka menjaga komitmen bersama untuk menghasilkan perda APBD yang berkualitas, hal semacam ini kita berharap tidak terulang lagi.

II.. Mencermati asumsi PAD 2013 Rp 134,8M , FBK optimis hal itu dapat dicapai, bahkan semestinya lebih besar lagi mengingat elemen terbanyak penyumbang PAD tersebut baru dari sector perpajakan, sementara potensi-potensi yang lain masih terbuka lebar, baik dari pertambangan, kelautan maupun yang lainnya..

III. Di bidang pendidikan,. FBK menyampaikan beberapa catatan;

a. Menanggapi kegelisahan para guru, Menjelang akhir tahun anggaran 2013 FBK mengharapkan agar hak-hak para guru sehubungan dengan Sertifikasi adapat diberikan sebagaimana mestinya.

b. Terkait dengan Program Dikdas 9 tahun yang direncanakan dengan anggaran Rp 57,9M. FBK mengingatkan akan;
adanya, Undang –undang nomor 30 th 2003 pasal 34 ayat 2 dan 3 ,yang berisi : Bahwa pemerintah dan

Pemerintah Daerah Menjamin terselenggaranya Wajib Belajar Minimal Jenjang Pendidikan Dasar (9 Tahun) tanpa memungut Biaya.

Dengan pertimbangan diatas Maka FBK berpandangan :

1. Sekolah Gratis pada Jenjang Dasar 9 tahun (SD, SMP) harus kita pertahankan .
2. Partispasi Publik (Siswa/Wali)Harus selalu kita Dorong dengan senantiasa memusyawarahkannya dengan segenab elemen utamanya wali siswa dengan Komite Sekolah, Sehingga tidak ada yang merasa keberatan.

IV. Bidang Kesehatan,

a. Terhadap rencana pembangunan Puskesmas Sarang 2, sudah sejauh mana persiapan yang dilakukan..

b. Dalam rangka menurunkan AKI (angka kematian ibu) dan angka kematian bayi, FBK mengharapkan ketegasan sikap jajaran dinas kesehatan terhadap masih adanya pelayanan persalinan diluar Puskesmas ataupun RSU yang dilakukan oleh BPS (bidan praktek swasta).

c. Adanya wacana Puskesma BLUD, FBK mengharap dilakukan pengkajian yang lebih mendalam sebelum rencana tersebut dilaksanakan.

Demikiaan pandangan umum terhadap RAPBD Kabupaten Rembang kami sampaikan, semoga bermanfaat. Maturnuwun.

WASSALAMU'ALAIKUM WR. WB.

Rembang , 3 Desember 2013

FRAKSI BINTANG KEADILAN

Ketua	**Sekretaris**
(dr.ROCHMAD ISNAINI)	**(MUNTHOHID , SH)**

JAWABAN BUPATI REMBANG

ATAS PEMANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI DPRD KABUPATEN REMBANG DALAM RANGKA MEMBAHAS PENGANTAR NOTA KEUANGAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN REMBANG

TAHUN ANGGARAN 2014

JAWABAN BUPATI REMBANG
ATAS PEMANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI DPRD
KABUPATEN REMBANG
DALAM RANGKA MEMBAHAS PENGANTAR NOTA KEUANGAN
RANCANGAN APBD KABUPATEN REMBANG
TAHUN ANGGARAN 2014

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Yang terhormat :

- Saudara Ketua, Para Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang,
- Para Pejabat Muspida Kabupaten Rembang,
- Saudara Wakil Bupati Rembang,
- Tamu undangan yang kami hormati, tokoh masyarakat, wartawan dan segenap jajaran eksekutif yang berbahagia.

Mengawali jawaban Saya atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Rembang terhadap Pengantar Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2014, terlebih dahulu marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah, SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayah-Nya, sehingga kita masih diberi nikmat, kesehatan dan kebahagiaan.

Berkenaan dengan pertanyaan, saran, pendapat dan catatan yang disampaikan dalam Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Rembang, dapat saya jelaskan sebagai berikut :

No	PERTANYAAN	JAWABAN
	I.FRAKSI PARTAI DEMOKRAT	
1	Kenaikan PAD 1,06% pada TA 2014 agar tidak memberatkan masyarakat	1 Kenaikan PAD pada TA 2014 didasarkan pada a. Realisasi dan potensi penerimaan pada TA 2013 serta potensi pendapatan yang ada di Kabupsaten Rembang b. peraturan perundang-undangan yang berlaku c. tidak memberatkan masyarakat dan dunia usaha dan diestimasikan secara terukur.
2	*Keterlambatan penyampaian RAPBD* TA 2014, dikawatirkan banyak kegiatan yang tidak dapat diselesaikan pada TA 2014	2 *Akan kami perhatikan, namun* demikian keterlambatan tersebut dikarenakan Pemerintah Kabupaten menunggu Pengalokasian DAU dan DAK dari Kementerian Keuangan yang baru kami terima di minggu I bulan Nopember 2013
3	Upaya instansi terkait dalam mengantisipasi datangnya penyakit pada musim hujan	3 Dalam rangka mengantisipasi penyakit saat musim hujan, maka kami telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut : a. Menginstruksikan kepada seluruh Puskesmas dan jajarannya untuk melaksanakan gerakan PSN dalam rangka memutus rnatai hidup nyamuk DBD b. Mencukupi kebutuhan obat dan perbekalan kesehatan , terkait dengan hal tersebut

No	PERTANYAAN	JAWABAN
		c. *Mengaktifkan jejaring informasi* terkait kewaspadaan penyakit dan antisipasi bencana
4	Perbedaan perlakuan pelayanan di RSUD dr. Soetrasno antara pasien Jamkesmas/Jamkesda dengan pasien tanpa Jamkesmas/Jamkesda	4 Standar pelayanan dan SOP pelayanan yang digunakan untuk memberikan pelayanan di RSUD dr. R. Soetrasno adalah sama atara pasien berjaminan (JKRS, Jamkesmas, Askes dll) dengan pasien umum (bayar sendiri). Dalam *memberikan pelayanan RS tidak* membedakan asal pasien dan cara bayarnya.
5	Upaya Optimalisasi pendapatan agar mempersempit kebocoran pendapatan	5 Akan kami perhatikan
6	Satpol agar menertipkan PKL di trotoar jalan daerah Lasem	6 Terima kasih akan kami tindaklanjuti.
7	Kegiatan yang sifatnya penting dan membutuhkan dana besar agar di anggarkan secara total, misalnya pembangunan/peningkatan jalan dalam satu ruas. Peralatan Strom Wales di PUK agar ditambah.	7 Kami perhatikan usulan dalam penganggaran secara menyeluruh pembangunan dalam satu ruas jalan maupun pengadaan peralatan strom wales.

No	PERTANYAAN	JAWABAN
	II.FRAKSI PARTAI GOLKAR	
1	Mohon penjelasannya mengapa SILPA RAPBD 2014 terlalu tinggi.	1 SILPA RAPBD TA 2014 tinggi disebabkan : • Sisa Tender • Pelampauan Pendapatan • Efisiensi Belanja • Anggaran Kegiatan tahun 2013 yang tidak bisa dilaksanakan dianggarkan kembali dalam APBD TA 2014, antara lain kegiatan yang dibiayai dari *DBHCHT, DAK Pendidikan*, DAK Kesehatan, dan DAK Perikanan.
2	Ijin Gangguan (Ijin HO) agar dioptimalkan terutama pada perusahaan berskala besar (PLTU Sluke dan Pelabuhan Sluke)	2 a. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 7 Tahun 1993 Tentang Izin Mendirikan Bangunan dan Izin Undang-Undang Gangguan bagi Perusahaan Industri. b. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang No. 15 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu c. Peraturan Bupati Rembang Nomor 54 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Izin Gangguan. - Bahwa pembangunan PLTU Sluke dan Pelabuhan di Sluke adalah kegiatan yang *termasuk wajib AMDAL dan pelaksanaan* AMDAL saat itu masih menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. - Berdasarkan Perbup No. 54 Tahun 2011 pada pasal 2 angka (4) huruf a. disebutkan sebagai berikut : "Tidak termasuk obyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah tempat usaha yang terkena kewajiban analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) - Oleh sebab itu, kedua kegiatan tersebut diatas, tidak dipungut Retribusi Izin Gangguan (HO)

No	PERTANYAAN	JAWABAN
3	• *Pembangunan jalan* pertambangan harap dikerjakan dengan baik karena merupakan infrastruktur untuk mendapatkan PAD. • Mohon pelebaran jalan antar kecamatan diantaranya Pertigaan Jeruk/Kec. Kaliori sampai Ngebrak/Kec. Sumber.	3 • *Pembangunan jalan Sedan-Kragan dan* Sedan-Pandangan tidak dianggarkan pada RAPBD TA 2014 dan penanganannya akan dioptimalkan. • Kami perhatikan dalam pelebaran jalan khususnya jalan antara pertigaan Jeruk Kecamatan Kaliori sampai Ngebrak Kecamatan Sumber.
4	• Kepala Desa terpilih agar segera dilantik untuk menghindari kekosongan jabatan dan menjaga stabilitas pemerintahan desa. • Mohon penjelasan atas rencana anggaran sebesar Rp.1.590.500.000,- untuk *Peningkatan Jaminan* Kesejahteraan Sosial Kemasyarakatan.	4 • Pelantikan Kepala Desa terpilih hasil Pilkades serentak tahun 2014 sudah dijadwalkan dan akan dilaksanakan pada tanggal 5 Desember 2014 • Peningkatan jaminan Kesejahteraan Sosial Kemasyarakatan merupakan program yang didalamnya terdapat 4 *kegiatan di tahun anggaran 2014 yaitu:* 1. Koordinasi Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebesar Rp. 25.000.000,- 2. Fasilitasi penunjang Kegiatan Kesejahteraan Rakyat sebesar Rp.237.500.000,- untuk kegiatan rutin di Bagian Kesra. 3. Fasilitasi kepada perawat jenasah RP.778.000.000,- diperuntukan untuk 810 perawat jenazah putra dan putrid tahun 2014 ada kenaikan dari Rp.50.000,- menjadi Rp.75.000,- 4. Fasilitasi Kesehatan dan Sosial Kemanusiaan sebesar *Rp.50.000.000,-* Jumlah keseluruhan Rp. 1.090.500.000,- bukan Rp.1.590.500.000,-

No	PERTANYAAN	JAWABAN
	Dalam rangka penyelenggaraan Pemilu DPR/DPRD Prop/DPRD Kab/DPD dan Pemilu Presiden/Wakil Presiden,diharapkan partisipasinya dari Jajaran Pemerintah Kab. Rembang agar pesta demokrasi berjalan aman dan lancar.	• *Dalam rangka pelaksanaan Pemilihan* Umum DPR, DPD dan DPRD tahun 2014 pada prinsipnya Pemerintah Kabupaten Rembang siap memberikan fasilitasi untuk mensukseskan agenda kegiatan tersebut melalui: a. Pembentukan Desk Pemilu tahun 2014 b. Penyiapan dukungan anggaran pendampingan pada SKPD terkait Koordinasi dan Fasilitasi kegiatan KPU dan Panwaslu Kabupaten
5	• Anggaran Pengelolaan TPI sebesar Rp.2,8 M agar digunakan untuk meningkatkan pelayanan kepada nelayan.	5 Anggaran kegiatan pengelolaan TPI sebesar Rp. 2.800.000.000,- sebagian besar dari anggaran tersebut dgunakan untuk membayar honor Tenaga Harian Lepas (karyawan TPI) dan Tenaga Pangaman TPI sebesar Rp. 1.592.100.000 (57 %), sebesar Rp. Rp. 543.300.000,00 (19,4 %), untuk membayar rekening *telepon , air dan listrik TPI, sedangkan* sisanya Rp. 664.600.000,00 (23,7%), dgunakan untuk pengadaan peralatan TPI (basket, peralatan kebersihan, selang, kendaraan sampah dan pompa alcon)serta operasional TPI (cetak karcis, seragam, alat tulis, foto copy dan makan minum). Sehingga dari anggaran tersebut tidak bisa digunakan sebagai dana talangan untuk *membayar hasil lelang nelayan.* Hasil lelang nelayan akan dbayarkan dari dana talangan hasil pinjamnan koperasi atau menunggu pembayaran dari bakul satu sampai empat hari kemudian. Sedangkan apabila dibandingkan dengan TPI Bulu, disana tidak ada lelang sehingga hasil tangkapan langsung dijual ke bakul dan transaksinya juga kecil.

No	PERTANYAAN	JAWABAN
	Pembangunan TPI di wilayah timur agar mendapatkan perhatian yang sama dengan pembangunan TPI Tasikagung.	• Pembangunan TPI diwilayah timur terus kita laksanakan. • Tahun 2011 : - Pembangunan TPI Sarang Rp.1.067.000.000,00 - Revertmen PPI sarang Rp. 748.000.000,00 • Tahun 2012 : - Pembangunan PPI Karanganyar Rp. 5.130.000.000,00 - Revertmen PPI Sarang Rp. 100.000.000,00 • Tahun 2013 : - *Infrastruktur PPi Karanganyar* Rp.5.172.500.000,00 (diluncurkan di TA 2014 karena waktu pelaksanaan tidak cukup)
6	Mohon penjelasan atas rencana anggaran untuk Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian sebesar Rp.7.584.500.000,-	6 "Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian" merupakan salah satu program, yang terdiri dari berbagai kegiatan diantaranya : 1. Promosi atas hasil produksi pertanian unggulan daerah dengan anggaran Rp. 75.000.000,- 2. Pengolahan informasi permintaan pasar atas hasil produksi pertanian dengan anggaran Rp. 15.000.000,- 3. *Pengawasan peredaran Saprodi Pertanian* dengan anggaran Rp. 24.000.000,-

No	PERTANYAAN	JAWABAN
		4. *Pembangunan Jalan Usaha Tani dengan* anggaran Rp. 3.398.000.000,- 5. Pembangunan jalan produksi pertanian dengan anggaran Rp. 1.675.000.000,- 6. Pembangunan Jalan Produksi Perkebunan dengan anggaran Rp. 2.397.800.000,- *Jumlah Total : Rp. 7.584.800.000,-*
7	Mohon penjelasan atas rencana anggaran Rp. 2.829.078.900,- untuk Peningkatan Asistensi Perdagangan Dalam Negeri dan kegiatan tsb dalam bentuk apa?	7 Pada tahun 2014 Dinas Perindagkop dan UMKM Kabupaten Rembang mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 2.829.078.900,- untuk program Peningkatan Efisiensi Perdagangan dalam Negeri yang akan digunakan untuk melaksanakan 4 kegiatan yang terdiri dari: 1. Kegiatan Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan sebesar Rp.40.000.000,- guna mendanai operasional PIPP (Pos Informasi Pasar dan Perdagangan) sebagai wadah/sarana promosi usaha dan informasi pasar dan perdagangan. 2. Keegiatan pembangaunan Pasar *Percontohan /Tradisional sebesar* Rp.2.369.078.900,- merupakan alokasi dari Dana Alokasi Khusus(DAK) bidang Sarana Perdagangan Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp. 2.096.530.000,- beserta pendampingannya sebesar Rp.272.548.900,- sesuai peruntukannya 3. diarahkan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana perdagangan yaitu sub Bidang Pembangunan dan Pengembangan sarana distribusi perdagangan (pasar, akan digunakan untuk renovasi/perbaikan pembangunan kios, penataan los dan penambahan sarana pendukung pasar(selokan/saluran) di pasar Lasem secara bertahap sehingga terwujud sarana perdagangan yang memadai dan representative.

No	PERTANYAAN	JAWABAN
		4. Kegiatan peningkatan Fasilitas pasar sebesar Rp. 400.000.000,- akan digunakan untuk meningkatkan fasilitas pasar yang berupa sarana pengelolaan/pembuangan sampah (pengadaan container sampah dan pembangunan landasannya) di pasar Sarang, Sedan, Kragan dan Pandangan sehingga dapat memberikan kenyamanan bagi pedagang maupun pembelinya. Kegiatan monitoring perijinan usaha perdagangan dan pengaruh dampak lingkungan sebesar Rp. 20.000.000,- yang digunakan untuk melakukan monitoring dan pendataan perusahaan di 14 kecamatan se-kabupaten Rembang sehingga tersusun dokumen monitoring izin usaha dan dampak lingkungan.

NO	PERTANYAAN	JAWABAN
	III. FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	
1.	SiLPA Tahun Anggaran 2013	Jawaban sudah ada pada Fraksi Partai Golkar
2.	Adanya keresahan dari masyarakat yang terkesan atas terjadinya pungutan biaya bagi siswa kurang mampu.	Sumbangan adalah penerimaan biaya pendidikan baik berupa uang dan / atau barang/jasa perseorangan atau lembaga lainnya kepada satuan pendidikan dasar yang bersifat sukarela, tidak memaksa, tidak mengikat dan tidak ditentukan oleh satuan pendidikan dasar baik jumlah maupun jangka waktu pemberianya (Ps 1 ayat 3). Komite seharusnya bermusyawarah dengan orang tua murid untuk membicarakan sumbangan sukarela supaya tidak ada pihak-pihak yang merasa keberatan.
3.	Mekanisme administrasi dan pelayanan JKRS agar dipermudah.	JKRS telah memberikan pelayanan yang optimal dengan prosedur yang tidak berbelit-belit, namun barangkali yang dirasakan agak berbelit adalah untuk penduduk yang belum terdaftar sebagai peserta JKRS (anggota baru).
4.	Agar Pemerintah Kabupaten mengedepankan Pembangunan infrastruktur jalan dan kwalitasnya.	Semua saran dan masukan kami perhatikan.
5.	Promosi pariwisata agar dioptimalkan	Terima kasih dan akan kami perhatikan.

No	PERTANYAAN	JAWABAN
No		JAWABAN
	IV.FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	
1	Pemkab Rembang agar segera mengisi kekosongan jabatan pada SKPD.	1. Berdasarkan peraturan perundang-undangan diatas telah ditentukan syarat-syarat untuk dapat diangkat dalamjabatan struktural. Artinya pengangkatanp, PNS dalam jabatan struktural memerlukan mekanisme yang membutuhkan pemikiran dan waktu, yang menurut beberapa pandangan bisa dianggap terlalu lama, sehingga oleh karena itu didalam kenyataannya dalam suatu pemerintah daerah masih dijumpai beberapa jabatan kosong Dalam surat Kepala BKN no. K.26-20/V.24-25/99 tanggal 10 Desember 2001 perihal tatacara pengangkati pelaksana PNS sebaga pelaksana tugas disebutkan bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas organisasi, seorang PNS atau pejabat lain dapat diangkat sebagai Pelaksana tugas sesuai ketentuan yang berlaku. Sehingga berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam surat Kepala BKN tersebut diatas, Pemerintah Daerah dapat menunjuk Pejabat Pelaksana Tugas sehingga tugas pokok dan fungsi daerah dapat terjaga kinerjanya
2	Langkah-langkah antisipasif terhadap kemungkinan munculnya bencana alam.	2 Langkah-langkah untuk antisipasi adanya penanggulangan bencana:

No	PERTANYAAN	JAWABAN
		1. *Menyiagakan personel dan* peralatan untuk mempercepat penanganan. 2. Pengecekan stok bantuan logistic. 3. Menjalin komunikasi semua pihak baik masyarakat, organisasi dan SKPD terkait. Meminta informasi terus menerus dengan BMKG tentang kondisi cuaca baik yang ekstrem maupun peringatan dini.
3	Himbauan kepada kepolisian untuk menggelar operasi kepada pelajar *dilakukan secara persuasive* bekerjasama dengan sekolah.	3 Terima kasih akan kami koordinasikan tindaklanjutnya.
4	Penegakan disiplin kepada pelajar yang membolos agar dilakukan secara *kontinyu oleh Satpol PP.*	4 Terima kasih dan akan kami tindaklanjuti.
5	Robohnya bangunan di kawasan TPI agar menjadi koreksi bersama atas perencanaan dan pengawasan program.	5 Terima kasih dan akan lebih fokus akan dijelaskan dalam rapat komisi.
6	Mohon penjelasannya tentang penyerapan APBD tahun 2013 untuk belanja langsung yang baru terserap 41%.	6 Kami upayakan langkah-langkah penyerapan agar terserap sampai dengan akhir tahun
7	• PAD yang bersumber dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan masih mungkin untuk ditingkatkan.	7 Terima kasih, kami sependapat dan akan kami perhatikan .

No	PERTANYAAN	JAWABAN
	• APBD TA 2014 agar memprioritaskan perbaikan jalan antar kecamatan • Silpa tahun 2013 akan lebih besar dari 82 M mengingat pelaksanaan kegiatan yang menumpuk pada akhir tahun. • Mendorong tumbuhnya UMKM yang kreatif dengan memberikan anggaran yang memadai pada SKPD yang konsen di bidang UMKM. • Memberikan anggaran yang memadai untuk penguatan ketahanan pangan • Menghindari tambahan belanja pegawai untuk rekruitmen tenaga honorer.	

No	PERTANYAAN	JAWABAN
	V. FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	
1.	Kegiatan infrastruktur yang belum dilaksanakan ditahun anggaran berjalan ini harus betul-betul dilaksanakan di Tahun 2014.	1. Semua saran dan masukan akan kami perhatikan.
2.	PemKab Rembang agar lebih serius melakukan pengawasan lebih cermat dan tegas akibat dari exploitasi kekayaan alam di bidang pertambangan.	2. Selama ini pengawasan dan penanganan yang lebih tegas terhadap usaha pertambangan dalam rangka penerimaan retribusi telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui : • Penelitian terhadap berkas-berkas kelayakan usaha ketika pengusaha mengajukan ijin usaha pertambangan. • Pengawasan terhadap proses usaha (teknik produksi, pemasaran, dll) • Pencegahan dan pengawasan terhadap Pertambangan Tanpa Ijin (PETI) • *Pengecekan dan penelitian laporan* produksi yang disampaikan pengusaha.
3.	Pelayanan di bidang kesehatan khususnya di RSUD dr. R.Soetrasno wajib dilakukan secara sungguh-sungguh, penuh dengan keramahan dalam pelayanan dan tertib dalam hal insentif karyawan. Pelayanan dan ketersediaan sarana prasarana di semua Puskesmas-Puskesmas di wilayah Kabupaten Rembang hendaknya dikelola dengan cermat dan penuh tanggung jawab.	3. Terima kasih atas masukannya dan akan kami jadikan acuan untuk perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana ke depan.
4.	*Pemda hendaknya jeli dalam* mengantisipasi segala kemungkinan dalam pelaksanaan Pilkades dengan munculnya kasus-kasus kedepan perlu diantisipasi dalam Peraturan-peraturan yang mengatur tentang hal tersebut.	4. *Terkait munculnya beberapa* kekurangan dalam pelaksanaan Pilkades PemKab Rembang siap menerima saran dan ke depan akan kami antisipasi agar lebih baik lagi.

No	PERTANYAAN	JAWABAN
	VI. FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL	
1	Untuk mendapatkan penilaian Wajar Tanpa Pengecualian perlu menggandeng pihak ketiga dalam penilaian aset	1 Terima kasih atas dukungannya, perlu disampaikan bahwa dalam pengelolaan aset daerah kami telah bekerjasama dengan BPKP dengan tahapan penelusuran Barang Milik Daerah (BMD) dengan mempergunakan aplikasi SIMDA BMD, dan dalam rangka penyajian laporan aset yang akurat, dalam persiapan penyusunan LKPD Kabupaten Rembang TA 2013, dilaksanakan konversi aset sebagai *langkah penyamaan struktur akun* laporan aset dari format SAP ke Permendagri No.17 Tahun 2007 yang merupakan dasar akun penelusuran BMD.
2	a. Menyusun Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah	a Akan ditindaklanjuti penyusunan peraturan daerah tentang pengelolaan sampah
	b. Pemerintah Kabupaten harus mengubah sistem open dumping pada TPA menjadi berwawasan lingkungan	b Akan kami rintis mengubah sistem pengelolaan sampah open dumping pada TPA menjadi berwawasan lingkungan
	c. Melakukan sosialisasi dan pengwasan terhadap pengelola kawasan permukiman, kawasan industri, kawasan komersial dan fasilitas lainnya	C Kami perhatikan
	d. Belum tersediannya anggaran yang cukup untuk pengelolaan sampah	*d Pengelolaan sampah 3 R sudah* kami rintis salah satunya pembuatan pupuk kompos dilokasi aks Pasar Sumberjo sebelah barat. Penganggaran pengelolaan sampah sudah ada di program pengeloaan K3 dan peningkatan K3 tentang pengelolaan sampah di perkotaan

No	PERTANYAAN	JAWABAN
3	Beberapa jalan utama antar kecamatan belum mendapatkan penerangan sehingga memicu kecelakaan dan kejahatan	3 Tentang penerangan jalan akan kami koordinasikan dengan Dinas ESDM Kabupaten Rembang

No	PERTANYAAN	JAWABAN
	VII. FRAKSI BINTANG KEADILAN	
1.	Keterlambatan pengiriman RAPBD TA 2014, TAPD terkesan kurang serius dan kurang bersemangat untuk segera menyelesaikan penyusunan RAPBD TA 2014	1. Jawaban sudah ada pada Fraksi Partai Golkar.
2.	Asumsi PAD 2014 optimis dapat tercapai, apalagi masih ada potensi – potensi lain, baik dari pertambangan, kelautan dan yang lainnya	2. Terima kasih atas dukungannya dan kami telah melakukan upaya secara maksimal untuk meningkatkan PAD melalui intensifikasi potensi-potensi yang ada.
3.	Bidang Pendidikan • Agar hak-hak guru sehubungan dengan sertifikasi dapat diberikan sebagaimana mestinya. • Sekolah Gratis pada jenjang Sekolah Dasar 9 tahun (SD, SMP) harus dipertahankan. • Pertisipasi publik (siswa/wali) harus *selalu kita dorong dengan* musyawarah antara wali siswa dengan komite sekolah sehingga tidak ada yang merasa keberatan.	3. Terima kasih atas perhatiannya akan kami perhatikan dan pertahankan.
4.	Bidang Kesehatan • Sejauh mana persiapan yang dilakukan terhadap rencana Puskesmas Sarang 2.	4. Dinas Kesehatan telah memiliki dokumen perencanaan /masterplan bangunan gedung Puskesmas Sarang 2 yang meliputi Pelayanan Unit Gawat Darurat, Poliklinik, Rawat Inap, dan manajemen perkantoran. Dalam Tahun anggaran 2013 telah dilakukan kegiatan pelelangan pembangunan gedung Puskesmas Sarang 2, namun proses lelang dinyatakan gagal lelang, sehingga akan diluncurkan */dianggarkan kembali di Tahun 2014.*

No	PERTANYAAN	JAWABAN
	• *Perlunya ketegasan sikap jajaran* Dinas Kesehatan dengan masih adanya pelayanan persalinan diluar Puskesmas ataupun RSU yang dilakukan oleh BPS (bidan praktek swasta).	*Telah dikeluarkan Perbup Nomor* 41/2011 tentang akselerasi penurunan AKI dan AKB, dan ditindaklanjuti dengan Keputusan Kepala Dinkesehatan Nomor 4418/739 tentang Pelayanan Persalinan tingkat dasar di kabupaten Rembang Persalinan dilakukan di fasilitas persalinan tingkat dasar milik pemerintah (Puskesmas dan RS) serta institusi swasta (BPS/ RB) yang memenuhi standar Persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan (2 orang) Dalam rangka pelaksanaan *pengawasan , Dinkes* akan memberikan tindakan administratif kepada pemilik pelayanan swasta yang melaksanakan pelanggaran Dalam memberikan rekomendasi Bidan Praktik swasta yang tidak memenuhi standar untuk menolong persalinan hanya diberikan rekomendasi untuk pelayanan ANC, PNC dan KB
	• Adanya wacana Puskesmas BLUD agar dilakukan pengkajian lebih mendalam sebelum rencana tersebut dilakukan.	Dinas Kesehatan sedang melakukan proses penyusunan dan pengkajian pengembangan puskesmas untuk bertransformasi pengelolaan lembaga publik menjadi BLU. Pengkajian meliputi SDM, manajemen dan lainnya yang harapannya dapat memberikan pelayanan kesehatan yang lebih berkualitas

Rapat Dewan dan Hadirin yang Saya hormati,

Demikian jawaban atas pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Rembang terhadap Pengantar Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014. Untuk selanjutnya terhadap hal-hal yang masih membutuhkan penjelasan secara teknis, kami mempersilahkan untuk dibahas dan diperdalam dalam pembahasan komisi-komisi.

Akhirnya tidak lupa saya sampaikan terima kasih. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberi bimbingan dan petunjuk-Nya kepada kita sekalian.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Rembang, 3 Desember 2013

WAKIL BUPATI REMBANG

H. ABDUL HAFIDZ

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

Jl. P. Diponegoro No.88 Telp. (0295) 691194 Kode Pos 59212
R E M B A N G

RISALAH

RAPAT PARIPURNA (III) DPRD KABUPATEN REMBANG DALAM RANGKA PEMBAHASAN RAPERDA APBD KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2014

Hari : KAMIS
Tanggal : 19 Desember 2013
Waktu : 09.30 WIB.
Tempat : Gedung DPRD Kabupaten Rembang

I. **JENIS RAPAT** : Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Rembang

II. **SIFAT RAPAT** : Terbuka

III. **ACARA RAPAT** :

1. Pembukaan.
2. Laporan Badan Anggaran Atas Hasil Pembahasan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2014;
3. Penyampaian Pendapat Fraksi terhadap Hasil Pembahasan Raperda APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2014;
4. Pembacaan Rancangan Peraturan Daerah tentang Raperda APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2014 ;
5. Persetujuan Penetapan Raperda APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2014 ;
6. Penyampaian Pendapat Akhir Bupati atas Hasil Pembahasan Raperda APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2014.
7. Penutup.

IV. **PIMPINAN RAPAT**

1. Nama : **Ir. H. SUNARTO**
2. Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Rembang

V. **SEKRETARIS RAPAT**

1. Nama : Drs. **ACHMAD MUALIF**
2. Jabatan : Sekretaris DPRD Kabupaten Rembang

VI. **JUMLAH ANGGOTA**

1. Fraksi Demokrat	: 8 orang
2. Fraksi Golongan Karya	: 8 orang
3. Fraksi Persatuan Pembangunan	: 7 orang
4. Fraski Kebangkitan Bangsa	: 7 orang
5. Fraksi PDI Perjuangan	: 5 orang
6. Fraksi Amanat Nasional	: 5 orang
7. Fraksi Bintang Keadilan	: 5 orang
Jumlah	: 45 orang

VII. **ANGGOTA YANG HADIR**

1. Fraksi Demokrat	: 8 orang
2. Fraksi Golongan Karya	: 8 orang
3. Fraksi Persatuan Pembangunan	: 5 orang
4. Fraski Kebangkitan Bangsa	: 4 orang
5. Fraksi PDI Perjuangan	: 5 orang
6. Fraksi Amanat Nasional	: 5 orang
7. Fraksi Bintang Keadilan	: 4 orang
Jumlah	: 39 orang

VIII. **ANGGOTA YANG TIDAK HADIR**

1. Fraksi Demokrat	: - orang
2. Fraksi Golongan Karya	: - orang
3. Fraksi Persatuan Pembangunan	: 2 orang
4. Fraski Kebangkitan Bangsa	: 3 orang
5. Fraksi PDI Perjuangan	: - orang
6. Fraksi Amanat Nasional	: - orang
7. Fraksi Bintang Keadilan	: 1 orang
Jumlah	: 6 orang

IX. JALANNYA RAPAT
PIMPINAN RAPAT : Ir. H. SUNARTO

LAGU INDONESIA RAYA

Asalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang terhormat	Bupati dan Wakil Bupati Rembang
Yang saya hormati	Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Rembang
Yang saya hormati	Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Rembang
Yang saya hormati	Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang
Yang saya hormati	Sekretaris DPRD, Staf Ahli Bupati, Asisten Sekda, Kepala Badan, Dinas, Kantor, Bagian, Instansi dan Camat se Kabupaten Rembang
Yang saya hormati	Pimpinan Partai Politik, LSM, para wartawan dan semua undangan lainnya yang berbahagia.

Terlebih dahulu marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa atas semua limpahan rahmat dan hidayah yang diberikan kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk mengikuti Rapat Paripurna Ketiga (III) DPRD Kabupaten Rembang dalam rangka membahas Raperda tentang APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2014 dalam keadaan sehat walafiat.

Rapat Dewan dan hadirin yang terhormat.

Sebelum memasuki acara pokok perlu kami sampaikan bahwa Rapat Paripurna pada hari ini merupakan Rapat Paripurna terakhir dalam membahas Raperda APBD Kabupaten Tahun Anggaran 2014, sebagaimana yang telah terjadwalkan dalam Rapat Badan Musyawarah DPRD tanggal 29 Nopember 2013. Perlu diketahui bahwa pembahasan Raperda APBD

Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2014 ini telah melalui beberapa tahapan dalam pembahasannya, baik pembahasan internal maupun eksternal, dan pembahasan tersebut dilakukan untuk menetapkan dan memutuskan arah Kebijakan Daerah Kabupaten Rembang dalam menentukan posisi Anggaran Daerah yang efisien dan efektif sehingga dapat mencakup kepentingan Aparatur maupun Kepentingan Publik demi terwujudnya Masyarakat Kabupaten Rembang ke depan yang lebih baik, dan Alhamdulillah semua ini dapat berjalan lancar sesuai jadwal yang telah ditentukan dalam Rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Rembang.

Rapat Dewan dan hadirin yang saya hormati.

Untuk mempersingkat waktu, akan kami bacakan acara yang akan berlangsung pada Rapat Paripurna hari ini, yaitu :

1. Pembukaan.
2. Laporan Badan Anggaran Atas Hasil Pembahasan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2014;
3. Penyampaian Pendapat Fraksi terhadap Hasil Pembahasan Raperda APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2014;
4. Pembacaan Rancangan Peraturan Daerah tentang Raperda APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2014 ;
5. Persetujuan Penetapan Raperda APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2014 ;
6. Penyampaian Pendapat Akhir Bupati atas Hasil Pembahasan Raperda APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2014.
7. Penutup.

Rapat Dewan dan hadirin yang saya hormati.

Perlu kami sampaikan bahwa ketentuan kuorum dalam Rapat Paripurna Ketiga (III) hari ini, sama dengan ketentuan kuorum yang

berlaku dalam Rapat- rapat Paripurna sebelumnya dalam membahas Raperda APBD Kabupaten Rembang Tahun 2014 yakni dihadiri dan ditandatangani oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 80 ayat (1) huruf b Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2010 yang telah diubah dengan Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2010 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang.

Menurut catatan yang saya terima dari Sekretariat DPRD, bahwa anggota DPRD Kabupaten Rembang sejumlah 45 orang, yang hadir secara fisik dan menandatangani daftar hadir dalam Rapat Paripurna DPRD hari ini adalah sebanyak 38 orang. Dengan demikian ketentuan kuorum rapat telah terpenuhi.

Untuk itu Rapat Paripurna dapat kita mulai, dan dengan membaca "***Bismillahirrohmanirrohim***" tepat pukul 11.00 WIB Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Rembang hari ini saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

(Ketuk Palu 3 Kali)

Peserta Rapat dan hadirin yang terhormat.

Kita masuki acara yang kedua, yaitu Laporan Badan Anggaran atas Hasil Pembahasan Raperda APBD Kabupaten Rembang Tahun 20143.

Kepada Sekretaris Badan Anggaran Sdr. Drs. Achmad Mualif dipersilahkan.

LAPORAN BADAN ANGGARAN

(Teks Laporan Terlampir)

Terima kasih kepada Sekretaris Badan Anggaran atas penyampaian laporannya.

Rapat Dewan dan hadirin yang terhormat.

Menginjak acara ketiga yaitu Penyampaian Pendapat Fraksi terhadap Hasil Pembahasan Raperda APBD Tahun Anggaran 2014. Kepada Saudara-saudara anggota Fraksi yang akan menyampaikan Pendapat Fraksi terhadap Hasil Pembahasan Raperda APBD Tahun Anggaran 2014, saya persilahkan untuk menunjukkan jari terlebih dahulu :

1. Fraksi Demokrat : H. Harno, SE
2. Fraksi Partai Golkar : Khairul Muthakim
3. Fraksi Persatuan Pembangunan: H. Hakam
4. Fraksi PKB : Puji Santoso, SP, MH
5. Fraksi PDI-Perjuangan : Sumarsih
6. Fraksi Amanat Nasional : Sukarmain
7. Fraksi Bintang Keadilan : Hj. Dhian Rahweni Dewi

Selanjutnya dimulai dari juru Bicara Fraksi Demokrat sampai dengan Fraksi Bintang Keadilan, secara berurutan saya persilahkan untuk menyampaikan pendapat akhirnya.

Dipersilahkan.

Fraksi	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
Fraksi Demokrat	✓		
Fraksi Partai Golkar	✓		
Fraksi Persatuan Pembangunan	✓		
Fraksi PKB	✓		
Fraksi PDI-Perjuangan	✓		
Fraksi Amanat Nasional	✓		
Fraksi Bintang Keadilan	✓		

(***Teks Pendapat akhir Fraksi Terlampir***)

Terima kasih saya sampaikan kepada Saudara-saudara yang telah mewakili Fraksinya masing-masing dalam Penyampaian Pendapat Fraksi terhadap Hasil Pembahasan Raperda APBD Tahun Anggaran 2014.

Rapat Dewan dan hadirin yang terhormat.

Kita masuk acara yang keempat yaitu Pembacaan Rancangan Peraturan Daerah tentang Raperda APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2014. Perlu kami sampaikan bahwa sebelum Raperda APBD Tahun 2014 ini ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, perlu dibacakan terlebih dahulu Raperda APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2014 hasil pembahasan antara pihak legislatif dan eksekutif oleh Kepala DPPKAD Kabupaten Rembang. Untuk itu kepada Kepala DPPKAD Sdr. Mustain, SH, MM saya persilahkan.

=PEMBACAAN RAPERDA APBD TAHUN ANGGARAN 2014 =

Terima kasih kepada Sdr. Mustain, SH. MM atas pembacaan Raperda APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2014.

Rapat Dewan dan hadirin yang terhormat.

Setelah mendengar Laporan Badan Anggaran dan Penyampaian Pendapat Fraksi terhadap Hasil Pembahasan Raperda APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2014, maka dapat saya simpulkan bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2014 dapat diterima dan disetujui.

Namun untuk keabsahan Peraturan Daerah tersebut perlu saya tawarkan terlebih dahulu kepada Saudara-Saudara Anggota DPRD yang hadir :

"Apakah Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2014 dan Rekomendasi yang disampaikan Badan Anggaran DPRD melalui Laporannya dapat disetujui ?"

=====S e t u j u u u ! ! !=====

(Ketuk Palu 1 Kali)

Rapat Dewan dan hadirin yang terhormat.

Dengan telah disetujuinya Raperda APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2014 tersebut diatas menjadi Peraturan Daerah, maka acara Rapat Paripurna hari ini dapat dilanjutkan dengan acara berikutnya, yaitu Penyampaian Pendapat Akhir Bupati atas Hasil Pembahasan Raperda tentang APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2014.

Kepada saudara Bupati dipersilahkan

====PENYAMPAIAN PENDAPAT AKHIR BUPATI ====

(Teks Pendapat Akhir Bupati Terlampir)

Terima kasih kepada saudara Bupati Rembang, yang telah menyampaikan " *Pendapat Akhir Bupati atas Hasil Pembahasan Raperda tentang APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2014* ".

Rapat Dewan dan Hadirin yang berbahagia.

Acara demi acara telah kita lalui dengan seksama, akhirnya terima kasih saya sampaikan kepada Bupati beserta jajarannya, rekan-rekan Anggota DPRD baik yang masuk dalam Komisi-Komisi maupun Badan Anggaran serta Sekretaris DPRD beserta seluruh stafnya yang telah melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dengan baik sehingga dapat menyelesaikan pembahasan Raperda APBD Kabupaten Rembang Tahun 2014 sesuai dengan waktu yang telah dijadwalkan.

Kepada saudara-saudara yang telah mengikuti Rapat , kami atas nama Pimpinan DPRD mengucapkan banyak terima kasih atas segala perhatian, kehadiran serta kebersamaannya, dan mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyelenggaraan Rapat Paripurna pada hari ini.

Selanjutnya dengan mengucap " ***Alhamdulillahirobbil 'alamin*** " tepat pukul 13.15 WIB Rapat Paripurna DPRD hari ini saya nyatakan ditutup.

(Ketuk Palu 3 Kali)

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

KETUA	SEKRETARIS
Ir. H. SUNARTO	**Drs. ACHMAD MUALIF**
	Pembina Utama Muda
	NIP. 19620804 198803 1 011

LAMPIRAN : RISALAH RAPAT PARIPURNA (III) DPRD KABUPATEN REMBANG DALAM RANGKA PEMBAHASAN APBD KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2014

LAMPIRAN I	:	Daftar Hadir Pimpinan dan Anggota DPRD, Forum koordinasi Pimpinan Daerah , SKPD dan Camat Se Kabupaten Rembang;
LAMPIRAN II	:	Teks Laporan Banggar atas hasil pembahasan Raperda tentang APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2014;
LAMPIRAN III	:	Teks Pendapat Akhir Fraksi DPRD Kab. Rembang terhadap Raperda tentang APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2014;
LAMPIRAN IV	:	Teks Pendapat Akhir Bupati atas hasil pembahasan Raperda tentang APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2014;
LAMPIRAN V	:	Teks Tambahan Bupati dalam Pendapat Akhir Bupati atas hasil pembahasan Raperda tentang APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2014.

DAFTAR HADIR
RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN REMBANG (III)
MEMBAHAS RAPERDA APBD KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN2014

HARI/TANGGAL : KAMIS, 19 DESEMBER 2013
PUKUL : 09.00 WIB

NO	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN	KET
1	2	3	4	5
	FRAKSI DEMOKRAT			
1	Ir. H. SUNARTO	Ketua	1	
2	H. ISLAHUDDIN	Anggota	2	
3	H. HARNO, SE	Anggota	3	
4	GUNASIH, SE	Anggota	4	
5	IMRO'ATUS SOLICHAH, SE	Anggota	5	
6	Hj. HIKMAH PURNAMAWATI	Anggota	6	
7	EDI KARTONO, S.Pd	Anggota	7	
8	MUGIYARTO, ST	Anggota	8	
	FRAKSI PARTAI GOLKAR			
9	CATUR WINANTO, SH	Wakil Ketua	9	
10	H. ISMARI	Anggota	10	
11	SUCI RAHAYU, SH	Anggota	11	
12	JOKO SOESILO	Anggota	12	
13	GATOT PAERAN, SH MSi	Anggota	13	
14	KHAIRUL MUTAKIM	Anggota	14	
15	CHAIRUL ANWAR, S.Sos	Anggota	15	
16	SRI REJEKI, SH	Anggota	16	
	FRAKSI PERSATUAN PEMBANGUNAN			
17	H. MAJID KAMIL MZ	Wakil Ketua	17	
18	H. SA'DULLAH	Anggota	18	
19	H.M. MURSYID, ST	Anggota	19	
20	H. HAKAM, SH	Anggota	20	
21	SULISTYO WETI ARIANI	Anggota	21	
22	KODRIYAH, S.Pd	Anggota	22	
23	H. YUDIANTO, SH	Anggota	23	
	FRAKSI KEBANGKITAN BANGSA			
24	SUWANTO	Wakil Ketua	24	
25	MUHAMMAD ASNAWI, S.Pd	Anggota	25	
26	H. SUTARYO SHOLEH	Anggota	26	
27	PUJI SANTOSO, SP, MH	Anggota	27	
28	H.M. NOOR HASAN, SH	Anggota	28	
29	H. SHOLEH, BA	Anggota	29	
30	H.M. SHODIQIN YASIR	Anggota	30	

NO	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN	KET
1	2	3	4	5
	FRAKSI PDI PERJUANGAN			
31	JASMANI	Anggota	31	
32	SUPRIHADI	Anggota	32	
33	SUMARSIH	Anggota	33	
34	RIDWAN, SH, MH	Anggota	34	
35	A. MASKUR RUKHANI	Anggota	35	
	FRAKSI AMANAT NASIONAL			
36	JIHAD ASIA PUSTAKAWAN, SE	Anggota	36	
37	H. MOH. NURHASAN, SH	Anggota	37	
38	MOH. IMAM ZARKASI	Anggota	38	
39	SUKARMAIN	Anggota	39	
40	SAHNINGSIH, SE	Anggota	40	
	FRAKSI BINTANG KEADILAN			
41	dr. ROCHMAD ISNAINI	Anggota	41	
42	ACHMAD ZAMHURI	Anggota	42	
43	MUNTHOHID, SH	Anggota	43	
44	H. JOKO SUPRIHADI, SH	Anggota	44	
45	DHIAN RAHWENI DEWI	Anggota	45	

Keterangan :

1 I : Ijin
2 S : Sakit
3 C : Cuti
4 DL : Dinas Luar

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG
KETUA

Ir. H. SUNARTO

PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
SEKRETARIAT DPRD

DAFTAR HADIR
RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN REMBANG (III)
MEMBAHAS RAPERDA APBD KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2014

HARI/TANGGAL : KAMIS, 19 DESEMBER 2013
PUKUL : 09.00 WIB

NO	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	H. MOCH SALIM	Bupati Rembang	1. .....
2.	H. ABDUL HAFIDZ	Wakil Bupati Rembang	2. .....
3.	HAMZAH FATONI, SH MKn	Sekretaris Daerah	3. .....
4.	.....	Kejaksaan Negeri Rembang	4. .....
5.	.....	Pengadilan Negeri Rembang	5. .....
6.	.....	Dandim 0720 Rembang	6. .....
7.	SRI IRIYANTI, SH	Kepolisian Resort Rembang	7. .....
8.	.....	Pengadilan Agama Kab. Rembang	8. .....

SEKRETARIS DPRD KAB. REMBANG

Drs. ACHMAD MUALIF
NIP. 19620804 198803 1 011

DAFTAR HADIR

RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN REMBANG (III)

MEMBAHAS RAPERDA APBD KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2014

HARI/TANGGAL : KAMIS, 19 DESEMBER 2013

PUKUL : 09.00 WIB

NO	JABATAN	N A M A	TANDA TANGAN
1	CAMAT REMBANG	H. Agus Salim	1
2	CAMAT KALIORI	MUSTHOCIK	2
3	CAMAT SUMBER	HERYONO	3
4	CAMAT SULANG	TEGUH. G	4
5	CAMAT BULU	SUSWANTORO	5
6	CAMAT PAMOTAN	M. WISNU	6
7	CAMAT GUNEM	TEGUH. G	7
8	CAMAT SALE	Kumardi	8
9	CAMAT LASEM	Kukun P	9
10	CAMAT PANCUR	Suharto	10
11	CAMAT SEDAN		11
12	CAMAT SLUKE	Subagyo	12
13	CAMAT KRAGAN	MASHADI	13
14	CAMAT SARANG	Eddy Kiswanto	14

SEKRETARIS DPRD KAB. REMBANG

Drs. ACHMAD MUALIF

NIP. 19620804 198803 1 011

DAFTAR HADIR

RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN REMBANG (III)

MEMBAHAS RAPERDA APBD KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2014

HARI/TANGGAL : KAMIS, 19 DESEMBER 2013

PUKUL : 09.00 WIB

NO	BADAN/BAG/DINAS/KANTOR	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
1	STAF AHLI BUPATI	Wartono	SAB	1
2	STAF AHLI BUPATI	Nur Effendi	--	2
3	STAF AHLI BUPATI			3
4	STAF AHLI BUPATI			4
5	ASISTEN I SEKDA			5
6	ASISTEN II SEKDA			6
7	ASISTEN III SEKDA			7
8	BAG. TATA PEMERINTAHAN			8
9	BAG. HUKUM	JOHAN		9
10	BAG. HUMAS	JOHAN NW	Humas	10
11	BAG. ADM. PEMBANGUNAN	Gautarto	—	11
12	BAG. ADM. PEREKONOMIAN			12
13	BAG. KESEJAHTERAAN RAKYAT			13
14	BAG. ADM. KEUANGAN			14
15	BAG. ORGNS. & KEPEGAWAIAN	End Sukamati	Ayng	15
16	BAG. UMUM	Ismail		16
17	DPPKAD	Mustoni	DPPKD	17
18	INSPEKTORAT	FAHRUDIN	INSPERTUR	18
19	BAPPEDA	Hari S	Ka	19
20	BPMPKB	NGATINI	SEKRET	20
21	B K Ø	Supakmin	Ka	21
22	BKP & P4K	Nur Hidayati	Kasubbag Keu	22
23	B P B D (Ka. Laks. BPBD)	SUHARON	Kabid	23
24	DINAS PEKERJAAN UMUM	M. Rokhim	Kabid	24
25	DINAS KESEHATAN	Supriyo Utomo	Sekret	25
26	DINAS PENDIDIKAN	Budiyono	Kabid	26
27	DINPERINDAGKOP & UMKM			27
28	DINTANHUT	Surasmin	Kadis	28
29	DINLUTKAN	BUDIYONO	Sekretaris	29
30	DINHUBKOMINFO	JOESTIENNARNI	Kabid	30
31	DINAS DUKCAPIL	M Daemiri	Kadis	31
32	DINSOSNAKERTRANS	H. WALUYO	KADIS	32
33	DINBUDPARPORA			33

NO	BADAN/BAG/DINAS/KANTOR	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
34	DINAS ENERGI & SDM	AGUS SUPRIYANTO	KA	34
35	BADAN LINGKUNGAN HIDUP	Purwandi S	Ka.	35
36	KANTOR KESBANGPOLINMAS			36
37	KANTOR PERPUST & ARSIP	Edi W	Ka Pustaip	37
38	KANTOR PPT	Ety Purbiyanti	Ka. Sub. Bag TU	38
39	RSUD dr. R. SUTRASNO	Y.E. Sudarsini	Kabag TU	39
40	SATPOL PP			40
41	TIM PKK KAB. REMBANG	MY Sbimt Sorbaji	Bend.	41
42	P D A M	Rochmad Ipdadi	Kabag Hub Lang	42
43	PERCETAKAN DAERAH	SANGGA SIHOMBING	Ka. Unit	43
44	PD. BANK PASAR			44
45	BPD JATENG CAB. REMBANG			45
46	BRI CAB. REMBANG			46
47	BKK LASEM			47
48	R B S J			48
49	B P N KAB. REMBANG			49
50	KANTOR KEMENTRIAN AGAMA			50
51	DIPENDA PROPINSI			51
52	BPS KAB. REMBANG	AGUS SLAMET	KASI IPDS	52
53	RUMAH TAHANAN			53
54	PERHUTANI KPH MANTINGAN			54
55	PERHUTANI KPH KEBONHARJO			55
56	KANTOR PERHUTANI SPH IV			56
57	KPU KAB. REMBANG			57
58	SEKRETARIS KPU KAB. REMBANG			58
59	KANTOR POS DAN GIRO			59
60	TELKOM REMBANG			60
61	PLN CAB. REMBANG			61
62	PANWASLU KAB. REMBANG			62
63				63
64				64
65				65
66				66
67				67
68				68
69				69
70				70

NO	BADAN/BAG/DINAS/KANTOR	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
71	A. MUSHIGH M			71
72	~~MASUDI~~ Radio CBFM	MASUDI	Reporter	72
73	Mulyanti	Agus W	SA FPG	73
74	Mulyanti	SM		74
75		[illegible]	RB RES	75
76		[illegible]	RA Reg	76
77		Banjar	NOC NRS	77
78	CuCuc/PERS	Cukur	KA Biro	78
79	Thimas			79
80	Mittaohul lohyan		Afudyan	80
81	D SEMUT Abang	GUSNO	Ulwa	81
82	PERS -	Hajan MY.	DETIK.	82
83				83
84				84
85				85
86				86
87				87
88				88
89				89
90				90
91				91
92				92
93				93
94				94
95				95
96				96
97				97
98				98
99				99
100				100
101				101
102				102

SEKRETARIS DPRD KAB. REMBANG

Drs. ACHMAD MUALIF
NIP. 19620804 198803 1 011

LAPORAN BADAN ANGGARAN
DPRD KABUPATEN REMBANG

MEMBAHAS RAPERDA APBD
KABUPATEN REMBANG
TAHUN ANGGARAN 2014

TANGGAL : 19 DESEMBER 2013

DPRD KABUPATEN REMBANG
Jl. P. Diponegoro No. 88 Telp. (0295) 691194
Rembang 59212

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG
Jl. P. Diponegoro No.88 Telp. (0295) 691194 Kode Pos 59212
REMBANG

LAPORAN BADAN ANGGARAN DPRD KABUPATEN REMBANG MEMBAHAS RAPERDA TENTANG APBD KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2014

I. PENDAHULUAN

1. Bahwa untuk menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2014 perlu diadakan pembahasan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) ;

2. Bahwa hasil pembahasan Raperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2014 dilaporkan oleh Badan Anggaran pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Rembang.

II. DASAR

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2013;
9. Surat Bupati Rembang Nomor 188.3/6681/2013 tanggal 15 November Tahun 2013 perihal Pengiriman Raperda;
10. Keputusan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2010 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2010 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang;
11. Hasil Rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Rembang dengan TAPD Pemerintah Kabupaten Rembang tanggal 29 November 2013 yang mengagendakan Jadwal Rapat-rapat DPRD dalam membahas Raperda APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2014.

III. PELAKSANAAN

a. Rapat Badan Anggaran dengan TAPD Kabupaten Rembang dilakukan pada tanggal 3 Desember 2013 Jam 13.00 WIB dengan agenda penjelasan lanjutan atas Raperda APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2014.

b. Rapat Badan Anggaran dengan Pimpinan Komisi – komisi DPRD Kabupaten Rembang yang dilakukan pada tanggal 3 Desember 2013 Jam 15.00 WIB membahas Strategi dan Distribusi Pembahasan Raperda APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2014.

c. Rapat-rapat Komisi A, B, C dan D DPRD Kabupaten Rembang dengan SKPD / Instansi terkait dilaksanakan pada :
   Hari : Rabu s/d Selasa
   Tanggal : 4 s/d 10 Desember 2013
   Jam : 09.00 WIB
   Tempat : Ruang Komisi A,,B,C dan D DPRD Kabupaten Rembang
   Acara : Pendalaman Raperda APBD Tahun Anggaran 2014

d. Rapat Badan Anggaran dengan Pimpinan Komisi-komisi DPRD Kabupaten Rembang pada :
   Hari : Senin
   Tanggal : 16 Desember 2013
   Jam : 09.00 WIB
   Tempat : Ruang Badan Anggaran DPRD Kabupaten Rembang
   Acara : Penyampaian Laporan Komisi atas Pendalaman Raperda APBD Tahun Anggaran 2014

e. Rapat Badan Anggaran Internal pada :
   Hari : Senin
   Tanggal : 16 Desember 2013
   Jam : 13.00 WIB
   Tempat : Ruang Badan Anggaran DPRD Kabupaten Rembang
   Acara : Pembahasan atas Laporan Komisi terhadap Pendalaman Raperda APBD Tahun Anggaran 2014

f. Rapat Badan Anggaran DPRD dengan TAPD pada :
   Hari : Rabu
   Tanggal : 18 Desember 2013
   Jam : 09.00 WIB
   Tempat : Ruang Badan Anggaran DPRD Kabupaten Rembang
   Acara : Sinkronisasi dan koordinasi hasil Pembahasan Raperda APBD Tahun Anggaran 2014

IV. HASIL RAPAT

Badan Angggaran DPRD Kabupaten Rembang telah melakukan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2014, sebagaimana jadwal yang telah ditentukan. Adapun ringkasannya dapat dijabarkan sebagai berikut :

A. RINGKASAN RANCANGAN APBD 2014

NO	SKPD	JUMLAH (Rp)	PEMBAHASAN	
		R APDB 2014	PERSETUJUAN	BERTAMBAH (BERKURANG)
1	2	3	4	5= 4-3
1	**PENDAPATAN DAERAH**	**1.121.607.885.969**	**1.126.748.775.969**	**5.140.890.000**
1.1	**Pendapatan Asli Daerah**	**134.850.273.200**	**139.991.163.200**	**5.140.890.000**
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	29.982.000.000	31.217.000.000	1.235.000.000
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	25.986.787.000	29.892.677.000	3.905.890.000
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.683.275.000	3.683.275.000	-
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	75.198.211.200	75.198.211.200	-
				-
1.2	**Dana Perimbangan**	**791.922.055.000**	**791.922.055.000**	-
1.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	29.539.334.000	29.539.334.000	-
1.2.2	Dana Alokasi Umum	700.774.721.000	700.774.721.000	-
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	61.608.000.000	61.608.000.000	-
1.3	**Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah**	**194.835.557.769**	**194.835.557.769**	-
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya	44.334.655.769	44.334.655.769	-
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	150.500.902.000	150.500.902.000	-
				-
2.	**BELANJA DAERAH**	**1.200.569.624.150**	**1.247.734.520.650**	**47.164.896.500**
2.1	**Belanja Tidak Langsung**	**732.868.771.550**	**765.461.935.200**	**32.593.163.650**
2.1.1	Belanja Pegawai	665.133.180.550	694.647.479.200	29.514.298.650
2.1.2	Belanja Bunga	37.000.000	37.000.000	-
2.1.4	Belanja Hibah	24.893.391.000	30.432.731.000	5.539.340.000
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	5.823.000.000	3.976.525.000	(1.846.475.000)
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa	35.982.200.000	35.368.200.000	(614.000.000)
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	1.000.000.000	1.000.000.000	-
2.2	**Belanja Langsung**	**467.700.852.600**	**482.272.585.450**	**14.571.732.850**
2.2.1	Belanja Pegawai	77.257.607.600	75.750.482.100	(1.507.125.500)
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	220.940.624.260	234.634.095.960	13.693.471.700
2.2.3	Belanja Modal	169.502.620.740	171.888.007.390	2.385.386.650
	Jumlah Belanja	**1.200.569.624.150**	**1.247.734.520.650**	**47.164.896.500**
	surplus (devisit)	**(78.961.738.181)**	**(120.985.744.681)**	**(42.024.006.500)**
3.	**PEMBIAYAAN DAERAH**			-
3.1	**Penerimaan Pembiayaan**	**82.371.738.181**	**124.395.744.681**	**42.024.006.500**
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SILPA)	82.371.738.181	124.395.744.681	42.024.006.500
	Jumlah penerimaan Pembiayaan	**82.371.738.181**	**124.395.744.681**	**42.024.006.500**
3.2	**Pengeluaran Pembiayaan**	**3.410.000.000**	**3.410.000.000**	-
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	3.355.000.000	3.355.000.000	
3.2.3	Pembayaran pokok utang	55.000.000	55.000.000	-
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	**3.410.000.000**	**3.410.000.000**	-

B. REKAPITULASI ANGGARAN SKPD RANCANGAN APBD 2014

NO.	SKPD	JUMLAH			
		R APBD 2014			
		PENDAPATAN	BELANJA		
			BELANJA TIDAK LANGSUNG	BELANJA LANGSUNG	JUMLAH
1	2	4	5	6	7
1	DINAS PENDIDIKAN		468.825.471.050	72.893.983.000	541.719.454.050
2	DINAS KESEHATAN	6.989.388.000	35.968.717.000	27.841.725.000	63.810.442.000
3	RSUD dr R. SOETRASNO	70.000.000.000	22.231.185.000	73.498.897.000	95.730.082.000
4	DINAS PEKERJAAN UMUM	1.105.000.000	12.505.495.000	127.521.885.800	140.027.380.800
5	BAPPEDA		2.806.543.000	7.481.000.000	10.287.543.000
6	DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.411.000.000	4.715.928.000	6.598.185.200	11.314.113.200
7	BADAN LINGKUNGAN HIDUP		2.142.915.000	2.693.683.000	4.836.598.000
8	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	465.000.000	2.176.211.000	1.849.689.000	4.025.900.000
9	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA		8.000.891.000	6.077.389.400	14.078.280.400
10	DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI		4.589.284.000	2.273.892.000	6.863.176.000
11	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UMKM	2.392.903.200	7.953.960.000	6.904.078.900	14.858.038.900
12	KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT		1.297.916.000	3.170.838.000	4.468.754.000
13	SATPOL PP		2.909.933.000	1.628.761.600	4.538.694.600
14	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		1.568.103.000	5.084.100.000	6.652.203.000
15	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH		7.291.862.000	-	7.291.862.000
16	BUPATI DAN WAKIL BUPATI		540.688.000	-	540.688.000
17	SETDA	2.086.775.000	11.724.103.000	26.005.625.000	37.729.728.000
a	SETDA (BAGIAN KEMASYARAKATAN)	21.000.000	-	7.160.000.000	7.160.000.000
b	SETDA (BAGIAN ORGANISASI KEPEGAWAIAN)		-	607.500.000	607.500.000
c	SETDA (BAGIAN ADM KEUANGAN)	90.000.000	11.724.103.000	3.641.000.000	15.365.103.000
d	SETDA (BAGIAN UMUM)		-	5.428.625.000	5.428.625.000
e	SETDA (BAGIAN HUMAS)	42.500.000	-	1.358.500.000	1.358.500.000
f	SETDA (BAGIAN TATA PEMERINTAHAN)		-	3.757.500.000	3.757.500.000
g	SETDA (BAGIAN HUKUM)		-	1.387.500.000	1.387.500.000
h	SETDA (BAGIAN ADM PEREKONOMIAN)	1.933.275.000	-	1.832.500.000	1.832.500.000
i	SETDA (BAGIAN ADM PEMBANGUNAN)		-	832.500.000	832.500.000
18	SEKRETARIAT DPRD		3.048.972.000	15.657.429.000	18.706.401.000
19	DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	1.023.730.237.769	77.634.015.000	11.369.577.000	89.003.592.000
a	(SKPD)	36.972.625.000	9.898.424.000	11.369.577.000	21.268.001.000
b	(PPKD)	986.757.612.769	67.735.591.000	-	67.735.591.000
20	INSPEKTORAT KABUPATEN		3.098.798.000	3.969.696.000	7.068.494.000
21	BKD		2.981.266.000	3.744.160.000	6.725.426.000
22	KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU		1.132.343.000	1.021.016.000	2.153.359.000
23	KECAMATAN REMBANG		4.515.581.000	424.391.000	4.939.972.000
24	KECAMATAN KALIORI		1.729.588.000	475.860.000	2.205.448.000
25	KECAMATAN SULANG		1.675.427.000	329.750.000	2.005.177.000
26	KECAMATAN SUMBER		1.509.683.000	252.880.000	1.762.563.000
27	KECAMATAN BULU		1.490.982.000	348.972.000	1.839.954.000
28	KECAMATAN LASEM		1.932.883.000	378.169.000	2.311.052.000
29	KECAMATAN PANCUR		1.991.501.000	389.200.000	2.380.701.000
30	KECAMATAN SLUKE		1.214.740.000	441.914.000	1.656.654.000
31	KECAMATAN PAMOTAN		1.417.718.000	252.744.000	1.670.462.000
32	KECAMATAN GUNEM		1.387.546.000	502.434.000	1.889.980.000
33	KECAMATAN SALE		1.247.913.000	633.100.000	1.881.013.000
34	KECAMATAN KRAGAN		1.687.533.000	348.405.000	2.035.938.000
35	KECAMATAN SEDAN		1.382.345.000	264.258.000	1.646.603.000
36	KECAMATAN SARANG		1.561.539.000	315.832.000	1.877.371.000
37	BADAN KETAHAN PANGAN DAN PELAKSANAAN PENYULUHAN PERTANIAN,PERIKANAN DAN KEHUTANAN		7.314.936.000	1.451.000.000	8.765.936.000
38	KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH		1.651.596.000	1.331.877.000	2.983.473.000
39	DINAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN	133.472.000	5.670.887.500	19.196.171.600	24.867.059.100
40	DINAS ESDM		2.186.993.000	8.089.610.000	10.276.603.000
41	DINAS KEBUDAYAAN,PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	996.000.000	2.390.194.000	4.994.800.000	7.384.994.000
42	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	11.298.110.000	3.764.587.000	19.993.874.100	23.758.461.100
	JUMLAH	**1.121.607.885.969**	**732.868.771.550**	**467.700.852.600**	**1.200.569.624.150**

B. REKAPITULASI ANGGARAN SKPD RANCANGAI

NO.	SKPD	PEMBAHASAN PERSETUJUAN			
		PENDAPATAN	BELANJA		
			BELANJA TIDAK LANGSUNG	BELANJA LANGSUNG	JUMLAH
1	2	8	9	10	11=9+10
1	DINAS PENDIDIKAN		497.092.999.700	60.824.766.100	557.917.765.800
2	DINAS KESEHATAN	9.489.388.000	35.968.717.000	31.937.740.000	67.906.457.000
3	RSUD dr R. SOETRASNO	70.000.000.000	22.231.185.000	75.498.897.000	97.730.082.000
4	DINAS PEKERJAAN UMUM	1.755.000.000	12.505.495.000	137.033.383.550	149.538.878.550
5	BAPPEDA		2.806.543.000	6.981.000.000	9.787.543.000
6	DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.511.000.000	4.715.928.000	6.648.185.200	11.364.113.200
7	BADAN LINGKUNGAN HIDUP		2.142.915.000	2.643.683.000	4.786.598.000
8	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	465.000.000	2.176.211.000	2.371.689.000	4.547.900.000
9	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA		8.000.891.000	5.891.389.400	13.892.280.400
10	DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI		4.589.284.000	2.073.892.000	6.663.176.000
11	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UMKM	2.392.903.200	7.953.960.000	6.754.078.900	14.708.038.900
12	KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT		1.297.916.000	3.220.838.000	4.518.754.000
13	SATPOL PP		2.909.933.000	1.478.761.600	4.388.694.600
14	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		1.568.103.000	5.384.100.000	6.952.203.000
15	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH		8.397.512.000	-	8.397.512.000
16	BUPATI DAN WAKIL BUPATI		540.688.000	-	540.688.000
17	SETDA	2.086.775.000	11.724.103.000	25.874.625.000	37.598.728.000
a	SETDA (BAGIAN KEMASYARAKATAN)	21.000.000	-	7.210.000.000	7.210.000.000
b	SETDA (BAGIAN ORGANISASI KEPEGAWAIAN)		-	557.500.000	557.500.000
c	SETDA (BAGIAN ADM KEUANGAN)	90.000.000	11.724.103.000	3.491.000.000	15.215.103.000
d	SETDA (BAGIAN UMUM)		-	5.028.625.000	5.028.625.000
e	SETDA (BAGIAN HUMAS)	42.500.000	-	1.658.500.000	1.658.500.000
f	SETDA (BAGIAN TATA PEMERINTAHAN)		-	4.181.500.000	4.181.500.000
g	SETDA (BAGIAN HUKUM)		-	1.337.500.000	1.337.500.000
h	SETDA (BAGIAN ADM PEREKONOMIAN)	1.933.275.000	-	1.627.500.000	1.627.500.000
i	SETDA (BAGIAN ADM PEMBANGUNAN)		-	782.500.000	782.500.000
18	SEKRETARIAT DPRD		3.190.092.000	15.601.313.000	18.791.405.000
19	DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	1.024.965.237.769	80.712.880.000	11.604.577.000	92.317.457.000
a	(SKPD)	38.207.625.000	9.898.424.000	11.604.577.000	21.503.001.000
b	(PPKD)	986.757.612.769	70.814.456.000	-	70.814.456.000
20	INSPEKTORAT KABUPATEN		3.098.798.000	3.969.696.000	7.068.494.000
21	BKD		2.981.266.000	3.794.160.000	6.775.426.000
22	KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU		1.132.343.000	971.016.000	2.103.359.000
23	KECAMATAN REMBANG		4.515.581.000	424.391.000	4.939.972.000
24	KECAMATAN KALIORI		1.729.588.000	475.860.000	2.205.448.000
25	KECAMATAN SULANG		1.675.427.000	329.750.000	2.005.177.000
26	KECAMATAN SUMBER		1.509.683.000	252.880.000	1.762.563.000
27	KECAMATAN BULU		1.490.982.000	348.972.000	1.839.954.000
28	KECAMATAN LASEM		1.932.883.000	378.169.000	2.311.052.000
29	KECAMATAN PANCUR		1.991.501.000	389.200.000	2.380.701.000
30	KECAMATAN SLUKE		1.214.740.000	441.914.000	1.656.654.000
31	KECAMATAN PAMOTAN		1.417.718.000	252.744.000	1.670.462.000
32	KECAMATAN GUNEM		1.387.546.000	502.434.000	1.889.980.000
33	KECAMATAN SALE		1.247.913.000	633.100.000	1.881.013.000
34	KECAMATAN KRAGAN		1.687.533.000	348.405.000	2.035.938.000
35	KECAMATAN SEDAN		1.382.345.000	264.258.000	1.646.603.000
36	KECAMATAN SARANG		1.561.539.000	315.832.000	1.877.371.000
37	BADAN KETAHAN PANGAN DAN PELAKSANAAN PENYULUHAN PERTANIAN,PERIKANAN DAN KEHUTANAN		7.314.936.000	1.551.000.000	8.865.936.000
38	KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH		1.651.596.000	1.281.877.000	2.933.473.000
39	DINAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN	133.472.000	5.670.887.500	20.938.053.600	26.608.941.100
40	DINAS ESDM		2.186.993.000	11.493.631.000	13.680.624.000
41	DINAS KEBUDAYAAN,PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	996.000.000	2.390.194.000	5.135.450.000	7.525.644.000
42	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	11.954.000.000	3.764.587.000	25.956.874.100	29.721.461.100
	JUMLAH	1.126.748.775.969	765.461.935.200	482.272.585.450	1.247.734.520.650

B. REKAPITULASI ANGGARAN SKPD RANCANGAI

NO.	SKPD	PEMBAHASAN			
		BERTAMBAH (BERKURANG)			
		PENDAPATAN	BELANJA		
			BELANJA TIDAK LANGSUNG	BELANJA LANGSUNG	JUMLAH
1	2	12=8-4	13=9-5	14=10-6	15=13+14
1	DINAS PENDIDIKAN	-	28.267.528.650	(12.069.216.900)	16.198.311.750
2	DINAS KESEHATAN	2.500.000.000	-	4.096.015.000	4.096.015.000
3	RSUD dr R. SOETRASNO	-	-	2.000.000.000	2.000.000.000
4	DINAS PEKERJAAN UMUM	650.000.000	-	9.511.497.750	9.511.497.750
5	BAPPEDA	-	-	(500.000.000)	(500.000.000)
6	DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	100.000.000	-	50.000.000	50.000.000
7	BADAN LINGKUNGAN HIDUP	-	-	(50.000.000)	(50.000.000)
8	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	-	-	522.000.000	522.000.000
9	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA	-	-	(186.000.000)	(186.000.000)
10	DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	-	-	(200.000.000)	(200.000.000)
11	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UMKM	-	-	(150.000.000)	(150.000.000)
12	KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	-	-	50.000.000	50.000.000
13	SATPOL PP	-	-	(150.000.000)	(150.000.000)
14	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	-	-	300.000.000	300.000.000
15	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	-	1.105.650.000	-	1.105.650.000
16	BUPATI DAN WAKIL BUPATI	-	-	-	-
17	SETDA	-	-	(131.000.000)	(131.000.000)
a	SETDA (BAGIAN KEMASYARAKATAN)	-	-	50.000.000	50.000.000
b	SETDA (BAGIAN ORGANISASI KEPEGAWAIAN)	-	-	(50.000.000)	(50.000.000)
c	SETDA (BAGIAN ADM KEUANGAN)	-	-	(150.000.000)	(150.000.000)
d	SETDA (BAGIAN UMUM)	-	-	(400.000.000)	(400.000.000)
e	SETDA (BAGIAN HUMAS)	-	-	300.000.000	300.000.000
f	SETDA (BAGIAN TATA PEMERINTAHAN)	-	-	424.000.000	424.000.000
g	SETDA (BAGIAN HUKUM)	-	-	(50.000.000)	(50.000.000)
h	SETDA (BAGIAN ADM PEREKONOMIAN)	-	-	(205.000.000)	(205.000.000)
i	SETDA (BAGIAN ADM PEMBANGUNAN)	-	-	(50.000.000)	(50.000.000)
18	SEKRETARIAT DPRD	-	141.120.000	(56.116.000)	85.004.000
19	DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	1.235.000.000	3.078.865.000	235.000.000	3.313.865.000
a	(SKPD)	1.235.000.000	-	235.000.000	235.000.000
b	(PPKD)	-	3.078.865.000	-	3.078.865.000
20	INSPEKTORAT KABUPATEN	-	-	-	-
21	BKD	-	-	50.000.000	50.000.000
22	KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU	-	-	(50.000.000)	(50.000.000)
23	KECAMATAN REMBANG	-	-	-	-
24	KECAMATAN KALIORI	-	-	-	-
25	KECAMATAN SULANG	-	-	-	-
26	KECAMATAN SUMBER	-	-	-	-
27	KECAMATAN BULU	-	-	-	-
28	KECAMATAN LASEM	-	-	-	-
29	KECAMATAN PANCUR	-	-	-	-
30	KECAMATAN SLUKE	-	-	-	-
31	KECAMATAN PAMOTAN	-	-	-	-
32	KECAMATAN GUNEM	-	-	-	-
33	KECAMATAN SALE	-	-	-	-
34	KECAMATAN KRAGAN	-	-	-	-
35	KECAMATAN SEDAN	-	-	-	-
36	KECAMATAN SARANG	-	-	-	-
37	BADAN KETAHAN PANGAN DAN PELAKSANAAN PENYULUHAN PERTANIAN,PERIKANAN DAN KEHUTANAN	-	-	100.000.000	100.000.000
38	KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	-	-	(50.000.000)	(50.000.000)
39	DINAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN	-	-	1.741.882.000	1.741.882.000
40	DINAS ESDM	-	-	3.404.021.000	3.404.021.000
41	DINAS KEBUDAYAAN,PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	-	-	140.650.000	140.650.000
42	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	655.890.000	-	5.963.000.000	5.963.000.000
	JUMLAH	5.140.890.000	32.593.163.650	14.571.732.850	47.164.896.500

REKAPITULASI PENDAPATAN ASLI DAERAH
PER SKPD

NO	SKPD	HASAN				
		BERTAMBAH(BERKURANG)				
		Hasil Pajak Daerah	Hasil Retribusi Daerah	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	JUMLAH
1	2	13=8-3	14=9-4	15=10-5	16=11-6	17=13+14+15+16
1	DINAS KESEHATAN	-	2,500,000,000	-	-	2,500,000,000
2	RSU R. SOETRASNO	-	-	-	-	-
3	DINAS PEKERJAAN UMUM	-	650,000,000	-	-	650,000,000
4	DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	-	100,000,000	-	-	100,000,000
5	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	-	-	-	-	-
6	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UMKM	-	-	-	-	-
7	SEKRETARIAT DAERAH	-	-	-	-	-
	Bag. Administrasi Keuangan	-	-	-	-	-
	Bag. Administrasi Perekonomian	-	-	-	-	-
	Bag. Kesejahteraan Rakyat	-	-	-	-	-
	Bag. Humas	-	-	-	-	-
8	DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (SKPD)	1,235,000,000	-	-	-	1,235,000,000
9	DINAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN	-	-	-	-	-
10	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	-	-	-	-	-
11	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	-	655,890,000	-	-	655,890,000
	JUMLAH	**1,235,000,000**	**3,905,890,000**	-	-	**5,140,890,000**

REKAPITULASI PENDAPATAN ASLI DAERAH
PER SKPD

NO	SKPD	JUMLAH				
		R APBD 2014				
		Hasil Pajak Daerah	Hasil Retribusi Daerah	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7=+3+4+5+6
1	DINAS KESEHATAN		6,989,388,000			6,989,388,000
2	RSU R. SOETRASNO				70,000,000,000	70,000,000,000
3	DINAS PEKERJAAN UMUM		1,085,000,000		20,000,000	1,105,000,000
4	DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		2,408,432,000		2,568,000	2,411,000,000
5	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		340,000,000		125,000,000	465,000,000
6	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UMKM		2,387,260,000		5,643,200	2,392,903,200
7	SEKRETARIAT DAERAH	-	153,500,000	1,933,275,000	-	2,086,775,000
	Bag. Administrasi Keuangan		90,000,000			90,000,000
	Bag. Administrasi Perekonomian			1,933,275,000		1,933,275,000
	Bag. Kesejahteraan Rakyat		21,000,000			21,000,000
	Bag. Humas		42,500,000			42,500,000
8	DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (SKPD)	29,982,000,000	240,625,000	1,750,000,000	5,000,000,000	36,972,625,000
9	DINAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN		133,472,000			133,472,000
10	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA		996,000,000		-	996,000,000
11	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN		11,253,110,000		45,000,000	11,298,110,000
	JUMLAH	**29,982,000,000**	**25,986,787,000**	**3,683,275,000**	**75,198,211,200**	**134,850,273,200**

REKAPITULASI PENDAPATAN ASLI DAERAH
PER SKPD

NO	SKPD	PROYEKSI PENDAPATAN ASLI DAERAH				
						PEMBA
		PERSETUJUAN				
		Hasil Pajak Daerah	Hasil Retribusi Daerah	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	JUMLAH
1	2	8	9	10	11	12=8+9+10+11
1	DINAS KESEHATAN		9,489,388,000			9,489,388,000
2	RSU R. SOETRASNO				70,000,000,000	70,000,000,000
3	DINAS PEKERJAAN UMUM		1,735,000,000		20,000,000	1,755,000,000
4	DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		2,508,432,000		2,568,000	2,511,000,000
5	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		340,000,000		125,000,000	465,000,000
6	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UMKM		2,387,260,000		5,643,200	2,392,903,200
7	SEKRETARIAT DAERAH	-	153,500,000	1,933,275,000	-	2,086,775,000
	Bag. Administrasi Keuangan		90,000,000			90,000,000
	Bag. Administrasi Perekonomian			1,933,275,000		1,933,275,000
	Bag. Kesejahteraan Rakyat		21,000,000			21,000,000
	Bag. Humas		42,500,000			42,500,000
8	DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (SKPD)	31,217,000,000	240,625,000	1,750,000,000	5,000,000,000	38,207,625,000
9	DINAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN		133,472,000			133,472,000
10	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA		996,000,000		-	996,000,000
11	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN		11,909,000,000		45,000,000	11,954,000,000
	JUMLAH	**31,217,000,000**	**29,892,677,000**	**3,683,275,000**	**75,198,211,200**	**139,991,163,200**

BELANJA
REKAPITULASI BELANJA TIDAK LANGSUNG

NO.	SKPD	JUMLAH (Rp)						
		R APBD 2014						
		Belanja Pegawai	Belanja Bunga	Belanja Hibah	Belanja Bantuan Sosial	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	Belanja Tidak Terduga	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 3+4+5+6+7+8
1	DINAS PENDIDIKAN	468,825,471,050						468,825,471,050
2	DINAS KESEHATAN	35,968,717,000						35,968,717,000
3	RSUD dr R. SOETRASNO	22,231,185,000						22,231,185,000
4	DINAS PEKERJAAN UMUM	12,505,495,000						12,505,495,000
5	BAPPEDA	2,806,543,000						2,806,543,000
6	DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	4,715,928,000						4,715,928,000
7	BADAN LINGKUNGAN HIDUP	2,142,915,000						2,142,915,000
8	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	2,176,211,000						2,176,211,000
9	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA	8,000,891,000						8,000,891,000
10	DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	4,589,284,000						4,589,284,000
11	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UMKM	7,953,960,000						7,953,960,000
12	KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1,297,916,000						1,297,916,000
13	SATPOL PP	2,909,933,000						2,909,933,000
14	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	1,568,103,000						1,568,103,000
15	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	7,291,862,000						7,291,862,000
16	BUPATI DAN WAKIL BUPATI	540,688,000						540,688,000
17	SETDA	11,724,103,000	-	-	-	-	-	11,724,103,000
a	SETDA (BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT)							-
b	SETDA (BAGIAN ORGANISASI KEPEGAWAIAN)							-
c	SETDA (BAGIAN ADM KEUANGAN)	11,724,103,000						11,724,103,000
d	SETDA (BAGIAN UMUM)							-
e	SETDA (BAGIAN HUMAS)							-
f	SETDA (BAGIAN TATA PEMERINTAHAN)							-
g	SETDA (BAGIAN HUKUM)							-
h	SETDA (BAGIAN ADM PEREKONOMIAN)							-
i	SETDA (BAGIAN ADM PEMBANGUNAN)							-
18	SEKRETARIAT DPRD	3,048,972,000						3,048,972,000
19	DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	9,898,424,000	37,000,000	24,893,391,000	5,823,000,000	35,982,200,000	1,000,000,000	77,634,015,000
a	(SKPD)	9,898,424,000						9,898,424,000
b	(PPKD)		37,000,000	24,893,391,000	5,823,000,000	35,982,200,000	1,000,000,000	67,735,591,000
20	INSPEKTORAT KABUPATEN	3,098,798,000						3,098,798,000
21	BKD	2,981,266,000						2,981,266,000
22	KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU	1,132,343,000						1,132,343,000
23	KECAMATAN REMBANG	4,515,581,000						4,515,581,000
24	KECAMATAN KALIORI	1,729,588,000						1,729,588,000
25	KECAMATAN SULANG	1,675,427,000						1,675,427,000
26	KECAMATAN SUMBER	1,509,683,000						1,509,683,000
27	KECAMATAN BULU	1,490,982,000						1,490,982,000
28	KECAMATAN LASEM	1,932,883,000						1,932,883,000
29	KECAMATAN PANCUR	1,991,501,000						1,991,501,000
30	KECAMATAN SLUKE	1,214,740,000						1,214,740,000
31	KECAMATAN PAMOTAN	1,417,718,000						1,417,718,000
32	KECAMATAN GUNEM	1,387,546,000						1,387,546,000
33	KECAMATAN SALE	1,247,913,000						1,247,913,000
34	KECAMATAN KRAGAN	1,687,533,000						1,687,533,000
35	KECAMATAN SEDAN	1,382,345,000						1,382,345,000
36	KECAMATAN SARANG	1,561,539,000						1,561,539,000
37	BADAN KETAHAN PANGAN DAN PELAKSANAAN PENYULUHAN PERTANIAN,PERIKANAN DAN KEHUTANAN	7,314,936,000						7,314,936,000
38	KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP	1,651,596,000						1,651,596,000
39	DINAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN	5,670,887,500						5,670,887,500
40	DINAS ESDM	2,186,993,000						2,186,993,000
41	DINAS KEBUDAYAAN,PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	2,390,194,000						2,390,194,000
42	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	3,764,587,000						3,764,587,000
	JUMLAH	*665,133,180,550*	*37,000,000*	*24,893,391,000*	*5,823,000,000*	*35,982,200,000*	*1,000,000,000*	*732,868,771,550*

BELANJA

REKAPITULASI BELANJA TIDAK LANGS

NO.	SKPD	PEMBAHASAN						
		PERSETUJUAN						
		Belanja Pegawai	Belanja Bunga	Belanja Hibah	Belanja Bantuan Sosial	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	Belanja Tidak Terduga	JUMLAH
1	2	10	11	12	13	14	15	16 = 10+11+12+13+14+15
1	DINAS PENDIDIKAN	497,092,999,700						497,092,999,700
2	DINAS KESEHATAN	35,968,717,000						35,968,717,000
3	RSUD dr R. SOETRASNO	22,231,185,000						22,231,185,000
4	DINAS PEKERJAAN UMUM	12,505,495,000						12,505,495,000
5	BAPPEDA	2,806,543,000						2,806,543,000
6	DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	4,715,928,000						4,715,928,000
7	BADAN LINGKUNGAN HIDUP	2,142,915,000						2,142,915,000
8	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	2,176,211,000						2,176,211,000
9	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA	8,000,891,000						8,000,891,000
10	DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	4,589,284,000						4,589,284,000
11	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UMKM	7,953,960,000						7,953,960,000
12	KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1,297,916,000						1,297,916,000
13	SATPOL PP	2,909,933,000						2,909,933,000
14	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	1,568,103,000						1,568,103,000
15	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	8,397,512,000						8,397,512,000
16	BUPATI DAN WAKIL BUPATI	540,688,000						540,688,000
17	SETDA	11,724,103,000	-	-	-	-	-	11,724,103,000
a	SETDA (BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT)							-
b	SETDA (BAGIAN ORGANISASI KEPEGAWAIAN)							-
c	SETDA (BAGIAN ADM KEUANGAN)	11,724,103,000						11,724,103,000
d	SETDA (BAGIAN UMUM)							-
e	SETDA (BAGIAN HUMAS)							-
f	SETDA (BAGIAN TATA PEMERINTAHAN)							-
g	SETDA (BAGIAN HUKUM)							-
h	SETDA (BAGIAN ADM PEREKONOMIAN)							-
i	SETDA (BAGIAN ADM PEMBANGUNAN)							-
18	SEKRETARIAT DPRD	3,190,092,000						3,190,092,000
19	DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	9,898,424,000	37,000,000	30,432,731,000	3,976,525,000	35,368,200,000	1,000,000,000	80,712,880,000
a	(SKPD)	9,898,424,000						9,898,424,000
b	(PPKD)		37,000,000	30,432,731,000	3,976,525,000	35,368,200,000	1,000,000,000	70,814,456,000
20	INSPEKTORAT KABUPATEN	3,098,798,000						3,098,798,000
21	BKD	2,981,266,000						2,981,266,000
22	KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU	1,132,343,000						1,132,343,000
23	KECAMATAN REMBANG	4,515,581,000						4,515,581,000
24	KECAMATAN KALIORI	1,729,588,000						1,729,588,000
25	KECAMATAN SULANG	1,675,427,000						1,675,427,000
26	KECAMATAN SUMBER	1,509,683,000						1,509,683,000
27	KECAMATAN BULU	1,490,982,000						1,490,982,000
28	KECAMATAN LASEM	1,932,883,000						1,932,883,000
29	KECAMATAN PANCUR	1,991,501,000						1,991,501,000
30	KECAMATAN SLUKE	1,214,740,000						1,214,740,000
31	KECAMATAN PAMOTAN	1,417,718,000						1,417,718,000
32	KECAMATAN GUNEM	1,387,546,000						1,387,546,000
33	KECAMATAN SALE	1,247,913,000						1,247,913,000
34	KECAMATAN KRAGAN	1,687,533,000						1,687,533,000
35	KECAMATAN SEDAN	1,382,345,000						1,382,345,000
36	KECAMATAN SARANG	1,561,539,000						1,561,539,000
37	BADAN KETAHAN PANGAN DAN PELAKSANAAN PENYULUHAN PERTANIAN,PERIKANAN DAN KEHUTANAN	7,314,936,000						7,314,936,000
38	KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP	1,651,596,000						1,651,596,000
39	DINAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN	5,670,887,500						5,670,887,500
40	DINAS ESDM	2,186,993,000						2,186,993,000
41	DINAS KEBUDAYAAN,PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	2,390,194,000						2,390,194,000
42	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	3,764,587,000						3,764,587,000
	JUMLAH	694,647,479,200	37,000,000	30,432,731,000	3,976,525,000	35,368,200,000	1,000,000,000	765,461,935,200

BELANJA

REKAPITULASI BELANJA TIDAK LANGS

NO.	SKPD	PEMBAHASAN						
		BERTAMBAH (BERKURANG)						
		Belanja Pegawai	Belanja Bunga	Belanja Hibah	Belanja Bantuan Sosial	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	Belanja Tidak Terduga	JUMLAH
1	2	17 = 10-3	18 = 11-4	19 = 12-5	20 = 13-6	21 = 14-7	22 = 15-8	23 = 17+18+19+20+21+22
1	DINAS PENDIDIKAN	28,267,528,650	-	-	-	-	-	28,267,528,650
2	DINAS KESEHATAN	-	-	-	-	-	-	-
3	RSUD dr R. SOETRASNO	-	-	-	-	-	-	-
4	DINAS PEKERJAAN UMUM	-	-	-	-	-	-	-
5	BAPPEDA	-	-	-	-	-	-	-
6	DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	-	-	-	-	-	-	-
7	BADAN LINGKUNGAN HIDUP	-	-	-	-	-	-	-
8	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	-	-	-	-	-	-	-
9	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA	-	-	-	-	-	-	-
10	DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	-	-	-	-	-	-	-
11	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UMKM	-	-	-	-	-	-	-
12	KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	-	-	-	-	-	-	-
13	SATPOL PP	-	-	-	-	-	-	-
14	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	-	-	-	-	-	-	-
15	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	1,105,650,000	-	-	-	-	-	1,105,650,000
16	BUPATI DAN WAKIL BUPATI	-	-	-	-	-	-	-
17	SETDA	-	-	-	-	-	-	-
a	SETDA (BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT)	-	-	-	-	-	-	-
b	SETDA (BAGIAN ORGANISASI KEPEGAWAIAN)	-	-	-	-	-	-	-
c	SETDA (BAGIAN ADM KEUANGAN)	-	-	-	-	-	-	-
d	SETDA (BAGIAN UMUM)	-	-	-	-	-	-	-
e	SETDA (BAGIAN HUMAS)	-	-	-	-	-	-	-
f	SETDA (BAGIAN TATA PEMERINTAHAN)	-	-	-	-	-	-	-
g	SETDA (BAGIAN HUKUM)	-	-	-	-	-	-	-
h	SETDA (BAGIAN ADM PEREKONOMIAN)	-	-	-	-	-	-	-
i	SETDA (BAGIAN ADM PEMBANGUNAN)	-	-	-	-	-	-	-
18	SEKRETARIAT DPRD	141,120,000	-	-	-	-	-	141,120,000
19	DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	-	-	5,539,340,000	(1,846,475,000)	(614,000,000)	-	3,078,865,000
a	(SKPD)	-	-	-	-	-	-	-
b	(PPKD)	-	-	5,539,340,000	(1,846,475,000)	(614,000,000)	-	3,078,865,000
20	INSPEKTORAT KABUPATEN	-	-	-	-	-	-	-
21	BKD	-	-	-	-	-	-	-
22	KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU	-	-	-	-	-	-	-
23	KECAMATAN REMBANG	-	-	-	-	-	-	-
24	KECAMATAN KALIORI	-	-	-	-	-	-	-
25	KECAMATAN SULANG	-	-	-	-	-	-	-
26	KECAMATAN SUMBER	-	-	-	-	-	-	-
27	KECAMATAN BULU	-	-	-	-	-	-	-
28	KECAMATAN LASEM	-	-	-	-	-	-	-
29	KECAMATAN PANCUR	-	-	-	-	-	-	-
30	KECAMATAN SLUKE	-	-	-	-	-	-	-
31	KECAMATAN PAMOTAN	-	-	-	-	-	-	-
32	KECAMATAN GUNEM	-	-	-	-	-	-	-
33	KECAMATAN SALE	-	-	-	-	-	-	-
34	KECAMATAN KRAGAN	-	-	-	-	-	-	-
35	KECAMATAN SEDAN	-	-	-	-	-	-	-
36	KECAMATAN SARANG	-	-	-	-	-	-	-
37	BADAN KETAHAN PANGAN DAN PELAKSANAAN PENYULUHAN PERTANIAN,PERIKANAN DAN KEHUTANAN	-	-	-	-	-	-	-
38	KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP	-	-	-	-	-	-	-
39	DINAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN	-	-	-	-	-	-	-
40	DINAS ESDM	-	-	-	-	-	-	-
41	DINAS KEBUDAYAAN,PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	-	-	-	-	-	-	-
42	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	-	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH	29,514,298,650	-	5,539,340,000	(1,846,475,000)	(614,000,000)	-	32,593,163,650

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG

NO.	SKPD	JUMLAH (Rp)			
		R APBD 2014			
		Belanja Pegawai	Belanja Barang Jasa	Belanja Modal	JUMLAH
1	2	3	4	5	6 = 3+4+5
1	DINAS PENDIDIKAN	5,878,768,000	7,307,023,000	59,708,192,000	72,893,983,000
2	DINAS KESEHATAN	4,979,224,000	13,163,704,000	9,698,797,000	27,841,725,000
3	RSUD dr R. SOETRASNO	27,815,054,000	38,112,094,000	7,571,749,000	73,498,897,000
4	DINAS PEKERJAAN UMUM	2,866,643,200	69,480,980,400	55,174,262,200	127,521,885,800
5	BAPPEDA	2,342,465,000	4,692,122,000	446,413,000	7,481,000,000
6	DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	1,003,890,000	2,410,370,000	3,183,925,200	6,598,185,200
7	BADAN LINGKUNGAN HIDUP	469,120,000	1,924,545,000	300,018,000	2,693,683,000
8	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	693,910,000	961,523,100	194,255,900	1,849,689,000
9	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA	1,675,503,000	3,729,521,400	672,365,000	6,077,389,400
10	DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	524,795,000	1,430,397,000	318,700,000	2,273,892,000
11	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UMKM	751,795,000	2,461,665,900	3,690,618,000	6,904,078,900
12	KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1,941,280,000	1,186,358,000	43,200,000	3,170,838,000
13	SATPOL PP	775,076,600	774,896,000	78,789,000	1,628,761,600
14	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	564,800,000	2,183,570,000	2,335,730,000	5,084,100,000
15	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	-	-	-	-
16	BUPATI DAN WAKIL BUPATI	-	-	-	-
17	SETDA	8,986,275,000	14,248,374,000	2,770,976,000	26,005,625,000
a	SETDA (BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT)	4,826,660,000	2,273,090,000	60,250,000	7,160,000,000
b	SETDA (BAGIAN ORGANISASI KEPEGAWAIAN)	253,700,000	337,400,000	16,400,000	607,500,000
c	SETDA (BAGIAN ADM KEUANGAN)	1,097,700,000	2,541,554,000	1,746,000	3,641,000,000
d	SETDA (BAGIAN UMUM)	179,800,000	3,498,825,000	1,750,000,000	5,428,625,000
e	SETDA (BAGIAN HUMAS)	302,260,000	818,469,000	237,771,000	1,358,500,000
f	SETDA (BAGIAN TATA PEMERINTAHAN)	708,875,000	2,482,400,000	566,225,000	3,757,500,000
g	SETDA (BAGIAN HUKUM)	472,340,000	894,810,000	20,350,000	1,387,500,000
h	SETDA (BAGIAN ADM PEREKONOMIAN)	700,365,000	1,066,951,000	65,184,000	1,832,500,000
i	SETDA (BAGIAN ADM PEMBANGUNAN)	444,575,000	334,875,000	53,050,000	832,500,000
18	SEKRETARIAT DPRD	2,278,989,000	12,535,848,000	842,592,000	15,657,429,000
19	DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	3,228,220,000	5,168,949,000	2,972,408,000	11,369,577,000
a	(SKPD)	3,228,220,000	5,168,949,000	2,972,408,000	11,369,577,000
b	(PPKD)				-
20	INSPEKTORAT KABUPATEN	1,734,903,000	2,095,118,000	139,675,000	3,969,696,000
21	BKD	906,200,000	2,694,810,000	143,150,000	3,744,160,000
22	KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU	336,070,000	621,245,360	63,700,640	1,021,016,000
23	KECAMATAN REMBANG	110,082,000	241,806,000	72,503,000	424,391,000
24	KECAMATAN KALIORI	55,914,000	192,676,000	227,270,000	475,860,000
25	KECAMATAN SULANG	106,980,000	182,020,000	40,750,000	329,750,000
26	KECAMATAN SUMBER	88,270,000	149,210,000	15,400,000	252,880,000
27	KECAMATAN BULU	63,925,000	124,869,000	160,178,000	348,972,000
28	KECAMATAN LASEM	84,449,000	231,970,000	61,750,000	378,169,000
29	KECAMATAN PANCUR	126,350,000	211,300,000	51,550,000	389,200,000
30	KECAMATAN SLUKE	125,525,000	192,208,000	124,181,000	441,914,000
31	KECAMATAN PAMOTAN	60,990,000	165,254,000	26,500,000	252,744,000
32	KECAMATAN GUNEM	125,990,000	340,844,000	35,600,000	502,434,000
33	KECAMATAN SALE	128,505,000	168,835,000	335,760,000	633,100,000
34	KECAMATAN KRAGAN	99,746,800	217,158,200	31,500,000	348,405,000
35	KECAMATAN SEDAN	100,260,000	129,798,000	34,200,000	264,258,000
36	KECAMATAN SARANG	73,690,000	200,642,000	41,500,000	315,832,000
37	BADAN KETAHAN PANGAN DAN PELAKSANAAN PENYULUHAN PERTANIAN,PERIKANAN DAN KEHUTANAN	380,550,000	913,830,000	156,620,000	1,451,000,000
38	KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP	285,516,000	537,611,000	508,750,000	1,331,877,000
39	DINAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN	1,671,228,000	16,873,036,600	651,907,000	19,196,171,600
40	DINAS ESDM	550,506,000	6,920,985,300	618,118,700	8,089,610,000
41	DINAS KEBUDAYAAN,PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	1,120,870,000	2,314,312,000	1,559,618,000	4,994,800,000
42	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	2,145,280,000	3,449,145,000	14,399,449,100	19,993,874,100
	JUMLAH	**77,257,607,600**	**220,940,624,260**	**169,502,620,740**	**467,700,852,600**

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG

NO.	SKPD	PEMBA			
		PERSETUJUAN			
		Belanja Pegawai	Belanja Barang Jasa	Belanja Modal	JUMLAH
1	2	7	8	9	10 = 7+ 8 + 9
1	DINAS PENDIDIKAN	5,282,033,000	8,001,871,300	47,540,861,800	60,824,766,100
2	DINAS KESEHATAN	5,036,309,000	12,799,969,000	14,101,462,000	31,937,740,000
3	RSUD dr R. SOETRASNO	27,815,054,000	38,112,094,000	9,571,749,000	75,498,897,000
4	DINAS PEKERJAAN UMUM	2,579,443,200	79,470,917,800	54,983,022,550	137,033,383,550
5	BAPPEDA	2,040,990,000	4,534,460,000	405,550,000	6,981,000,000
6	DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	1,055,490,000	2,807,770,000	2,784,925,200	6,648,185,200
7	BADAN LINGKUNGAN HIDUP	412,395,000	1,910,645,000	320,643,000	2,643,683,000
8	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	668,271,000	1,522,946,600	180,471,400	2,371,689,000
9	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA	1,598,793,000	3,614,731,400	677,865,000	5,891,389,400
10	DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	526,295,000	1,228,897,000	318,700,000	2,073,892,000
11	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UMKM	728,695,000	2,339,065,900	3,686,318,000	6,754,078,900
12	KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1,932,780,000	1,244,858,000	43,200,000	3,220,838,000
13	SATPOL PP	711,316,600	688,656,000	78,789,000	1,478,761,600
14	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	606,850,000	2,216,520,000	2,560,730,000	5,384,100,000
15	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	-	-	-	-
16	BUPATI DAN WAKIL BUPATI	-	-	-	-
17	SETDA	8,920,875,000	14,453,882,000	2,499,868,000	25,874,625,000
a	SETDA (BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT)	4,826,660,000	2,273,090,000	110,250,000	7,210,000,000
b	SETDA (BAGIAN ORGANISASI KEPEGAWAIAN)	220,300,000	320,800,000	16,400,000	557,500,000
c	SETDA (BAGIAN ADM KEUANGAN)	1,097,700,000	2,391,554,000	1,746,000	3,491,000,000
d	SETDA (BAGIAN UMUM)	179,100,000	3,449,525,000	1,400,000,000	5,028,625,000
e	SETDA (BAGIAN HUMAS)	336,010,000	1,084,719,000	237,771,000	1,658,500,000
f	SETDA (BAGIAN TATA PEMERINTAHAN)	759,530,000	2,797,120,000	624,850,000	4,181,500,000
g	SETDA (BAGIAN HUKUM)	471,165,000	845,985,000	20,350,000	1,337,500,000
h	SETDA (BAGIAN ADM PEREKONOMIAN)	591,835,000	990,134,000	45,531,000	1,627,500,000
i	SETDA (BAGIAN ADM PEMBANGUNAN)	438,575,000	300,955,000	42,970,000	782,500,000
18	SEKRETARIAT DPRD	1,854,639,000	12,830,645,000	916,029,000	15,601,313,000
19	DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	3,458,470,000	5,173,699,000	2,972,408,000	11,604,577,000
a	(SKPD)	3,458,470,000	5,173,699,000	2,972,408,000	11,604,577,000
b	(PPKD)				-
20	INSPEKTORAT KABUPATEN	1,764,703,000	2,065,318,000	139,675,000	3,969,696,000
21	BKD	1,027,100,000	2,393,671,000	373,389,000	3,794,160,000
22	KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU	309,920,000	607,895,360	53,200,640	971,016,000
23	KECAMATAN REMBANG	110,082,000	241,806,000	72,503,000	424,391,000
24	KECAMATAN KALIORI	55,914,000	192,676,000	227,270,000	475,860,000
25	KECAMATAN SULANG	106,980,000	182,020,000	40,750,000	329,750,000
26	KECAMATAN SUMBER	88,270,000	149,210,000	15,400,000	252,880,000
27	KECAMATAN BULU	63,925,000	124,869,000	160,178,000	348,972,000
28	KECAMATAN LASEM	84,449,000	231,970,000	61,750,000	378,169,000
29	KECAMATAN PANCUR	126,350,000	211,300,000	51,550,000	389,200,000
30	KECAMATAN SLUKE	135,525,000	192,208,000	114,181,000	441,914,000
31	KECAMATAN PAMOTAN	60,990,000	172,504,000	19,250,000	252,744,000
32	KECAMATAN GUNEM	125,990,000	340,844,000	35,600,000	502,434,000
33	KECAMATAN SALE	128,505,000	168,835,000	335,760,000	633,100,000
34	KECAMATAN KRAGAN	99,746,800	217,158,200	31,500,000	348,405,000
35	KECAMATAN SEDAN	100,260,000	129,798,000	34,200,000	264,258,000
36	KECAMATAN SARANG	73,690,000	200,642,000	41,500,000	315,832,000
37	BADAN KETAHAN PANGAN DAN PELAKSANAAN PENYULUHAN PERTANIAN,PERIKANAN DAN KEHUTANAN	369,925,000	1,074,455,000	106,620,000	1,551,000,000
38	KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP	233,646,000	523,931,000	524,300,000	1,281,877,000
39	DINAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN	1,557,439,500	18,716,457,100	664,157,000	20,938,053,600
40	DINAS ESDM	523,749,000	6,604,999,300	4,364,882,700	11,493,631,000
41	DINAS KEBUDAYAAN,PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	1,159,400,000	2,429,150,000	1,546,900,000	5,135,450,000
42	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	2,215,224,000	4,510,751,000	19,230,899,100	25,956,874,100
	JUMLAH	**75,750,482,100**	**234,634,095,960**	**171,888,007,390**	**482,272,585,450**

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG

NO.	SKPD	HASAN			
		BERTAMBAH (BERKURANG)			
		Belanja Pegawai	Belanja Barang Jasa	Belanja Modal	JUMLAH
1	2	11 = 7 - 3	12 = 8 - 4	13 = 9 - 5	14 = 11+12+13
1	DINAS PENDIDIKAN	(596,735,000)	694,848,300	(12,167,330,200)	(12,069,216,900)
2	DINAS KESEHATAN	57,085,000	(363,735,000)	4,402,665,000	4,096,015,000
3	RSUD dr R. SOETRASNO	-	-	2,000,000,000	2,000,000,000
4	DINAS PEKERJAAN UMUM	(287,200,000)	9,989,937,400	(191,239,650)	9,511,497,750
5	BAPPEDA	(301,475,000)	(157,662,000)	(40,863,000)	(500,000,000)
6	DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	51,600,000	397,400,000	(399,000,000)	50,000,000
7	BADAN LINGKUNGAN HIDUP	(56,725,000)	(13,900,000)	20,625,000	(50,000,000)
8	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	(25,639,000)	561,423,500	(13,784,500)	522,000,000
9	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA	(76,710,000)	(114,790,000)	5,500,000	(186,000,000)
10	DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	1,500,000	(201,500,000)	-	(200,000,000)
11	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UMKM	(23,100,000)	(122,600,000)	(4,300,000)	(150,000,000)
12	KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	(8,500,000)	58,500,000	-	50,000,000
13	SATPOL PP	(63,760,000)	(86,240,000)	-	(150,000,000)
14	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	42,050,000	32,950,000	225,000,000	300,000,000
15	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	-	-	-	-
16	BUPATI DAN WAKIL BUPATI	-	-	-	-
17	SETDA	(65,400,000)	205,508,000	(271,108,000)	(131,000,000)
a	SETDA (BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT)	-	-	50,000,000	50,000,000
b	SETDA (BAGIAN ORGANISASI KEPEGAWAIAN)	(33,400,000)	(16,600,000)	-	(50,000,000)
c	SETDA (BAGIAN ADM KEUANGAN)	-	(150,000,000)	-	(150,000,000)
d	SETDA (BAGIAN UMUM)	(700,000)	(49,300,000)	(350,000,000)	(400,000,000)
e	SETDA (BAGIAN HUMAS)	33,750,000	266,250,000	-	300,000,000
f	SETDA (BAGIAN TATA PEMERINTAHAN)	50,655,000	314,720,000	58,625,000	424,000,000
g	SETDA (BAGIAN HUKUM)	(1,175,000)	(48,825,000)	-	(50,000,000)
h	SETDA (BAGIAN ADM PEREKONOMIAN)	(108,530,000)	(76,817,000)	(19,653,000)	(205,000,000)
i	SETDA (BAGIAN ADM PEMBANGUNAN)	(6,000,000)	(33,920,000)	(10,080,000)	(50,000,000)
18	SEKRETARIAT DPRD	(424,350,000)	294,797,000	73,437,000	(56,116,000)
19	DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	230,250,000	4,750,000	-	235,000,000
a	(SKPD)	230,250,000	4,750,000	-	235,000,000
b	(PPKD)	-	-	-	-
20	INSPEKTORAT KABUPATEN	29,800,000	(29,800,000)	-	-
21	BKD	120,900,000	(301,139,000)	230,239,000	50,000,000
22	KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU	(26,150,000)	(13,350,000)	(10,500,000)	(50,000,000)
23	KECAMATAN REMBANG	-	-	-	-
24	KECAMATAN KALIORI	-	-	-	-
25	KECAMATAN SULANG	-	-	-	-
26	KECAMATAN SUMBER	-	-	-	-
27	KECAMATAN BULU	-	-	-	-
28	KECAMATAN LASEM	-	-	-	-
29	KECAMATAN PANCUR	-	-	-	-
30	KECAMATAN SLUKE	10,000,000	-	(10,000,000)	-
31	KECAMATAN PAMOTAN	-	7,250,000	(7,250,000)	-
32	KECAMATAN GUNEM	-	-	-	-
33	KECAMATAN SALE	-	-	-	-
34	KECAMATAN KRAGAN	-	-	-	-
35	KECAMATAN SEDAN	-	-	-	-
36	KECAMATAN SARANG	-	-	-	-
37	BADAN KETAHAN PANGAN DAN PELAKSANAAN PENYULUHAN PERTANIAN,PERIKANAN DAN KEHUTANAN	(10,625,000)	160,625,000	(50,000,000)	100,000,000
38	KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP	(51,870,000)	(13,680,000)	15,550,000	(50,000,000)
39	DINAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN	(113,788,500)	1,843,420,500	12,250,000	1,741,882,000
40	DINAS ESDM	(26,757,000)	(315,986,000)	3,746,764,000	3,404,021,000
41	DINAS KEBUDAYAAN,PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	38,530,000	114,838,000	(12,718,000)	140,650,000
42	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	69,944,000	1,061,606,000	4,831,450,000	5,963,000,000
	JUMLAH	(1,507,125,500)	13,693,471,700	2,385,386,650	14,571,732,850

B. REKOMENDASI

1. Kegiatan tahun 2013 baik Induk maupun Perubahan yang berasal dari Bantuan Provinsi yang tidak dapat dilaksanakan karena suatu hal dan dapat diluncurkan kembali pada Tahun Anggaran 2014, agar segera dilaksanakan pada awal triwulan pertama Tahun 2014.
2. Berkaitan dengan Revisi Perda Pengelolaan TPI, maka kami mengharapkan pembahasan Raperda tersebut dapat dilaksanakan dengan tepat sesuai dengan harapan masyarakat sebagai tolak ukur keberhasilan Pemerintah Daerah adalah menguatnya ketahanan pangan bagi masyarakat.
3. Pembangunan lumbung – lumbung pangan di masing – masing desa yang potensial.
4. Untuk mengurangi tingkat rawan kejahatan dan kecelakaan, agar segera dialokasikan dana yang cukup guna Pembangunan Jaringan Listrik Pedesaan (Jalisdes) dan penambahan PPJU di masing – masing wilayah.

V. PENUTUP

Demikian Laporan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Rembang dalam membahas Rancangan Perda Kabupaten Rembang tentang APBD Tahun Anggaran 2014, selanjutnya sebagai bahan pertimbangan dalam Persetujuan DPRD dalam Rapat Paripurna III DPRD Kabupaten Rembang.

Rembang, 19 Desember 2013

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

BADAN ANGGARAN

Ketua,	Sekretaris
Ttd	ttd
Ir. H. SUNARTO	**Drs. ACHMAD MUALIF**

Sesuai dengan aslinya
Sekretaris DPRD Kabupaten Rembang

Drs. ACHMAD MUALIF
NIP : 19620804 198803 1 011

PENDAPAT AKHIR FRAKSI DEMOKRAT

TERHADAP

RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH KABUPATEN REMBANG

TAHUN ANGGARAN 2014

FRAKSI DEMOKRAT
DPRD KABUPATEN REMBANG
Rembang 19 Desember 2013
DIBACAKAN OLEH : H. H A R N O, SE.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH II
KABUPATEN REMBANG
FRAKSI DEMOKRAT
Jl. Diponegoro No. 88 Rembang;
telp. (0295) 691194; 693290; 693291

PENDAPAT AKHIR FRAKSI DEMOKRAT

TERHADAP

RACANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2014

Kamis, 19 Desember 2013
Dibacakan : H. Harno, SE.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

YANG KAMI HORMATI,

- Sdr. Bupati dan Wakil Bupati Rembang .
- Sdr. Pimpinan dan segenap anggota DPRD Kabupaten Rembang .
- Sdr. Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Rembang ,
- Sdr, Sekretaris Daerah, Staf Ahli, Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Badan, Kepala Dinas, Kepala Kantor, Kepala Bagian Setda dan Camat di lingkunganemerintah Kabupaten Rembang.
- Sdr. Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan, LSM, Rekan Wartawan dan segenap hadirin yang berbahagia.

Sebelumnya marilah kita selalu memanjatkan puji syukur kepada Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa karena atas limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya kita semua masih diberi kesehatan, keselamatan lahir maupun batin. Sehingga kita dapat mengikuti Rapat Paripurna dalam rangka Penetapan Rancangan APBD Tahun 2014 menjadi Perda APBD Tahun 2014 Kabupaten Rembang dengan baik.

Dalam penyampaian awal ini kami memberikan apresiasi yang sangat tinggi kepada pemerintah kabupaten Rembang atas tercapainya tingkat kemampuan keuangan daerah (KKD) TINGGI, sehingga Rembang merupakan Kabupaten yang tingkat pertumbuhannya sangat pesat. Dan kami juga mengucapkan selamat kepada Pemerintah Kabupaten Rembang dengan predikat tertinggi di jawa tengah dalam hal transparansi informasi. Secara keseluruhan Kabupaten Rembang telah sejajar dengan kabupaten/kota yang maju di jawa tengah.

Bupati , Wakil Bupati dan sidang Dewan yang Terhormat

Syukur Alhamdullillah Tahapan demi tahapan Pembahasan Raperda tahun 2014 mulai dari penyampaian, Pembahasan ditingkat komisi, Banggar sampai dengan Finalisasi dengan TAPD berjalan dengan baik dan lancar sehingga Raperda tahun 2014 bisa terselesaikan sesuai dengan jadwal.,

Dengan mengucap Bismillahirohmanirohim kami dari Fraksi Demokrat menyetujui Raperda APBD tahun Anggaran 2014 untuk ditetapkan menjadi Perda APBD tahun 2014 dengan segala perubahan, pergeseran dan penambahan.

Adapun beberapa hal yang perlu kami sampaikan untuk diperhatikan dan ditindaklanjuti antara lain :

1. Mohon kegiatan banprop tahun anggaran perubahan di tahun 2013 untuk dapat dilaksanakan di awal triwulan pertama tahun 2014
2. Agar pemerintah kabupaten rembang menyiapkan segala sesuatunya berkaitan dengan penetapan undang undang tentang desa yang mulai dilaksanakan pada tahun anggaran 2014 ini.
3. Dalam penempatan lampu penerangan jalan umum (LPJU) Dinas perhubungan supaya bisa bekerjasama dengan Dinas ESDM untuk menempatkan lampu penerangan jalan umum (LPJU) tersebut supaya ditempat yang sangat penting, tidak seperti yang terjadi

didesa Pasar Banggi menumpuk jadi satu malaupun anggarannya dari APBN.

4. Mohon adanya pembinaan dan perhatian terkait dengan lahan parkir milik perseorangan yg kemunculanya sangat membantu masalah banyaknya parkir liar ditepi jalan, kami mengharapkan bantuan perkerasan dan penataan lahan parkirnya.
5. Supaya PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (RBSJ) agar segera melaporkan rapat umum pemegang saham (RUPS)
6. Dalam menghadapi akan di perlakukannya program BPJS diharapakan agar BLUD RSUD dan DKK lebih mempersiapkan diri sehingga program jaminan kesehatan kepada masyarakat bisa ditangani lebih maksimal dengan pelayanan yang prima.

Demikian Pendapat Akhir Fraksi Demokrat atas hasil Pembahasan Raperda APBD Kabupaten Rembang tahun 2014 dan Raperda APBD tahun 2014 tersebut dapat dijadikan Perda APBD tahun Anggaran 2014.

Akhirnya; atas perhatian hadirin sidang dewan yang terhormat, kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

PIMPINAN FRAKSI DEMOKRAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

KETUA	SEKRETARIS
H. ISLAHUDDIN	**H. GUNASIH, SE**

FRAKSI DEMOKRAT ★ DPRD II KAB. REMBANG

PENDAPAT

FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA

DPRD KABUPATEN REMBANG

Terhadap

Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah

tentang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten Rembang Tahun 2014

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA

Sekretariat: DPRD Rembang, Jl. Diponegoro No.88, Rembang 59212

PENDAPAT

FRAKSI PARTAI GOLKAR

DPRD KABUPATEN REMBANG

Terhadap

Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang

Tahun Anggaran 2014

Disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Rembang

Hari Kamis, 19 Desember 2013

Juru Bicara : SUCI RAHAYU, SH

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

- Sdr. Bupati dan Wakil Bupati Rembang yang terhormat.
- Sdr. Pimpinan dan Segenap anggota DPRD Kabupaten Rembang yang terhormat.
- Sdr. Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Rembang yang terhormat.
- Sdr. Sekretaris Daerah, Staf Ahli, Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Badan, Kepala Dinas, Kepala Kantor, Kepala Bagian Setda dan Camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang yang terhormat.
- Sdr. Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan, LSM, rekan wartawan dan segenap hadirin yang terhormat nan bahagia.

Sampai saat ini Tuhan Yang Maha Kuasa telah melimpahkan kesehatan, keselamatan serta kebahagiaan kepada kita semua. Karena itulah, Fraksi Partai GOLKAR mengajak untuk memanjatkan puji syukur kehadirat-NYA seraya mohon agar kita selalu diberi kesehatan dan kekuatan agar kedepan kita bisa melaksanakan tugas dengan baik dan benar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat bangsa dan negara Indonesia, khususnya masyarakat Kabupaten Rembang.

Sidang Dewan dan hadirin yang terhormat.

Pertama-tama kami mengucapkan selamat dan sukses kepada para Kepala Desa se Kabupaten Rembang yang telah dilantik pada beberapa waktu lalu, disertai doa semoga bisa membawa amanah membangun desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Kami juga mengajak untuk mengingat istimewa tanggal 22 Desember yang kita rayakan sebagai "Hari Ibu". Dari mimbar ini perkenankanlah kami membacakan seuntai pujian untuk ibu sbb.

"Tak ada sutera yang begitu lembut seperti belaian seorang ibu,
Tak ada tempat yang paling nyaman selain pangkuan seorang ibu,

Tak ada bunga yang lebih cantik selain senyummu,
Tak ada jalan yang lapang seperti jalan yang dilewati langkah kakimu. Kau adalah alasan kenapa aku ada.... oh Ibuku..."

Sidang Dewan dan hadirin yang terhormat.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ibarat aliran darah dalam tubuh manusia, sedang Pemerintah Daerah ibarat jantung yang mengolah dan memompakan darah keseluruh tubuh. Maka bila terjadi gangguan dalam peredaran darah, seseorang akan sakit dan tidak bisa beraktivitas. Setelah melalui pembahasan antara komisi-komisi DPRD bersama SKPD, sampailah saatnya Fraksi Partai GOLKAR menyampaikan Pendapat Fraksi terhadap Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2014 sbb.

1. Secara umum kami masih melihat daya serap anggaran oleh SKPD pada tahun anggaran 2013 belum maksimal sehingga SILPA masih cukup tinggi. Kami menghimbau agar SILPA TA 2013 segera dilaksanakan pada awal tahun 2014 mendatang dan semua SKPD bekerja keras untuk menyerap APBD semaksimal mungkin namun tetap memperhatikan ketentuan yang ada.
2. Ada beberapa SKPD yang terlalu banyak program/kegiatan sehingga kewalahan pada saat melaksanakan, karena itu kami menghimbau agar dalam membuat perencanaan disesuaikan dengan kondisi yang ada. Sebagai contoh, pengadaan barang habis pakai dianggarkan maksimal sehingga belakangan tidak bisa terserap, kalau tidak bisa ya jangan dipaksakan.
3. Fraksi Partai GOLKAR memberikan apresiasi kepada Kepala Dinas Kesehatan yang berani menghentikan pembangunan PUSKESMAS Sale karena tidak sesuai dengan perencanaan (besteek) yang ada. Hendaknya hal ini memberikan pelajaran bagi semua pihak agar dalam melaksanakan pekerjaan sesuai perencanaan.

4. Masih kepada Dinas Kesehatan, kami melihat ada beberapa Puskesmas yang kelebihan karyawan di lain tempat kekurangan karyawan. Kami minta agar hal ini diperhatikan sehingga pelayanan kesehatan Puskesmas di seluruh Kabupaten Rembang berjalan dengan baik.
5. Kepada RS Dr R Soetrasno Rembang, walaupun klaim atau piutang Jamkesmas dari Pemerintah Pusat belum cair kami minta agar mengambil langkah dan tidak mengurangi mutu pelayanan bagi masyarakat peserta Jamkesmas. Juga kepada para pelayan kesehatan (dokter, paramedis, penyedia obat, petugas laborat dan donor darah) kami mohon pengertiannya agar tidak menimbulkan gejolak di RSUD Dr R Soetrasno rembang.
6. Arsip dan dokumen terutama arsip kenegaraan/pemerintahan merupakan elemen yang sangat penting untuk penyelenggaraan pemerintahan. Untuk itu kami mengharap kepada Kantor Perpustakaan dan Arsip agar tertib dan displin menyelamatkan dan melestarikan dokumen dan arsip, apalagi disana sekarang telah dibangun Depo Arsip.
7. Kami menghimbau kepada pemerintah, dalam hal ini Bagian Tata Pemerintahan agar dalam pelaksanaan Pilkades mendatang, kartu suara tidak lagi menggunakan tanda gambar (padi, ketela dsb) tapi menggunakan gambar/foto calon.
8. Untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan kami mengharap agar revisi Perda tentang Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) segera dilaksanakan.
9. Ketahanan pangan masyarakat merupakan hal yang tidak bisa ditawar, maka dari itu kami minta kepada Pemerintah Kabupaten Rembang untuk menghidupkan dan membangun kembali lumbung-lumbung pangan di desa yang berpotensi.
10. Keamanan, kenyamanan dan ketertiban merupakan prasyarat kehidupan masyarakat. Untuk menjaga keamanan kenyamanan dan mengurangi tingkat kerawanan kejahatan, kami mendesak kepada

Pemerintah Kabupaten Rembang agar dialokasikan dana bagi perluasan jaringan listrik pedesaan (Jarlisdes) dan penambahan lampu penerangan jalan umum (PJU) di beberapa wilayah.

11. Mengenai Proyek PAB (pengadaan air bersih) dari Dinas Pekerjaan Umum, pekerjaan yang mangkrak supaya diselesaikan dengan baikdan disempurnakan terlebih dahulu, baru kemudian membuat PAB yang berikutnya.

12. Mengingat banyaknya pembangunan jalan semakin meningkat maka kebutuhan mesin gilas juga makin banyak dan mendesak. Untuk itu agar pengadaan mesin gilas direncanakan pada tahun mendatang.

Sidang Dewan dan hadirin yang berbahagia,

Dengan ini Fraksi Partai GOLKAR menyatakan ***SETUJU*** atas ditetapkannya RAPERDA APBD Kabupaten Rembang tahun 2014 menjadi Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang tahun 2014. Menutup pemandangan fraksi ini kami ingin membacakan sebuah pitutur dalam tembang Kinanthi sbb.

"Penggawe becik puniku,
gampang yen wus dilakoni,
angel yen durung linawan,
ras arasen anglakoni.
Tur iku den lakonana,
munfaat badanireki"

artinya: Perbuatan baik itu sebenarnya mudah jika sudah diamalkan, sulit jika masih dalam angan angan dan malas melaksanakan. Maka sebaiknya segera laksanakan agar bermanfaat bagi dirimu sendiri.

Bila ada kata dan ungkapan yang kurang berkenan pada penyampaian Pendapat Akhir Fraksi Partai GOLKAR kali ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Tuhan YME senantiasa memberikan rohmah dan berkah kepada kita semua dalam menjalankan tugas dan

pengabdian kita untuk membangun Kabupaten Rembang. Rahayu ingkang samya pinanggih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

DPRD KABUPATEN REMBANG

FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA

Ketua,	**Sekretaris,**
H. ISMARI, SH	**JOKO SUSILO**

PENDAPAT AKHIR
FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBAGUNAN
DPRD KABUPATEN REMBANG
TERHADAP
RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH (RAPBD)
KABUPATEN REMBANG
TAHUN ANGGARAN 2014

PPP

DI SAMPAIKAN DALAM RAPAT PARIPURNA
DPRD KABUPATEN REMBANG
Hari : Kamis Tanggal :19 Desember 2013
Dibacakan oleh :.....

FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBAGUNAN
DPRD KABUPATEN REMBANG
Jl. P.Diponegoro no.88 Rembang Telp. (0295) 693292

PENDAPAT AKHIR

FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBAGUNAN
DPRD KABUPATEN REMBANG
TERHADAP
RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH (RAPBD) TA 2014

DI SAMPAIKAN DALAM RAPAT PARIPURNA
DPRD KABUPATEN REMBANG
Hari : Kamis Tanggal : 19 Desember 2013
Dibacakan oleh : .....

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Yang kami hormati saudara Bupati dan Wakil Bupati Rembang
Yang kami hormati :

- Saudara Pimpinan dan anggota DPRD kabupaten Rembang;
- Saudara Muspida kabupaten Rembang;
- Saudara ketua Pengadilan Negeri dan Kejaksaan Negeri Rembang;
- Saudara ketua Pengadilan Agama kabupaten Rembang;
- Saudara Sekda, Asisten Sekda, Kepala Bagian, Kepala Dinas, Kepala Kantor, dan Camat se- kabupaten Rembang;
- Saudara Sekretaris DPRD Kabupaten Rembang;
- Saudara-saudara dari kalangan media serta semua yang hadir pada sidang paripurna hari ini yang berbahagia.

Mengawali Pendapat Akhir Fraksi PPP ini, kami mengajak kepada para hadirin sidang dewan yang terhormat, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah SWT, atas segala nikmat, taufiq serta hidayahnya yang telah diberikan kepada kita, sehingga kita dapat bersama-sama hadir mengikuti rapat paripurna DPRD Kabupaten Rembang ini, dalam Penyampaian Pendapat akhir Fraksi, semoga pada pertemuan kali ini dapat membuahkan keputusan yang benar-benar dapat memberikan manfaat bagi masyarakat Rembang.

Sholawat dan Salam marilah senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, Nabi yang telah membimbing ummatnya termasuk kita sekalian ***"minadz dzulumati ilan nuur"*** dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti sekarang ini yakni dengan ajaran-ajaran agama Islam yang kita ikuti dan kita yakini kebenarannya.

Saudara Bupati, wakil Bupati sidang dewan yang terhormat,

Selanjutnya dalam penyampaian pendapat akhir fraksi terhagap Rancangan Angaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) TA 2014 ini, izinankan kami FP3 Menyampaikan bahwa Pembahasan RAPBD Tahun Anggaran 2014 ini merupakan pembahasan yang sangat istimewa, Sebab pembahasan RAPBD Tahun Anggaran 2014 ini merupakan pembahasan RAPBD induk yang terahir,bagi anggota DPRD Kabupaten Rembang Periode 2009 – 2014 maka akan lebih bangga dan menyenangkan lagi jika RAPBD ini benar-benar berpihak kepada kepentingan Rakyat., disamping itu hanya tinggal beberapa hari lagi Kita akan meninggalkan tahun 2013 dan Memasuki Tahun 2014, dimana pada Tahun 2014 nanti, merupakan tahun politik tentu mempunyai arti yang sangat penting bagi bangsa Indonesia, karena pada tahun 2014 nanti akan dilaksanakan Pesta Demokrasi yaitu Pemilu Legislatif secara langsung, Untuk itu marilah kita sambut dengan penuh kebersamaan dan rasa tanggungjawab demi terciptanya Negara yang Demokrasi dan berkeadilan , Jangan biarkan masyarakat terkesan kurang nyaman dan merasa resah dalam melaksanakan kuwajibannya sebagai warga Negara Indonesia untuk menentukan haknya dalam pilihan nanti. Marilah kita arahkan mereka dengan diberikan pendidikan politik yang benar dan penuh tanggung jawab, demi terciptanya Rembang yang damai, kondusif dan penuh rasa kebersamaan.

Saudara Bupati, wakil Bupati sidang dewan yang terhormat,

Setelah mengamati perjalanan APBD Tahun Anggaran 2013 Kami FP3 melihat terjadi SiILPA yang sangat tinggi (hampir 10 %) hal ini akan sangat dikhawatirkan terjadinya penurunan Anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Karena jika tidak terserap dalam pelaksanaan APBD 2013 .Harapan kami pada tahun Anggaran 2014 agar kiranya dalam pelaksanaan APBD 2014 dapat terserap 100% demi kepentingan Rakyat.

Saudara Bupati, wakil Bupati sidang dewan yang terhormat

Sebelum mengakhiri dalam penyampaian pendapat akhir fraksi terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja TA 2014 ini, perkenankan Kami FP3 menyampaikan saran dan himbauan sebagai berikut :

1. FPPP mengapreasi kepada Dinas Kesehatan kabupaten Rembang yang telah bertindak dengan tegas untuk menghentikan proyek pembanguanan puskesmas Kecamatan Sale karna menyalahi spak yang ada. Hal ini tentu janagan hanya di Dinas Kesehatan saja akan tetapi diharapkan juga di Dinas-dinas yang lain.
2. Dalam Menghadapai Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS) yang akan dilaksanakan pada 1 Januari 2014 nanti, FP3 menghimbao kepada Pemkab agar segera melakuakan persiapan-persiapan dan melaksanakan sosialisai kepada masyarakat karna hal tersebut sangat dibutuhkan
3. Program Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang dianggarkan sebesar Rp.550.000.0000 terkait untuk penyiapan tenaga kerja siap pakai terutama dikalangan kaum muda yang produktif. Diharapkan hal tersebut untuk disosialisasikan kepada masyarakat agar tenaga kerja yang potensial siap pakai dapat tersalurkan sehingga dapat mengurangi angka pengangguran.

Akhirnya dengan mengucapkan bismillaahirrahmaanirrahiem (بسم اللهِ الرّحمَن الرّحيم,) Fraksi Partai Persatua Pembangunan ***MENYETUJUI*** Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2014 untuk di sahkan menjadi perda.

Demikian Pendapat Akhir FP3 yang kami sampaikan, segala kesalahan dan kekhilafan kami mohon maaf, teriring doa semoga rahmat, taufiq dan hidayah-Nya senantiasa mengiringi langkah kita dalam melaksanakan aktifitas sehari-hari. Amien, Amien, Amien yaa Robbal 'alamien...!
APBD ini dari kita untuk kita. Semoga...!

وعليكم السلام و رحمة الله و بركاته

Rembang, 19 Desember 2013
Fraksi PPP,

Ketua,	Sekretaris,
SA'DULLAH	**QODRIYQH. Spd**

FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN ★ DPRD KABUPATEN REMBANG ★

PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
Membela Yang Benar

Pendapat Akhir
FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG
TERHADAP
RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2014

disampaikan oleh uhammad asnawi
Pada Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Rembang, 18 Desember 2013

Assalamu 'alaikum wr wb.

Yang kami Hormati, Bupati dan Wakil Bupati Rembang beserta jajarannya di lingkungan Pemkab Rembang

Yang Kami Hormati, segenap jajaran Forum Pimpinan Daerah Kabupaten Rembang

Yang kami Hormati, Pimpinan Sidang, Ketua dan Para Wakil Ketua DPRD Kabupaten Rembang, beserta segenap anggota DPRD kabupaten Rembang.

Yang kami Hormati, Saudara Sekretaris Daerah dan Sekretaris DPRD kabupaten Rembang beserta jajarannya.

Yang kami Hormati, kawan-kawan pers, kawan-kawan partai politik dan hadirin yang berbahagia.

Untuk mengawali pendapat akhir ini perkenankan kami menyampaikan apresiasi kepada kawan kawan anggota DPRD yang telah membahas RAPBD tahun 2014 ini dengan semangat dan ketekunan. Meskipun sebagian diantara mereka juga tengah sibuk sibuknya mempersiapkan "pertarungan" pada pemilu legislatif 2014 yang akan datang.

Kami juga menyampaikan apresiasi terhadap kawan kawan yang sekarang masih dinas dan akan mencalonkan kembali memasang atributnya secara benar. Sebab bisa kita saksikan bersama beberapa kandidat atau caleg lain masih ada yang memasang atributnya di depan sekolah, di depan tempat ibadah, menempelkan di pohon dengan cara memaku dan sebagainya. Mudah mudahan Satpol PP tak bosan untuk mengoperasi dan menurunkan atribut yang melanggar peraturan.

Sidang Dewan Yang Kami Mulyakan

Bahwa APBD tahun 2014 yang sedang kita susun ini adalah APBD "Khusnul Khotimah" karena dibahas pada akhir masa jabatan kita, berbeda dengan APBD Bupati yang akhir khusnul khatimahnya masih pada tahun 2014. Di sinilah letak krusialnya APBD 2014, salah dan benarnya akan berada di pundak anggota dewan. Inilah bentuk amanahnya seorang pemimpin dan pejabat publik. Melalui laporan APBD 2014 kita mempertanggungjawabkannya.

Kami juga sampaikan selamat kepada parpol yang telah mencairkan dana parpolnya, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Beberapa catatan untuk RAPBD tahun 2014 ini antara lain meliputi;

1. Soal besarnya Silpa, agar tahun mendatang lebih mendapatkan perhatian
2. Telah dicairkannya honor guru swasta dan guru madrasah diniyah, mudah mudahan selalu utuh diterimakan dan tidak lagi kurang jumlah bulannnya.
3. Bisa jadi besarnya silpa juga disebabkan oleh tidak optimalnya 5 hari kerja karena banyak kantor yang telah tutup sebelum jam 15.30 WIB.
4. Belum maksimalnya BLUD secara signifikan – dlm Pelayanan
5. Honor perawat mayat yang belum sepadan masih jauh dari harapan - Walau Naik sedikit

Sidang Dewan Yang Kami Mulyakan

Melalui pendapat akhir ini kami menyampaikan pesan dari beberapa ormas di Rembang yang dalam menerima undangan dari SKPD secara mendadak. Acara dilakukan siang hari, undangan baru dikirim pagi hari. Undangan dilaksanakan dalam tanggal yang sama antara tanggal surat dan tanggal kegiatan.

Dengan mengucapkan *bismillahirrahmanirrahim* kami bisa memahami dan menerima RAPBD kabupaten Rembang tahun 2014 untuk selanjutnya ditetapkan sebagai Peraturan Daerah.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Rembang, 18 Desember 2013
Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa

Muhammad Asnawi, SPdI	Puji Santoso, SE
Ketua	Sekretaris

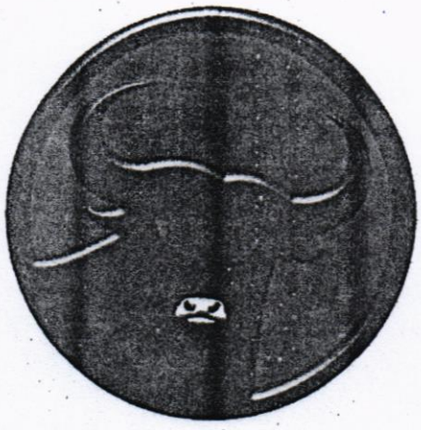

Pendapat Akhir

FRAKSI PDI PERJUANGAN
DPRD KABUPATEN REMBANG

Terhadap:

Rancangan Peraturan Daerah
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2014

Dibacakan Oleh;
SUMARSIH

Pada Sidang Paripurna
DPRD KABUPATEN REMBANG
Kamis, 19 Desember 2014

FRAKSI
PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

PENDAPAT AKHIR
Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Rembang

Terhadap;
Rancangan Peraturan Daerah
tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2014

Dibacakan Oleh;
SUMARSIH

Assalamu'alaikum wa rohmatullahi wa barokatuh,
Salam sejahtera untuk kita semua,
M E R D E K A...!!!

Yang terhormat, Saudara Bupati, Saudara Wakil Bupati, Saudara-Saudaraku Forum Komunikasi Pimpinan Daerah;
Yang terhormat, Saudara Pimpinan DPRD, Pimpinan Fraksi, Pimpinan Komisi, Pimpinan Badan Anggaran, Pimpinan Badan Musyawarah, Pimpinan Badan Kehormatan, Pimpinan Badan Legislasi Daerah, beserta seluruh Anggota DPRD Kabupaten Rembang;
Yang terhormat, Saudara Sekretaris Daerah, Saudara Sekretaris DPRD Kabupaten Rembang, Saudara Kepala Dinas, Para Kepala Bagian, para Kepala Kantor, Kepala Badan dan para staf di lingkungan Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Rembang;
Para hadirin, Insan Pers dan tamu undangan Peserta Rapat Paripurna yang berbahagia.

Hadirin Sidang Paripurna Yang Berbahagia,

Segala puja dan puji hanya milik Allah dan tiada pihak lain yang berhak selain hanya kepada Allah. Kami bersyukur, mengabdi dan meminta hanya kepada Allah dan hanya kepadaNyalah kami mohon pertolongan.

Sholawat dan Salam Ta'dzim semoga terhaturkan kepada junjungan seluruh ummat, Rosul Muhammad pembawa wahyu Allah, pelaku dan pemberi suri tauladan menuju insan kamil menuju sempurnanya ummat.

Selamat hari ibu, kami haturkan kepada semua kaum ibu di seluruh penjuru tanah air. Hanya karena ketulusan, ketabahan dan pengabdianmu semata kami semua yang hadir di ruang paripurna ini ada dengan capaian seperti kondisi saat ini. Semoga, Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa menerima pengabdian dan jasamu sebagai amal baik, semoga putra putrimu selalu ingat dan menghargai semua bentuk perjuanganmu, dan semoga putri putram8u menjadi pahlawan-pahlawan baru dalam kebajikan.

Hadirin Sidang Paripurna Yang Terhormat,

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Saudaraku Bupati dan Wakil Bupati Rembang yang telah memerintahkan para SKPD termasuk TAPD Kabupaten Rembang dalam pembahasan APBD tahun 2014 serta apresiasi yang tinggi kepada para SKPD yang yang dengan tekun dan teliti menengikuti pembahasan-pembahasan sehingga pembahasan ini berjalan dengan baik dan lancar. Serta mohon maaf, jika selama pembahasan perubahan APBD ini ditemui adanya pergerakan maupun pergeseran di sana-sini.

Mengingat telah selesai pembahasan Raperda APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2014 ini baik di tingat Komisi maupun Badan Anggaran sehingga selangkah lagi masuk ke tahap pengesahan. Namun sebelum Raperda ini disahkan menjadi Peraturan Daerah, perkenankanlah Fraksi PDI Perjuangan menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Selamat kami haturkan kepada pemerintah daerah Kabupaten Rembang, Kepolisisan Resort Rembang dan Kodim yang telah sukses menjalankan pilkades serentak dengan aman dan telah menghasilkan kepala desa-kepala desa terbaik di wilayahnya, semoga mampu mengemban amanah dengan baik dan benar.
2. Kami meminta dengan sangat kepada Saudaraku Bupati dan jajaran Eksekutif terkait, agar sisa 4 desa yang belum kelar dalam pelaksanaan pilkades segera diselesaikan dan dilaksanakan dengan baik di sisa waktu di penghujung tahun 2013 ini, pilih dan pilahlah desa-desa yang memungkinkan untuk dilaksanakan pilkades segera sehingga kita melepas tahun 2013 ini tanpa ada tunggakan dan hutang pekerjaan demi menatap tahun 2014 esok yang lebih baik.

Hadirin Sidang Paripurna Yang Terhormat,

3. Kami meminta agar carut marut penulisan nomenklatur/judul dalam Keputusan Bupati tentang penjabaran APBD hendaknya diteliti, dikoreksi dan disesuaikan dengan judul/nomenklatur dan nominal anggaran yang sebenarnya. Dilakukan tashih dan melalui mekanisme legal drafting yang benar sehingga kisruh judul/nomenklatur yang berakibat pada revisa revisi proposal hibah dan berkas-berkas pencairan hibah tidak menjadikan calon penerima hibah wira-wiri dan banyak mengalami kesulitan padahal nilainya tidaklah seberapa.
4. Kami meminta kepada para petugas pengawas agar lebih mengintensifkan pengawasannya dalam mengawasi proyek-proyek yang dibiayai oleh uang rakyat, sehingga kualitas pekerjaan bisa sesuai dengan yang diharapkan rakyat.

Demikian Pendapat Akhir Fraksi, ada kurang lebihnya mohon maaf. Dengan mengucap Bismillahirrohmanirrohiem Fraksi sepakat Raperda ini dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Rembang.

Wassalamu'alaikum wa rohmatullahi wa barokatuh,
MERDEKA...!!!

Rembang, 19 Desember 2013

F R A K S I
PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

KETUA,	SEKRETARIS,
JASMANI	**SUMARSIH**

PENDAPAT AKHIR FRAKSI

TERHADAP

RAPERDA APBD TAHUN 2014

19 DESEMBER 2013

FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL DPRD KABUPATEN REMBANG

PENDAPAT AKHIR

TERHADAP

RAPERDA PERUBAHAN APBD TAHUN 2013

Dibacakan Oleh : SUKARMAIN

Yang Terhormat,

Saudaraku Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Rembang

Saudaraku Bupati dan Wakil Bupati Rembang.

Saudaraku Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Rembang

Saudaraku Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang.

Saudaraku Staf Ahli Bupati, Asisten Sekda, Kepala Badan, Kepala Dinas, Kepala Kantor, Kepala Bagian dan Camat Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang.

Saudaraku Pimpinan Organisasi Profesi, LSM dan hadirin yang berbahagia.

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan Rahmat serta Karunianya, sehingga dapat menyelesaikan runtutan kegiatan pembahasan Raperda APBD T.A 2014. Semoga hasil yang kita peroleh maksimal untuk sebesar-sebesarnya kemakmuran rakyat.

Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada *uswatun hasanah*, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabat yang setia mengikuti sunnahnya. Semoga kita termasuk di dalamnya. *Aamin*.

Saudaraku Pimpinan dan hadirin yang berbahagia,

Mencermati wacana yang berkembang pada pembahasan baik ditingkat komisi ataupun badan anggaran, kami dari Fraksi Partai Amanat perlu menyampaikan beberapa hal :

1. Kami mendukung Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja dalam rangka penyiapan tenaga kerja siapa pakai untuk kaum muda produktif di Kantor BKBPM. Program ini merupakan salah satu upaya untuk meningkatan kualitas SDM di Kabupaten Rembang. Untuk itu perlu diambil langkah-langkah upaya sosialisasi kepada masyarakat secara luas dan terbuka, agar manfaat program ini dapat dirasakan masyarakat luas.
2. Kami mengharapkan RSUD Dr. Soetrasno senantiasa meningkatkan mutu pelayanan agar lebih bersahabat kepada pasien atau keluarga pasien.
3. Program Jaminan Kesehatan Nasional akan segera dilaksanakan dalam waktu dekat, kami mengharapkan pemerintah daerah untuk terus menerus melakukan sosialisasi tentang program ini, agar masyarakat dapat memahami dan ikut andil dalam kesuksesan program JKN.
4. Berkaitan dengan RUU Desa dan besarnya kucuran dana yang akan diluncurkan dari pemerintah pusat, maka paradigma berpikir tentang Desa harus lebih luas. Desa tidak lagi menjadi obyek, tetapi pelaku aktif dalam pembangunan. Menurut hemat kami :
    a. Perlu dipertimbangan untuk merubah Struktur Organisasi Pemerintah Daerah, khususnya Bagian Pemerintah untuk dijadikan Kantor atau Badan, sehingga dapat memberikan perhatan dan pembinaan yang cukup kepada pemerintah desa dalam mengemban amanat UU Desa Tersebut.
    b. Koordinasi Pemerintah Daerah (melalui SKPD terkait), harus senantiasa ditingkatkan agar kegiatan-kegiatan di desa dapat berjalan baik.

Saudaraku Pimpinan sidang dan hadirin yang kami muliakan,

Demikianlah pendapat akhir dari Fraksi Partai Amanat Nasional dan kami menyetujui Raperda Perubahan APBD T.A 2013 ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. Kami harapkan APBD dapat dilaksanakan dengan baik dan dapat bermafaat sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat Kabupaten Rembang.

Billahi taufiq wal hidayah.

Wassalaamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Rembang, 19 Desember 2013

FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL DPRD KAB. REMBANG

Ketua	Sekretaris
JIHAD ASIA PUSTAKAWAN, SE.	MOH. IMAM ZARKASI

PENDAPAT AKHIR
FRAKSI BINTANG KEADILAN DPRD KABUPATEN REMBANG

TERHADAP

HASIL PEMBAHASAN RAPERDA APBD KABUPATEN REMBANG
TAHUN ANGGARAN 2014

REMBANG, 19 DESEMBER 2013

PENDAPAT AKHIR
FRAKSI BINTANG KEADILAN DPRD KABUPATEN REMBANG

TERHADAP

HASIL PEMBAHASAN RAPERDA APBD KABUPATEN REMBANG
TAHUN ANGGARAN 2014

REMBANG, 19 DESEMBER 2013

FRAKSI BINTANG KEADILAN
DPRD KABUPATEN REMBANG
Jl.P.Diponegoro No.88 Rembang (0295) 691194
Kode Pos 59251

PENDAPAT AKHIR
FRAKSI BINTANG KEADILAN DPRD KABUPATEN REMBANG
TERHADAP
RAPERDA APBD KABUPATEN REMBANG
TAHUN ANGGARAN 2014

Rabu , 19 Desember 2013

Dibacakan oleh : **Hj.DHIAN RAHWENI DEWI, SE**

بسم الله الرحمن الرحيم

ASSALAMU'ALAIKUM WR.WB

Yang kami hormati, Pimpinan DPRD , Komisi , Fraksi dan Anggota DPRD ;

Yang kami hormati , Sdr. Bupati dan Wakil Bupati Rembang ;

Yang kami hormati , Forum Koordinasi Pimpinan Daerah ;

Yang kami hormati , Sdr. Sekretaris Daerah Dan seluruh jajarannya ;

Yang kami hormati, Sdr. Pimpinan Organisasi Profesi , LSM dan Hadirin yang berbahagia serta semua Masyarakat Rembang yang kami cintai;

Mengawali sambutan ini perkenankanlah kami mengajak hadrin sekalian untuk selalu memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, karena atas limpahan rahmat dan hidayahNYA kita dapat menghadiri Rapat Paripurna DPRD dalam

rangka penyampaian Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi terhadap RAPBD Tahun Anggaran 2014.

Dalam kesempatan ini kami mengucapkan selamat hari Ibu, " Ibu baktimu yang tiada henti , Ibu baktimu yang tiada harap balas budi, Ibu bimbinganmu yang tak pernah henti. Doa kami untukkmu semoga mendapat derajat yang tinggi di sisi ILLAHI RABBI.". Tak lupa dipenghujung tahun 2013 ini kami menghaturkan, Selamat Tahun Baru 2014, " Semoga 2014 yang akan dating lebih baik dari masa sekarang". Kemudian atas telah disyahkannya PERDA Desa oleh DPRRI, FBK mengapresiasi hal ini dan mengucapkan Selamat kepada semua Kepala Desa, semoga dapat melaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Hadirin Sidang Paripurna Yang Kami Hormati ,

Setelah mencermati dalam setiap tahapan pembahasan RAPBD Kabupaten Rembang tahun 2014 yang telah disampaikan oleh saudara Bupati , FBK menyampaikan beberapa hal Sebagai berikut :

I. Bidang Pendidikan, Dalam program wajib belajar 9 tahun dimana melalui APBN telah dianggarkan adanya dana BOS, BSM(Bantuan Siswa Miskin) dan beberapa anggaran penunjang yang lain, hal ini sesungguhnya dimaksudkan agar penyelenggaraan Wajar 9 tahun tersebut tidak lagi membebani masyarakat. Dalam kenyataannya dalam rangka menunjang prestasi Peserta didik, khususnya di

sekolah-sekolah exs RSBI, sumbangan "sukarela" dari wali murid tetap dilakukan, hal tersebut kiranya perlu diatur lebih cermat melalui SK BUPATI.

II.. Bidang Kesehatan, Dengan akan segera diberlakukannya JKN(Jaminan Kesehatan Nasional) yang merupakan bagian takterpisahkan dari program BPJS, kiranya jajaran Dinas Kesehatan dan RSUD segera melakukan persiapan utamanya penataan SDM yang memadai. Disamping itu guna meningkatkan akuntabilitas public dibidang pelayanan, maka perlu adanya sosialisasi (pemasangan SPM) di setiap tahapan pelayanan.

Masih terjadinya tunggakan pembayaran Klaim JAMKESMAS dari Kemenkes, senilai tidak kurang dari 15 M, yang dirasa sudah sangat mengganggu operasional RSU, maka Direktur RSU bersama pemerintah Daerah perlu melakukan langkah-langkah mengatasinya.

III. Di bidang Infra Stuktur,. FBK menyampaikan apresiasi kepada jajaran dinas kesehatan yang telah berani mengambil langkah, memutus dan menghentikan pelaksanaan pembangunan rehab gedung Puskesmas Sale yang tidak sesuai dengan ketentuan dan membahayakan keselamatan, semoga ini menjadi pelajaran berharga bagi para rekanan sekaligus kepada semua SKPD.

- Jalan Pamotan- Clangapan sudah rusak parah, disamping karena kualitas infra stukturnya yang kurang baik, hal ini juga diperparah dengan lewatnya

Tronton-tronton bermuatan melebihi tonase, untuk itu jajaran Dishub perlu segera melakukan penertiban.

IV. **APBD 2014** Agar dilaksanakan dengan sungguh – sunguh jangan sampai pengalaman beberapa kegiatan APBD Tahun 2013 yang gagal dilaksanakan, contoh pembangunan Gedung serbaguna TPI Tasik Agung Dengan Nilai Anggaran 3 M ***Roboh*** dan Pembangunan Puskesmas sale yang dihentikan karena tidak sesuai dengan ***spesifikasi*** , dengan Nilai Anggaran 400 juta serta beberapa kegiatan yang terancam tidak terselesaikan dalam Anggaran Tahun 2013 ini terulang kembali. FBK merekomendasikan agar Pemerintah Kabupaten Rembang untuk ***"Memblecklist*** " Rekanan yang sudah terbukti gagal dalam melaksanakan Kegiatan Tahun 2013 ini.

V. Tinggal sepekan **Tahun 2013** akan berakhir dan akan tiba **Tahun 2014** di Tahun ini adalah Tahun politik diharapkan ***legeslatif*** *&* ***Exsekutif*** , dalam hal ini Bupati & Wakil Bupati tidak melibatkan PNS menjadi tim suksesnya. untuk itu FBK Merekomendasikan Agar dalam ***Pileg*** beserta ***Pilpres*** *2014* PNS bersikap ***Netral.***

Demikiaan pandapat akhir terhadap RAPBD Kabupaten Rembang kami sampaikan, dengan mengucap, " ***Bismillahi wala Khaula wala khuuwata illa billah"*, FBK dapat menerima RAPBD Kabupaten Rembang tahun 2014 ditetapkan menjadi APBD** semoga bermanfaat. Maturnuwun.

WASSALAMU'ALAIKUM WR. WB.

Rembang , 19 Desember 2013

FRAKSI BINTANG KEADILAN

Ketua	**Sekretaris**
(dr.ROCHMAD ISNAINI)	**(MUNTHOHID , SH)**

BUPATI REMBANG

SAMBUTAN BUPATI REMBANG
PADA RAPAT PARIPURNA
PENETAPAN RAPERDA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)
TAHUN ANGGARAN 2014
Tanggal, 19 Desember 2013

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Ykh. - Ketua DPRD Kabupaten Rembang ;
Ykh. - Para Ketua Komisi dan Anggota DPRD Kabupaten Rembang ;
Ykh. - Rekan-Rekan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah ;
Ykh. - Sekretaris Daerah, Staf Ahli, Asisten dan Kabag. di Lingkungan Setda Kabupaten Rembang ;
Ykh. - Kepala Badan/ Dinas/ Kantor se Kab. Rembang ;
Ykh. - Para´ Camat dan Hadirin sekalian yang berbahagia.

Mengawali pertemuan kali ini perkenankanlah saya mengajak hadirin sekalian untuk selalu memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Swt, karena atas limpahan rahmat dan hidayahNya-lah kita dapat menghadiri Rapat Paripurna DPRD dalam rangka ***Penetapan Raperda Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah T.A. 2014***, dalam keadaan sehat wal'fiat tiada kurang suatu apa.

Selanjutnya, melalui forum terhormat ini, izinkanlah saya menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada pimpinan dan segenap anggota dewan yang terhormat, yang telah memberikan dukungan dan kerjasama yang baik dalam rangka melaksanakan berbagai program dan kegiatan pembangunan bagi kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Rembang ini.

Hadirin Sidang Dewan yang Saya hormati,

Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya sampaikan rasa syukur kehadirat Allah Swt, Tuhan Yang Maha Esa, melalui forum terhormat ini pembahasan RAPBD Tahun Anggaran 2014 ini, "Alhamdulillah", dapat disetujui dalam waktu yang tepat sesuai dengan jadwal perencanaan, dengan

disertai semangat kemitraan yang tinggi dan komitmen yang kuat antara pemerintah dan legislatif. Sehingga hal ini, semakin memperkuat harapan kami akan pentingnya konsistensi kita bersama, dimana DPRD sebagai mitra strategis akan senantiasa mengawal dan mengagendakan proses-proses perencanaan dan penganggaran secara sinkron antara jajaran eksekutif dan legislatif.

Hadirin Sidang Dewan yang Saya hormati,

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa di dalam RAPBD tahun anggaran 2014 ini, kita dihadapkan pada tantangan yang sedemikian besar, krisis perekonomian dunia yang berdampak pada perekonomian Indonesia secara makro. ketidakpastian perkembangan perekonomian dan keuangan secara menyeluruh dapat memberikan efek dominan terhadap perkembangan perekonomian dan pembangunan daerah. oleh karena itu, kita tetap mengikuti dan mewaspadai agar langkah-langkah strategi kebijakan daerah dapat diantisipasi secara cepat, tepat dan terukur.

Oleh karena itu, marilah kita berusaha mengambil langkah-langkah strategis secara tepat, terarah dan konkrit serta menyesuaikan kondisi riil

masyarakat kita. Penting, artinya, ini harus kita lakukan dengan optimalisasi penerimaan sumber daya serta ketepatan dalam pendistribusian belanja daerah untuk memberikan ruang gerak dalam memberikan pelayanan publik yang prima.

Hadirin Sidang Dewan yang Saya hormati,

Pengelolaan keuangan daerah yang menerapkan prinsip anggaran berbasis kinerja, berpengaruh terhadap tahapan penyusunan anggaran, dengan pendekatan penganggaran yang mengutamakan hasil kinerja serta dapat diukur capaian targetnya, dengan tetap mengedepankan tranparansi, keterbukaan dan akuntabilitas berprinsip pada efisiensi, efektifitas, tepat guna dan tepat daya, mampu mencerminkan pengelolaan keuangan dalam rangka memberikan fungsi pelayanan publik secara utuh.

Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2014 tetap berorientasi pada anggaran berbasis kinerja, yang mengutamakan keluaran atau hasil dari program dan kegiatan yang akan dicapai, disertai penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur. Hal ini merupakan

implementasi dari fungsi perencanaan, koordinasi dan motivasi serta fungsi pengendalian dan evaluasi pelaksanaan strategi kinerja pemerintah daerah sebagai bentuk manajemen koordinasi yang baik.

Untuk itu, kami sangat menghargai semangat kerja keras dan kerjasama yang harmonis antara Eksekutif dan Legislatif yang terjalin selama ini. Sehingga melalui APBD ini, akan tercermin kebijakan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

Hadirin Sidang Dewan yang Saya hormati,

Program anggaran berbasis kinerja sebagai instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih program kegiatan yang akan dilaksanakan pemerintah Kabupaten Rembang untuk mencapai sasaran dan tujuan yang diikuti dengan pengalokasian anggaran untuk masyarakat.

Pelaksanaan penyusunan anggaran ini salah satunya adalah upaya untuk mengakomodir aspirasi masyarakat Rembang menuju situasi dan kondisi yang lebih kondusif, dan lebih mandiri, yang pada akhirnya nanti mampu mendorong perwujudan Rembang yang lebih baik dimasa kini dan dimasa yang akan datang.

Hal tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah merupakan keterkaitan antara perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, serta pertanggungjawaban dapat beriringan secara komprehensif dan terintegrasi menjadi satu kesatuan arah dan kebijakan Pemerintah Daerah.

Selanjutnya, setelah melalui pembahasan yang dinamis baik pada tingkat komisi maupun Badan Anggaran, pada hari ini kita telah mencapai kesepakatan mengenai program dan kegiatan serta besaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014.

Anggaran pendapatan pada RAPBD Tahun 2014 diperkirakan sebesar Rp.1.126.748.775.969,- *(Satu trilyun seratus dua puluh enam milyar tujuh ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus enam puluh sembilan rupiah)*

Selanjutnya untuk Anggaran Belanja RAPBD Tahun 2014, diperkirakan sebesar Rp.1.247.734.520.650,- *(Satu trilyun dua ratus empat puluh tujuh milyar tujuh ratus tiga puluh empat juta lima ratus dua puluh ribu enam ratus lima puluh rupiah)*, Sehingga

terdapat *defisit* sebesar Rp.120.985.744.681,- *(Seratus dua puluh milyar sembilan ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus empat puluh empat ribu enam ratus delapan puluh satu rupiah)*, yang akan ditutup melalui pembiayaan daerah sebesar Rp. 120.985.744.681,- *(Seratus dua puluh milyar sembilan ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus empat puluh empat ribu enam ratus delapan puluh satu rupiah)*, sehingga pada RAPBD Tahun 2014 sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan sebesar 0 (nol).

Hadirin Sidang Dewan yang Saya hormati,

Perlu diketahui , bahwa Kabupaten Rembang berhasil mendapatkan beberapa penghargaan diantaranya :

1. Di bidang Koperasi, berhasil mendapatkan Madya Koperasi dari Kementerian Koperasi dan UMKM
2. Dibidang Perikanan, juara 1 tingkat nasional, Adibakti Mina Bahari.
3. Dalam hal Keterbukaan Informasi Publik (KIP) berdasarkan pemeringkatan yang dilakukan oleh Komisi Informasi Jateng, Pemerintah Kabupaten Rembang menempati peringkat

teratas daftar transparansi Badan Publik Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jateng tahun 2013.

4. Dan Parahita Ekapraya Tingkat Utama dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak.
5. Disamping itu bukti keseriusan Pemerintah terhadap bidang pendidikan tetap memperhatikan kualitas peningkatan sarana prasarana pendidikan di semua bidang, mulai dari PAUD sampai tingkat SLTA baik fisik maupun non fisik.

Dengan banyaknya penghargaan yang telah diperoleh Kabupaten Rembang diharapkan dapat lebih memotivasi untuk meningkatkan kinerja dalam peningkatan pelayanan publik, di segala bidang pada masa mendatang. Hal ini tidak lain adalah berkat kerja keras dari semua jajaran dinas instansi dan masyarakat Kabupaten Rembang.

Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan dalam Rapat Paripurna persetujuan Penetapan Raperda Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014.

Semoga Allah Swt. senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingan kepada kita dalam membangun daerah dan mensejahterakan masyarakat Kabupaten Rembang, agar menjadi Kabupaten yang maju, mandiri, dinamis dan sejahtera. *Amin, amin, ya Robbal 'Alamin.*

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Bupati Rembang

H. MOCH. SALIM, M.Hum

1) F. PD.

1) Penjelasan rupa RBSJ ~ pengelolaan RBSJ. PTB → RBSJ.

2) F. Golkari

3). Peningkatan PJU, ok..! → Jarlitdas..

4). Dyserap. Anggaran ↓

5). Perda TPI → A kejahteraan Alyu.

FPPP

1) Jilpa A → A. Dindik.

2). Apresiasi Ka Dinkes kentikan proyek pusk. sale.

3). Dinsos → Tp. 550 jt. menyiapkan TK kaum menda..

4). BPJS → Dinkes / Bapel JKPS verifikasi data Jamkesmas

TAMBAHAN TEKS PIDATO BUPATI DALAM PARIPURNA III

MEMBAHAS APBD KABUPATEN REMBANG T.A. 2014

TANGGAL 19 DESEMBER 2014

Selanjutnya ada beberapa yang perlu kita cermati dalam APBD 2014 ini terutama terkait dengan kenaikan dollar maupun mata uang lainnya cukup signifikan yang menghambat Pemerintah Indonesia keseluruhan termasuk pemerintah Daerah sehingga ini akan sangat berpengaruh pada sektorperekonomian kita semua investor asing maupu investor lokal masih padamenahan untuk tidak melakukan investasi, karena kenaikan investasi kalo dihitung rupiah ini sudah 30% rata2 9500 sekarang mencapai 11.500 sampai 12.000, sehingga kondisi ini kita sikapi dengan implementasikan pada anggaran APBD 2014, termasuk penyesuaian yang akan kita laksanakan pada tahun 2014 juga menjelang tahun politik 2014 yaitu pemilihan Legislatifdan pemilu dan presiden Republik Indonesia untuk itu kami bersepakat berkomitmen untuk menyelesaikan program2 yang sudah disepakati terurtama program2 yang menjadi titik berat dari eksekutif maupun legislatif untuk sebisa mungkin saya berkomitmen melaksanakan sebelum April 2014, lalu kaitannya juga disini maupun keadaan memaksa pada tahun 2013 banyak silpa banyak kegiatan yang belum terserap ini nanti sekaligus akan saya berikan atau menanggapi apa yang menjadi rekomendasi pada Fraksi2 pada kesempatan ini, memang ada beberapa dari fraksi Demokrat penjelasan RBSJ dan pengelolaan pelabuhan Tanjung pinang yang selama ini barangkali ada beberapa kelompok masyarakat yang menanyakan karena barangkali belum jelas, terkait ini semua sebelumya saya agar paling tidak ketika ada audensi atau permasalahan permasalahan yang diadukan ke Dewan kami sungguh sangat berharap untuk bisa di koordinasikan sebelumnya sehingga ketika menerima atau memberikan jawaban atas permohonan atau laporan oleh masyarakat bisa dijawab dengan baik dan tepat.

RUPS mudah2an akan dilaksanakan terkait pengunduran diri direktur yang pertama bapak Siswadi lalu bapak Agung sampai haari ini hasil auditnya beda, lembaga independen pada saat direktur penggati bapak Siswadi yaitu bapak Agung belum bisa diterima atau diselesaikan di internal RBSJsehingga harus diselesaikan pada pak Trisetyo sebagai direktur penggati bapak agung untuk bisa mengaudit secara benar dan bisa diterima dengan baik, ada kenyataan2 yang menurut tim independen ini benar tapi tidak bisa diterima direktur ini kejadian yang lalu tapi untuk itu kali ini kelihatannya sudah ada sinkron untuk dilaporkan di RUPS kan selain itu barangkali ada penjelasan terkait pak trisetyo yang dalam hal ini juga menjabat di pelabuhan Rembang kencana atau pemegamg badan usaha pelabuhan atau yang sekarang ini terus melakukan pembangunan . Terkait dengan pengelolaan Tanjung pinang atau yang dikelola oleh PT. Pelabuhan Rembang Kencana termasuk sebenarnya

Dermaga Jati yang dibangun oleh Pemerintah Pusat termasuk jalan masuknya yang sekarang ini yang sedang dibangun semestinya seharusnya harus diserahkan kepada pengelola Pelabuhan Tanjung mas semarang surabaya maupun Tanjung priok setelah dibangun APBN selagi pemerintah itu partisipasi didalamnya diserahkan pengelola yaituPT. Pelindo dalam hal ini Penfgelolaan Pelabuhan Rembang Pelabuhan Sluke ini adalah PT. Pelabuhan Rembang Kencana atau Swasta yang didalamnya ada saham PT. Pelindo dalam hal ini pengelolaan Pelabuhan Rembang atau Pelabuhan Sluke ini adalah PT. Pelabuhan Rembang Kencana atau Swasta yang didalamnya ada saham RBSJ, yang dalam tanda petik saham itupun diutangi oleh pihak eee... pemegang saham sekarang yaitu PT. Bangun Arta Kencana jadi RBSJ ini tidak mempunyai kemampuan untuk bisa mengikuti investasi yang dilakukan sekarang ini sehingga sayapun di RUPS nanti menyarankan agar akan menyarankan untuk e... saham tersebut diuangkan saja atau dijual sehingga dana yang diperoleh ini agar akan bisa dimanfaatkan pada modal2 yang lebih strategis karena nilai dari RBSJ sampai sekarang ini ya hanya nol sekian persen saja dari itu kami juga menyarankan agar RBSJ juga minta royalti jadi setiap kegiatan yang dilakukan di Pelabuhan sebagai owner project atau pemilik project RBSJ mendapatkan royalti dari sana, jadi tidak modal tetapi mendapakan pendapatan. berapun yang ada transaksi disana atau jasa yang dilakukan dipelabuhan RBSJ mendapakan pendapatan dari hasil transaksi tersebut, lalu terkait degan hak pengelolaan lahan karena kami, saya beserta jajajran pejabat Kabupaten Rembang eksekutif sudah menandatangani kesepakatan bahwa hasil reklamasi lahan yang dilaksanakan oleh investor diserahkan kepada pemerintah Kab. Rembang ketika sudah menjadi HPLatau hak pengelolaan lahan dari pengelolaan lahan itu sudah saya konsultasikan kepada BPN pusat maupun kemendagri dari hak pengelolaan lahan itu akqan diterbitkan hak kelola lahan di atas HPL tetapi tidak bisa dijaminkan uang negara ini zero nol persen disana sehingga biaya bersama ditanggung oleh pihak investor atau swata pihak kabupaten menikmati mempunyai hak pengelolaan lahan berupa lahan yang sudah direklamasi bersama. lalu yang saya perjuangkan untuk pemerintah RBSJ sekali lagi saya mintakan kompensasi disana saya mintakan kompensasi berupa royalti satu lagi pendapatan prosentase tidak dari hasil atau laba tetapi dari omset dari kegiatan pelabuhan barangkali ini saja yang benar barangkali direktur maupun kepala dinas pperhubungan bisa lengkap menjelaskan secara lengkap kepada anggota Dewan maupun kepada masyarakat yang lain.mari ternasuk ada aktifitas semacam ini terima privat semua jadi untuk e,,, kalo ada yang ingin bekerja atau segala macem sepanjang itu masuk akal logika bisa diterima saya rasa tidak ada masalah dari pihak2 yang mau berpatisipasi sepanjang cara atau transaksi cara pembayaranya sesuai dengan kesepakatan masing2.

SElanjutnya untuk Fraksi Golkar jadi yang tanya demokrat pak Harno ini juga agak aneh semesti saya tanyaq secara langsung lalu golkar peningkatan PJU saya sepakat setuju sekali jadi titik2 yang rawan sejak dulu yang rawan kaliori semestinya saya mendorong kepada kepala dinas perhubungan bukan komunikasi bukan provinsi dari unit pusat lalu munjulah lalu digelontorkanlah lampu2 trafictlight ata marka jalan kebanyakan atua sebagian besar

dana dari APBN bahwa dari ESDM saya minta mulai diberikan lampu penerangan jalan terutama rawan lingkungan yang rawan tempat2 yang srtategis memerlukan penerangan dampak dari ini efeknya sudah jelas ketika memasang banyak PJU beban PJU akan banyak beban Kabupaten sekarang ini kalo 5 milyard tahun depan bisa 6 milyardsampai 7 milyard dengan penambahan PJU2 tersebut muda2an nanti tambahan PJU 6 milyard selanjutnya untuk daya serap anggaran memang kami seperti yang saya sampaikan didepan tadi mengakui untuk ini mendapatkan kendala yang besar seklai kami eksekutif obyek yang melaksanakan semua kegiatan yang obek penerima kritikan obyek juga peguna anggaran yang menjadi sasaran dari pihak2 yang tidak bertanggung jawab ya khususnya tahun ini sesungguhnya kita melakukan secara benar termasuk keputusan bapak joko secara primer tuntutan bebas ada yang aneh ada tuntutan bebas tetapi ada yang aneh ada tuntutan ada keputusan subsidier dari hakim yang memutuskan secara prosedur tidak ada kerugian negara ada kesalahan teknis saja dan kalo dicari kesalahan semua pasti akan salah dan kemarin dari PKB intinya hanya ijin mentri kehutanan yang belum turun dandiaqnggap total lose tidak dilaksanakan ini anah jadi sekarang ini banyak yang aneh jadi saya mohon pengertian rekan2 dewan ini sudah bekerja dengan SKPD tapi ini mengalami tekanan yang sangat hebat sekali terutama kepada bapak panitia pengguna anggaran kepala dinas jadi saya mohon pengertiannya di 2014 saya bisaq mengurai keruwetan2 ini saya bisa mengurai kegiatan2 bisa dilaksanakan segera dan dilaksanakan dengan jelas hanya hanya masalah ijin dari menteri kehutanan dari dinwil kantor wilayah perhutani dari unitnyaa unit jawa tengah sudah bener bener sudah tinggal nunggu dari ijin menteri daerah2 bermasalah ini ditahanlah untuk unit karena dari menteri minta pertimbangan dari unit lalu perhutani turun kesini kurang lebih satu tahun saya harus ijin tujuan jelas begitu jalannya lancar sekarang inisaya atau teman2 ini masyarakat rembang mau mengajak investor kesana mau mengajak orang beli kapurini sakarang disana mudah disana masuk untuk melewati terowongan ini bisa satu setengah jam sekarang cukup seperempat jam sudah sampai , jadi pertanyaannya manfaat yang sedemikian besar untuk masyarakat untuk pengusaha tambang ada 2000 disana sekarang bekerja dengan baik ini akan terus bertambah dan bertambah. selanjutnya untuk Perda TPI pasal beelum dicermati untuk kesejahteraan saya sepakat tetap untuk kesejahteraan nelayan saya sepakat tapi laksanakan ini dengan benar jangan sampai ada masalah , kami bukan mempersulit pencairan Bantuan Sosial kepada nelayan tapi kadang2 kelompok nelayan sendiri ini yang memusingkan karena tidak mau melengkapi administrasi seperti yang terjadi kemarin geruduk ke DPPKAD , ada permasalahan ini penggatian terhadap pemindahan jalan masuk TPI ini sebenarnya sudah 8m ini sudah besar sekali manfaatnya nantisebelahnya Taman Kartini ada salah pengertian saja , ya ini memang kondisi masyarakat rembang seperti itu ada salah lapangan wis nganggoni dikon ngaleh ijek disangoni iseh protes , jadi saya kadang2 pikirane diatas apa dibawah, jadi ini yang terjadi maka untuk perda TPI saya minta untuk dicermati secara benar , saya hanya menggaris bawahi pada rekan2 dewan dan kepala dinas kelautan perikanan atau yang mewakili suoaya untuk pendapatan Kabupaten REmbang pendapatan untuk Daerah dengn kita memberikan fasilitas sedemikian besar tehadap TPI ini supaya

diamankan pendapannya tetap standart minimal tetap sukur2 bisa dinaikan sedikit demi sedikit .ada yang beda lagi di TPI Tanjung Pinang ditanami pisang saya nggak negerti lagi ini dan pemeliharaan sudah saya kasih kekepala dinas mungkin ada kepentingan2 lain saya tidak ngerti atau mereka kurang sabar kalau dulu teman2 kami semasa kami masih menjadi proligan jadi ini ada yang rusak ya ditembel dewe sudah selesai, sekarang tanam pisang malah minta lagi memalukan sebenarnya padahal tempat TPI ini dipakai kerjasendiri mendapatkan pendapatan dari situ malah dipermalukan sendiri ini yang terjadi kondisi nya saya juga ndak ngerti Kepala DinasKelautan Perikanan mungkin hari ini mau saya panggil saya sudah beri pemeliharaan kemana larinya yang urgentnya seperti itu belum dilaksanakan .

Lalu untuk FP3 Silpa terkait dengan Silpa apalalagi Aggaran dan terbesar disilpa ini sebarnya adalah anggaran di Dinas Pendidikan saya sudah menggaris bawahi dari mulai 2010 yang kita laksanakan 2010 yang bermasalah bapak, jadi anggaran untuk pengadaan alat peraga dan buku ini jelas alat peraga dan buku sampai kapanpun tidak akan saya laksanakan ini statment saya , karena tidak jelas aturannya dan sangat banyk sekali celah hukumnya saya nggak mau ada korban2 lagi berikutnya karena eee,,, aturan yang tidak jelas, tidak ada kekuatan memayungi disana sehingga apapun bisa dipermasalahkan bahkan Dinas Povinsi juga menyalahkan apa yang kita lakukan padahal menteri pendidikan justru menjelaskan apa yang kita laksanakan dengan SK balebahasa itu semmua sudah clear dan tidak ada kerugian negara jadi menteri sudah menjawab SK Balbahasa sudah benar dan sudah bisa dilaksanakan membeli buku yang sesuai dengan ketentuan jadi silpa ini di dinas pendidikan barangkali kalo saya prediksi 80 sampai 100 milyard dana ini ngendon dari pemerintah pusat semua sudah ditransfer 100% ini yang terjadi jadi Silpa kalo 80sebenarnya atau 80 keaataslah ini sebenarnya sudah masuk akal lalu yang kedua dana DAK ada beberapa secara fisik bisa e,,, belom dilaksanakan karena alasan Perencanaan alasan ini dan itu lain sebagainya , di Rumah sakit di TPI juga karena situasi dan kondisi yang sangat kurang mendukung adanya pembangunan2 tersebut , selanjutnya saya juga sepakat mengapresiasi FP3 Golkar dan beberapa Fraksi tadi yang mengapresiasi langkah yang Kepala Dinas Kesehatan ini yang sebenarnya saya harapkan dari Kepala Dinas saya mempunyai keberanian untuk memutuskan yang menjadi ranah tanggungjawabnya yang menjadi porsinya tidak sedikit2pimpinan bahkan Pimpinan, sedikit2 ke wakil Bupati atau Bupati tetapi diatasi sendiri sesuai dengan tupoksi yang sudah diberikan tanggung jawab nya . Lalu untuk pemberdayaan atau bursa kerja kaum muda ini klarifikasi PAN tadi bukan BPKBPM tapi sekarang BPMPKB Badan Pemberdayaan Masrakat Perempuan dan Keluarga Berencana tapi bukan di BPMPKB dana tersebut ada di Dinas Sosial dan Tenaga Kerja yang benar barngkali nulisnya agak ngantuk ya pak main , itu didinas sosial di Dinas sosial ini sebenarnya kita hanya mendampingi apa yang sudah dilakukan bapak ibu jadi Plan ini sudah sampai 2015 targetnya 1500 kaum muda kita atau tenaga potensial kita bisa bekerja lalu 200 orang menjadi pengusaha atau wiraswasta dan saya kepengen jadi kita masak kta pemerintah kabupaten tidak melakukan pendampingan , itu dana kurang lebih ada 3 atau 4

milyard , saya hanya minta kemarin tolong pak waluyo koordinasi dengan Magistrautama sebagai pelatih atau asissor dan sekaligus mencarikan pekerjaan hasilnya dari 700 yang terseleksi ini yang sampai akhir ini masyarakat kita saudara2 kita sendiri itu hanya 430 orang , setelah dipekerjakan 347 orang luar kota sebagian ini yang mbalek 87 orang tinggal 240 orang ha ini kondisinya yang terjadi tapi minimal kita dipemerintah kabupaten ini kita sepakat dan untuk mendorongnya karena rekomendasi2 dari Fraksi2 yang lalu untuk dinas Tenaga Kerja ini supaya didorong agarannya agar bursa tenga kerja kita maksimal , saya jujur saja belum mempunyai konsep karena konsep leguren tidak akan menyelesaikan masalah harus ada langkah2 terobosan bekerja sama dengan pihak yang sudah mempunyai kompetensi tidak hanya mengandalkan instruktur2 yang ada di Dinas Sosial Tenaga Kerja tidak cukup karena bisanya hanya melatih saja tidak bisa mencarikan lahan atau tempat bekerja jadi dalam magitrautama ini sekaligus tempat kerjanya sudah di link kan sudah ada MOU anak2 ini lulus langsung bisa diterima oleh mereka jadi ini konsepnya,jadi ndak papa nanti dikurangi 200 nanti dilayakkan kayaknya nanti pak waluyu datang hari ini dilayakan dengan baik dan benar. Selanjutnya untuk BPJS saya rasa JKRS tetep kita laksanakankan ya karena mengatisipasi karena program pemerintah pusat ini seperti Jamkesmas aja sampai sekarang belom selesai permasalahnya yang kaya atau yang cukup mendapatkan jamkesmas justru yang tidak mampu atau yang miskin ini mendapatkan,,ee,,, tidak mendaqpatkan sehingga kita cover dari JKRS , JKRS jika masih aada yang kelewatan lagi masih bisa saya berikan rekomendasi , sehingga harapan saya ya hampir 99% koma sekian masyarakat kita yang membutuhkan pelayanan kesehatan terutama yang tidak mampu ini bisa kita biayai sepenuhnya . Lalu terkait pelayanan Rumah sakit terus dilakukan upaya terus menerus dilakukan upaya tapi sekali lagi saya garis bawahi disini adalah PNS , jadi Pegawai Negeri Sipil ya Standart pekerjaannya seperti itu ada kegiatan lebih harus ada insentif ada kegiatan seperti ini harus ada honor ini yang harus kita pahami harus kita sadari mau bekerja rajin dan tidak gajinya ya sama bagaimana bisa meningkatkan yang baik kalau sudah seperti ini kondisinya lalu saya garis bawahi juga barangkali kedepan atau stafnya yang ada disini e.. untuk kedepan saya berharap Perda tentang BLUD ini ada perlu dicermati lagi sekarang ini yang terjadi Pendapatan rumah sakit 70 milyard ini Komisi D khususnya ini habis dipakai 70 milyard itu untuk kegiatan RSUD dalam tanda petik atau garis bawahi kegiatan saja gaji pegawai kurang lebih 20 Milyard masih minta APBD kita jadi sebenarnya kita itu Min 20 M coba ini beda dengan Rumah sakit Swasta ndak ada kegiatn dari pemerintah buktinya bisa eksis dan terus bisa maju ini kondisinya. saya mencermati BLUD ini masih kurang pas sehingga perlu kembali dikonsultasikan lagi secar teknis karena memang pak dr. Rochmad dan kawan2 barangkali saya ee.. kurang memahami dikesehatan ini jujur saja dan secara teknis saya tidak menangani disana , saya hanya bicara ditingkat kebijakan prinsipnya secara kebijakan ini yang kurang pas, kalu 20 M ini bisa kita ambil ya bisa kita gunakan untuk membangun insfratuktur yang lain di Kabupaten Rembang ini termasuk investasi2 yang memanfaatkan galian C kita ada Pabrik semen dan lain2 ini otomatis pendapatan Asli Daerah kita akan meningkat cukup pesat, dengan Prabrik Semen

saja 20 sampai 30 M Pendapatan Tambahan kita bahkan bisa lebih kalau bisa optimal e.. pemerikasaanya.

Hadirin yang saya hormati

Selanjutnya untuk PKB dengan 5 hari kerja ini tidak optimal saya rasa mau 5 hari kerja atau 10 hari kerjapun ini tergantung manusianya inimenurut saya jadi kembali lagi sekali lagi sistem manusiannya dan manajemen pemerintahan ini keseluruhan harus ada betul2 penilaian kinerja sumberdaya manusia ini yang betul2 pas jadi antara yang rajin kalu yang rajin semua pekerjaan numpuk pada anak yang rajin itu sudah apa aja diserahkan yang rajin yang gampangan bagi yang tidak rajin tidak gampangan mau ngluyurmau apa sebenarnya Satpol hanya simbolis saja kkalu mau nangkap ratusan itu yang keluyuran itu jadi ini ya saya berupaya menumpahkan apa adanya karena saya mau pensiun supaya yang melamnjutkan saya bisa enak nanti jadi ini yang terjadi yang saya rasakan eksistensi sudah berupaya menegur menegur kepala Satpolnya jadi prubahannya masih sangat sedikit sekali.perlu ada penilaian2 yang yang lebih kompetentmaka ketika ada remonerasi PNS saya cuek saja mau ditambah mau tidak ndak urusan saya artinya sekarang ini bahkan Kasi ada yang mempunyai 1 staf saja bahkan tidak mempunyai staf itu ada lha ini.,, mesti tetap tertawa berarti ini ada , ada kondisinya tetapi ya karena kita secara keseluruhan orang bilang guru kurang, guru lebih2 sebenernya , lha sekarang sekolahan kita paling 500 orang guru kita 5500 orang murid kita keseluruhan 100 rb orang berarti 1 guru hanya mengajar 20 orang belum lagi pertanyaannya 2000 orang adalah GTT yang sekarang mendapat K2 atau apa itu jadi yang mau di PNS kan ini kacau lagi jadi ini akan banyak2 lagi ee.. guru2 honorer lagi kedepan maka saya minta kemarin 2014 ini dianggarkan 1,8 M untuk merekrut anak2 lokal untuk kita berdayakan kita bikutkan dikegiatan jadi bahasanya harian lepas dan saya mintakan dianggarkan dan dapat honor untuk kegiatan2 tersebut ni ada 150 lebih atau 100 sampai 150 anak yang mau saya rekrut untuk membantu terutama SKPD2 yang masih kurang tenaga untuk kegiatan2 operasionalnya . Jadi saya rasa saya sangat apresiasi terhadap hal ini lalu ee... untuk perawat2 mayat ini sebenarnya diseluruh Indonesia atau seluruh Jawa Tengah ini barangkali hanya Rembang yang mempunyai Perawat mayat perempuan terutama yang mendapatkan honor ya di Rembang baranngkali jadi sudah kita berikan ya perhatian itu kalu yang mbah modin ini kan sudah ada tunjangan di Perangkat Desa sehingga saya mengikuti saja kalu memang ada, ada apa rekomendasi secara manusiawi memang perawat2 jenasah perempuan ini khan sangat kurang sekali dan sangat terbatas maka e.. seandainya nanti perubahan atau tahun depan mau ditambah ya saya sangat apresiasilah dengan kondisi ini .

Selanjutnya untuk PDI ya carut maryt Perbub Hibah kepada penerima Hibah jadi ya apa jadi saya rasa kondisinya tidak separah itu tidak sampai carut tidak sampai marut tetapi ya kadang2 ya kurang sinkron begitu saja ya saya rasa Perbub ini akan kita jadikan acuan untuk bekerja yang harus disadari bapak ibu penerima Hibah ini adalah masyarakat yang kadang2 tidak mengerti administrasi jadi ini yang menyusahkan lalu di e... Permendagri ini juga

banyak aturan2 sekali seperti ada pernyataan miskin kalu bansos kalau Hibah harus ada e.. tidak boleh 2 kalilah ini banyak sekalilah aturannya , Prinsip selama itu sesuai dengan aturan lalu sinkronisasi secara teknis e.. nanti di DPPKAD maupun penerima calon penerima Hibah ini ada sosialisasi paling tidak biar semua clear kedepan tidak jadi perbincangan yang ndak perlu dikumpulkan calon penerima hibah ini ada 1000 orang barangkali atau 500 orang ya e.. dikumpulkan disosialisasi supaya mengerti caranya tu seperti ini barangkali begitu nanti malam bisa kita bicarakan atau kita undang pasti nggak ada yang datang jadi ini juga repot merepotkan kita juga. Selanjutnya untuk pengawasan proyek saya sepakat untuk lalu Pilkades yang masih tersisa kemungkinan ini kemungkinan e.. yang bisa dilaksanakan hanya Dadapmulyo dan Tlogotunggal namun kemarin saya menerima apa itu surat cinta yang warnanya hijau dari lembaga bantuan hukum atau apa itu e.. yang mengghendaki supaya Pilkadesnya ditunda jadi antara jadi apa nggak masing2 punya kepentingan saya rsa saya serahkan kepada e... secara teknis kepada assisten 1 dan kabag Tata Pemerintahan dan Jajarannnya secara teknis memungkinkan dilaksanakan ya jalan kalau tidak ya tidak usah itu saja sehiingga ya kami dalam mengambil kebijakan ini sudah sesuai dengan ril yang benar .

Selanjutnya untuk Fraksi PAN

undang undang desa ada beberapa yang menyusul juga perlu ada SOTK ini sangat cerdas lagi saya teimakasih dari Fraksi PAN dari e.. kabag Orpeg barangkali kalau hadir atau yang berkaitan ya ini bisa diusulkan nanti menjadi Perda jadi kalau memang Undang undang desa betul2 terwujud segera dilaksanakan memang untuk SKPD yang menangani ini minimal harus kantor atau Badan karena akan banyak permasalahan disana dan 1 tugas yang ada di BPMPKB di Pemberdayaan Masyarakat ini akan kita ambil dan masuk kesitu sehingga bisa klop semua jadi pemberdayaan masyarakat desa lalu tentang pendampingan , pendampingan kegiatan di desa supaya bisa jangan da masalah di belakang hari .

Selanjutnya untuk FBK sumbangan Sukarela

jadi ini jujur saja kami juga agak kesulitan karena begini salah begitu salah ya kalau tidak saya ijinkan sekolah tidak akan berkembang baik berkembang maju kalau saya ijinkan harus anak yang mampu ada subsidi silang ini penekanan saya anak2 yang mampu dan ada subsidi silang artinya anak yang tidak mampu tidak boleh ditarik ini sudah saya garis bawahi tetapi nggak tau ini prakteknya barangkali susah atau seperti apa di komite tetapi bahwa sumbangan sukarela ini kenyataannya sudah dibicarakan di komite mudah mudhan komite dan sekolahannya ini sungguh sungguh e.. program itu bisa dilaksanakan jadi tidak hanya sekedar apa wacana tetapi betul beul sungguh2 bisa dilaksanakan seperti ee... pada kali ini saya berterimakasih sekali pada Komisi D yang sudah mengangggarkan beasiswa untuk anak2 disekolah universitas of China atau UC bagi 5 anak kita yang terbaik untuk kita sekolahkan di Negeri China Universitas Tehnologi apa saja ni ada jurusannya di sana kami besrta bapak Ketua DPRD tidak selaku Bupati dan dan Ketua DPRD tetapi selaku wakil dari

Masyarakat karena tidak ada ijin keluar negeri e.. kemarin sudah melakukan MOU di sana ya untuk tahun ini kita coba untuk ditindak lanjuti , karena kita sudah persiapan untuk Go International , di Kabupaten Rembang ini saya juga berharap anak2 masyarakat kita juga Go International juga, ada ada 15 jajaran staff di Pemkab ya semuanya bisa pak camat anak buahnya bisa siapa saja yang penting punya kemampuan yang expert di bidangnya untuk kita berikan bimbingan teknis atau pelatihan selama 6 bulan di Ghuangzou China sana di ITUC kita masukkan anggarkan pada tahun ini , Insyaallah bisa mulai dilaksanakan persiapan bulan Juli karena bulan September sudah mulai tahun ajarannya , sehinnga harapan saya e... SMA 1 ini sebenarnya menjadi perwakilan ITUCdi Indonesia yang pertaMA 1 dan ini saya apresiasi dan dan teman2 Dewan ini mendukung dengan kegiatan ini dan semua maka salah satu yang hadir pada ruangan ini anak2nya bisa mengikuti pendidikan disana e.. dengan Program Beasiswa tersebut. Selanjutnya untuk tunggakan Jamkesmas sampai 15 M ini juga sangat merepotkan jadi kami di rekomendasi unuk membuat langkah2 mengatasi secara terobsan apabila ada celah sedikit saja aparat hukum masuk jadi ini jelas tidak bisa mau ndak mau ya seperti itu jadi sampai hari ini juga laporan ke direktur RSUD kita masih hutang obat kepada dibeberapa suplier obat , ini juga sangat mengkhawatirkan sekali kondisinya ada yang distop ada yang masih bertahan mudah mudahan awal januari bisa dicairkan sepenuhnya . Lalu untuk Gedung Tasik agung bukan 3 M tapi 1,4 M bapak anggaran yang tidak jadi dianggarkan alias kena bencana atau masalah teknis didalamnya sehingga anggaran ini hangus dan semua anggaran tadinya 50 M